

DEWAN REDAKSI

BUSINESS & MANAGEMENT JOURNAL

ISSN: 1693 – 9808

Pengarah

Suhendar Sulaeman

Pemimpin Umum

Eddy Irsan Siregar

Pemimpin Redaksi

Nur Hidayah

Dewan Redaksi

Adi Fahrudin

Agus Suradika

Irwan Prayitno

Riyanti

Siti Hamidah Rustiana

Suwarto

Redaksi Pelaksana

Iskandar Zulkarnaen, Iwan Sumantri

Sekretariat

Diah Mutiara, Nur Aziz Hakim

Penerbit

Magister Manajemen

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jakarta 15419

Indonesia

Kantor Sekretariat

Gedung Sekolah Pascasarjana

Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta 15419, Indonesia

Tel. +62 21 7492875 Fax. +62 21 7493002; 7494932

E-mail: bmj.umj@gmail.com

Website: <http://pascasarjanaumj.org/jurnalpage-1>

Business & Management Journal merupakan jurnal ilmiah yang menyajikan artikel orisinal tentang penelitian empiris terkini dalam bidang bisnis dan manajemen. Jurnal ini merupakan sarana publikasi dan ajang berbagi karya riset dan pengembangannya di bidang bisnis dan manajemen. **Business & Management Journal** dimaksudkan sebagai media diseminasi hasil karya para peneliti dan pegiat di bidang bisnis dan manajemen. Dari hasil diseminasi diharapkan munculnya ide, gagasan, isu-isu baru, serta solusi alternatif pemecahan permasalahan bisnis dan manajemen. Pemuatan artikel ilmiah di jurnal ini dialamatkan ke sekretariat redaksi atau melalui e-mail. Informasi lengkap untuk pemuatan artikel dan petunjuk penulisan artikel tersedia di setiap terbitan. Setiap artikel yang masuk akan melalui proses seleksi mitra bebestari dan atau redaksi.

Business & Management Journal is a scholarly journal presents original articles on recent empirical research in the field of business and management. This journal is a means of publications and event sharing research and development research in the field of business and management. **Business & Management Journal** is intended as a medium for the dissemination of the work of researchers and activists in the field of business and management. Dissemination of the results of the expected emergence of the ideas, new issues, as well as alternative solutions solving business and management problems. The scientific articles to be presented in this journal is addressed to the editorial secretariat or by e-mail. Detailed information and instructions procedures to send an article is available in each volume. Every article will be subjected to single-blind peer-review process following a review by the editors.

Mengutip ringkasan dan pernyataan atau mencetak ulang gambar atau tabel dari jurnal ini harus mendapat izin langsung dari penulis. Produksi ulang dalam bentuk kumpulan cetakan ulang atau untuk kepentingan periklanan atau promosi atau publikasi ulang dalam bentuk apapun harus seizin salah satu penulis dan mendapat lisensi dari penerbit.

Permission to quote excerpts and statement or reprint images, any figures or tables from this journal should be obtained directly from the authors. Reproduction in a reprint collection or promotional purpose or republished in any form requires permission of one of the authors and a licence by the publisher.

DAFTAR ISI

BUSINESS & MANAGEMENT JOURNAL

Volume 11 Nomor 2, September 2014, Halaman 151-277, ISSN 1693 – 9808

Wiriadi Sutrisno	<i>Green Marketing dan Implikasinya Terhadap Sustainable Development di Era Globalisasi</i> Kajian Terhadap Strategi Pemasaran yang Berkelanjutan Perkembangan strategi marketing pada era globalisasi, dimana tidak saja mengedepankan kualitas, harga dan manfaat produk, tetapi juga peduli terhadap kelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan industri agar mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.	151
Irfan Purnawan, Muh. Kadarisman, Ismiyati	Efektifitas Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah untuk Kelangsungan Kesehatan Anak di Kota Depok Pertumbuhan penduduk di Kota Depok yang relatif cepat, berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup, tetapi lahan yang tersedia bersifat tetap sehingga menambah beban lingkungan hidup.	164
Khoirul Umam	Pemasaran Hijau: Dalam Ekonomi Islam, ditinjau dari Perspektif Kekhalifahan Umar bin Khattab r.a Kegiatan pemasaran hijau merupakan bentuk kebijakan pembangunan ekonomi yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berdampak kepada kegiatan usaha yang sadar lingkungan (bisnis hijau) sebagaimana praktik pemasaran hijau yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab	185
Gofur Ahmad	Kajian Kelembagaan dan Klasifikasi Wilayah dan Cabang PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Peningkatan jumlah pelanggan menuntut adanya perubahan strategi organisasi yang lebih mengedepankan aspek peningkatan keunggulan pelayanan melalui strategi “ <i>functional focus</i> ”, “ <i>developing capacity building</i> ”, dan “ <i>Business Process Reengineering</i> ”.	198
Rinaldy Arifin S, Gofur Ahmad, Suhendar Sulaeman	Gaji, Lingkungan dan Fasilitas Sebagai Anteseden dari Intensitas Turn Over, dimediasi oleh Kepuasan Kerja Kepuasan kerja yang tinggi akan menyebabkan rendahnya <i>Turn Over</i> pada karyawan, untuk tercapainya peningkatan kepuasan kerja dilakukan dengan peningkatan gaji	216
Yuan Badrianto, Suhendar Sulaeman, Nur Hidayah	Sikap, Insentif dan Sarana Prasarana, Pengaruhnya Terhadap Kinerja Guru pada Pengelolaan Sekolah Inklusi di Kab. Bekasi Sikap dan sarana prasarana merupakan dua variabel yang penting untuk diperhatikan dalam menjelaskan peningkatan kinerja seorang guru khususnya pada pengelolaan sekolah inklusi	234
Bahrul Yaman, Ahmad Rodoni, Shelly	IPO Syariah dan Faktor Fundamental Faktor fundamental di BEI menunjukkan hasil uji model OLS bahwa DES menunjukkan hasil uji model <i>ordinary least squares</i> bahwa ukuran perusahaan, jenis industri dan efek negatif reputasi <i>underwriter</i> signifikan terhadap <i>return</i> awal, sedangkan <i>return on assets</i> , <i>debt to equity ratio</i> , umur perusahaan dan nilai tukar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>initial return</i> .	253
Fadhlin Fathullaela, Ahmad Rodoni	Kinerja Keuangan dan Karakteristik Obligasi Terhadap Rating Obligasi Korporasi di Indonesia Variabel <i>debt to equity ratio</i> (DER), rasio lancar (CR), dan total omset aset (TAT) berpengaruh positif yang signifikan terhadap peringkat obligasi, dan variabel waktu hingga jatuh tempo (TTM) memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada peringkat obligasi. Sebaliknya, variabel <i>return on assets</i> (ROA) berpengaruh tidak signifikan terhadap peringkat obligasi	268

Green Marketing dan Implikasinya Terhadap Sustainable Development di Era Globalisasi, Kajian Terhadap Strategi Pemasaran yang Berkelanjutan

Wiriadi Sutrisno

Dosen FIPPS Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA)

e-mail: wiriadisutrisno@gmail.com

Abstrak

Kajian ini ingin mengungkapkan tentang perkembangan strategi marketing pada era globalisasi, dimana tidak saja mengedapankan kualitas, harga dan manfaat produk, tetapi juga peduli terhadap kelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan industri agar mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Mengambil perspektif pemasaran yang luas, konseptualisasi baru mengusulkan penggunaan tiga tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan kunci dalam strategi pemasaran perusahaan yakni ekonomi, sosial, dan ekologi keberlanjutan, yang merupakan tiga pilar utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dewasa ini tantangan utama untuk memenangkan persaingan bisnis adalah cara berpikir kreatif tentang bagaimana pemasaran dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar populasi dunia untuk memenuhi standar hidup yang lebih baik di tengah-tengah pembangunan berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, diperlukan konsep baru yang disebut Pemasaran Hijau (*green marketing*), yang merupakan kekuatan baru untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Kajian ini bertujuan selain mencoba untuk memperkenalkan konsep pemasaran hijau, menjelaskan mengapa pemasaran hijau penting dalam situasi global saat ini, juga ingin menggambarkan masalah dasar yang terkait dengan pemasaran hijau dan memberikan saran solusi yang diperlukan. Lebih dari itu kajian ini juga membahas tren terbaru dalam pemasaran hijau, dan menguraikan bagaimana pemasaran hijau dapat menjadi sarana bagi pembangunan berkelanjutan.

Green Marketing and Implications for Sustainable Development in The Era of Globalization, A Study of Marketing Sustainable Strategies

Abstract

The study would like to reveal how the development of marketing strategies in the era globalization running, which is not only propose to quality, price and benefits, but also care about environmental sustainability, social responsibility to enable the industry to reach sustainable development. Taking a macro marketing perspective, a new conceptualization proposes the use of three objectives of sustainable development as a key to the company's marketing strategy such economic, social, and ecological sustainability, which are called as three main pillars in achieving sustainable development. Recently, the main challenge to win the business how marketing can meet the needs of most of the world's population to a better standard of living in the midst of sustainable development. It required a new concept called Green Marketing, which is a new energy to support sustainable development. This study aims other than to try to introduce the concept of green marketing, explains why green marketing is so important in the current global situation, but also want to describe the basic problems associated with green marketing solutions and give advice needed as well. Moreover, this study also discusses the latest trends in green marketing, and lecturing how it can be a means for sustainable development.

Keywords: *Green Marketing, Sustainable Development, Three Pillars.*

I. Pendahuluan

Sikap objektivitas konsumen dalam memutuskan suatu pembelian sudah sangat maju dan sangat peduli dengan isu lingkungan. Dan gejala ini direspons secara proaktif oleh para pemasar sebagai ujung tombak industri, dengan menerapkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan isu kepedulian tentang kelestarian lingkungan. Strategi pemasaran tersebut adalah pemasaran yang berkesinambungan dan juga dikenal dengan istilah *green marketing* atau pemasaran hijau. Pemasaran hijau menitikberatkan pada penjualan produk atau jasa yang memperhatikan manfaat tidak saja pada kepuasan pelanggan juga juga kondisi lingkungan. Isu ini mulai muncul diakhir 1980-an dan awal 1990-an. Pemasaran hijau berkembang pesat dan konsumen bersedia untuk membayar mahal untuk produk hijau. Dampaknya timbul pasar baru pada konsumen dan lingkungan. Karena pemasaran hijau mempengaruhi semua bidang perekonomian, dan tidak hanya menyebabkan perlindungan lingkungan tetapi juga menciptakan peluang pasar dan kesempatan kerja baru. Perusahaan yang mampu peduli dan menjaga lingkungan dalam mengembangkan usahanya akan memperoleh kesempatan lebih untuk mendapatkan banyak pelanggan yang puas dan loyal.

Dalam situasi seperti itu akhirnya muncul apa yang disebut *green consumerism*. *Green consumerism* adalah kelanjutan dari gerakan konsumerisme global yang dimulai dengan adanya kesadaran konsumen akan hak-haknya untuk mendapatkan produk yang layak, aman, dan produk yang ramah lingkungan (*environment friendly*) yang semakin kuat (Doods, 2008).

Selanjutnya, produk yang diinginkan bukan yang benar-benar hijau, namun mengurangi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Dengan adanya kesadaran tersebut maka perusahaan menerapkan isu-isu lingkungan sebagai salah satu strategi pemasarannya atau yang telah kita kenal sebagai

green marketing. Hal ini juga sesuai dengan meningkatnya perhatian pada isu lingkungan oleh pembuat peraturan publik dapat dilihat sebagai indikasi lain bahwa kepedulian lingkungan merupakan area yang potensial sebagai strategi bisnis (Menon & Menon, 1997). Pada penelitian yang dilakukan oleh Byrne (2002) dikatakan bahwa *environmental* atau *green marketing* (pemasaran hijau) merupakan fokus baru dalam usaha bisnis, yaitu sebuah pendekatan pemasaran strategik yang mulai mencuat dan menjadi perhatian banyak pihak mulai akhir abad 20 (Ottman, 1998). Kondisi seperti ini menuntut pemasar untuk hati-hati ketika keputusan yang diambil melibatkan lingkungan. Perhatian terhadap isu-isu lingkungan terlihat nyata dari meningkatnya pasar yang peduli lingkungan (Laroche et.al, 2001). Perhatian terhadap isu-isu lingkungan ini ditandai dengan maraknya para pelaku bisnis dalam menerapkan standar internasional atau lebih dikenal dengan ISO-14000.

Green marketing merujuk pada kepuasan kebutuhan, keinginan, dan hasrat pelanggan dalam hubungan dengan pemeliharaan dan pelestarian dari lingkungan hidup. *Green marketing* memanipulasi empat elemen dari bauran pemasaran (produk, harga, promosi, dan distribusi) untuk menjual produk dan pelayanan yang ditawarkan dari keuntungan dan keunggulan pemeliharaan lingkungan hidup yang dibentuk dari pengurangan limbah, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan pelepasan emisi beracun. Keunggulan-keunggulan ini sering didekati melalui *life-cycle analysis* (LCA) yang mengukur pengaruh lingkungan pada produk pada seluruh tahap lingkaran hidup produk.

Perubahan perilaku pembeli pada dekade terakhir, telah menunjukkan pergeseran kepada perilaku pembelian yang peduli pada lingkungan. Ini suatu kondisi yang sulit untuk dilaksanakan. Dan tidak semudah seperti apa yang diwacanakan. Kampanye pemasaran hijau sudah menyentuh hati dan imej

para pembeli, yang secara bersama menyebut mereka sebagai *green customer*, atau konsumen hijau (Doods, 2008). Pada jajak pendapat publik yang diambil pada akhir 1980-an telah menunjukkan bahwa secara konsisten terdapat kenaikan yang signifikan persentase konsumen di AS dan di sisi lain juga timbul kemauan yang kuat untuk mendukung produk sadar lingkungan (NN, 2008).

Menurut Joel Makower, seorang penulis pada pemasaran hijau mengatakan bahwa salah satu tantangan pemasaran hijau adalah kurangnya standar atau konsensus umum tentang apa yang dimaksud "hijau.". Kurangnya konsensus antara konsumen, pemasar, aktivis, regulator, berpengaruh atas lambatnya pertumbuhan produk hijau, karena perusahaan sering enggan untuk mempromosikan atribut hijau mereka, dan disatu sisi konsumen sering skeptis tentang klaim produk hijau.

Meski demikian, pemasaran hijau terus mendapatkan dukungan, baik dari pihak produsen maupun konsumen, terutama, mengingat meningkatnya kekhawatiran global terhadap perubahan iklim. Kekhawatiran ini telah menyebabkan banyak perusahaan mengiklankan komitmen mereka untuk mengurangi dampak iklim dan akibatnya (Mendleson, 1995).

Pemasaran Hijau. *Bisnis Dictionary* mendefinisikan pemasaran hijau sebagai kegiatan promosi yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari perubahan sikap konsumen terhadap sebuah merek. Perubahan ini semakin sering dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan dan praktek-praktek yang mempengaruhi kualitas lingkungan dan mencerminkan tingkat kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat sebagai promosi produk yang aman lingkungan atau bermanfaat.

The American Marketing Association (AMA) mengadakan *workshop* pertama pada pemasaran ekologi pada tahun 1975 dan baru pada tahun 1980 isu pemasaran hijau disosialisasikan untuk pertama kalinya. AMA mendefinisikan pemasaran hijau sebagai pemasaran produk yang dianggap akan mempunyai tanggung jawab mengamankan lingkungan, menggabungkan beberapa aktivitas seperti modifikasi produk, perubahan proses produksi, kemasan, strategi periklanan dan juga meningkatkan kesadaran bersama tentang kaidah pemasaran hijau suatu industri.

Kotler dan Nancy (2005) menyebutkan bahwa *green marketing* merupakan salah satu kasus khusus dalam implementasi *Corporate Social Marketing* (CSM), yang terefleksikan dari sikap dan perilaku baik konsumen maupun produsennya. Hawkins, Mathersbaugh, dan Best (2007: 93) mendefinisikannya dalam beberapa indikator sebagai berikut:

1. *Green marketing* melibatkan proses mengembangkan produk yang mana proses produksi, penggunaan, dan pembuangan sampahnya tidak membahayakan lingkungan dibandingkan dengan jenis produk tradisional lainnya.
2. *Green marketing* melibatkan proses mengembangkan produk yang memiliki dampak positif kepada lingkungannya.
3. *Green marketing* juga harus mengikatkan penjualan produk dengan organisasi maupun even-even peduli lingkungan terkait.

Bauran Pemasaran Hijau. *Green marketing mix* dikemukakan oleh Hawkins, Mathersbaugh, dan Best (2007: 93) yaitu bauran pemasaran yang merupakan sistem yang dirancang sendiri oleh setiap perusahaan. 4P *green marketing* diambil dari pemasaran konvensional yang diaplikasikan dalam *green marketing*. Dari segi produk, tujuan ekologi dalam perencanaan produk adalah untuk mengurangi konsumsi sumber daya dan pencemaran serta meningkatkan konservasi sumber

daya alam yang langka. Harga merupakan faktor penting dari *green marketing mix*, dimana konsumen hanya siap membayar nilai tambah jika nilai produk juga bertambah. Dari segi promosi jenis iklan *green marketing* yang digunakan yaitu iklan yang menampilkan citra perusahaan tanggung jawab lingkungan, mempromosikan gaya hidup hijau dengan menyoroti sebuah produk atau layanan.

Place, pilihan di mana dan kapan harus membuat produk yang tersedia akan berdampak signifikan terhadap pelanggan. Ada berbagai pendapat mengenai aktivitas-aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas sosial yang menunjukkan bentuk keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat. Kotler dan Nancy (2005: 23) merumuskan aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam 6 kelompok kegiatan: *promotion, marketing, corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering, dan social responsibility business practices*.

Promotion adalah aktivitas sosial yang dilakukan melalui *persuasive communications* dalam rangka meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan isu sosial yang sedang berkembang. *Marketing*, dilakukan melalui *commitment* perusahaan untuk menyumbangkan sebesar persentase tertentu hasil penjualannya untuk kegiatan sosial seperti:

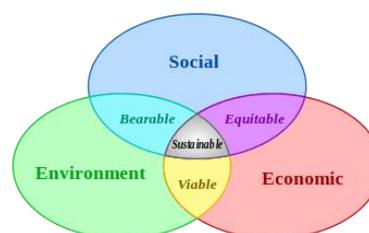
- *Corporate Sosial Marketing*, dilakukan dengan cara mendukung atau *behavior change* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
- *Corporate Philantropy*, merujuk pada kegiatan yang diberikan langsung
- *Community Volunteering*, merupakan bentuk aktivitas sosial yang diberikan perusahaan dalam rangka memberikan dukungan bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dukungan tersebut dapat diberikan berupa

keahlian, talenta, ide, dan atau fasilitas laboratorium.

- *Social Responsibility Business Practices*, merupakan kegiatan penyesuaian dan pelaksanaan praktik-praktik operasional usaha dan investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan melindungi atau menjaga lingkungan, misalnya membangun fasilitas pengolahan limbah, memilih *supplier* dan atau kemasan yang ramah lingkungan, dan lain-lain.

Pembangunan yang Berkelanjutan. Ada banyak definisi pembangunan berkelanjutan, salah satu definisi yang pertama kali muncul pada tahun 1987, *Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs* (Oxford: Oxford University Press, 1987).

Pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip pengorganisasian bagi kehidupan manusia di planet yang terbatas. Pandangan ini menjelaskan bahwa masa depan yang diinginkan manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dilakukan tanpa merusak keberlanjutan sistem alam dan lingkungan hidup, sehingga generasi mendatang masih memiliki kesempatan memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan memiliki kepedulian terhadap daya dukung sistem alam dengan tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia. Secara visual dapat terlihat pada diagram berikut:



Gambar 1. Diagram Sustainable Dalam Three Pillars

Pada awal tahun 1970-an, *sustainable* dijelaskan untuk menggambarkan kondisi ekonomi dalam keseimbangan dengan dukungan sistem ekologi. Para ilmuwan di berbagai bidang telah menyoroti *The Limits to Growth* (Belz, 2009) dan para *economist* telah menyajikan alternatif, misalnya *steady state economy* (NN, 2010), untuk mengatasi kekhawatiran atas dampak perluasan pembangunan manusia di planet ini.

Istilah pembangunan berkelanjutan menjadi penting setelah digunakan oleh Komisi Brundtland pada tahun 1987 sebagaimana dalam laporannya *Our Common Future*. Dalam laporan tersebut, komisi menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan yakni *development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*, yang bermakna pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan hak-hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka (Curtin, 2006).

Deklarasi *Millenium* PBB mengidentifikasi prinsip-prinsip dan perjanjian tentang pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

II. Pembahasan

Pentingnya Pemasaran Hijau. Menurut sebuah laporan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Bank Dunia dan Amerika Serikat, yang disiapkan untuk *G20 Summits* (Mexico, 2012), bahwa jika tidak ada tindakan kebijakan baru, diproyeksikan bahwa akan terjadi peningkatan emisi gas rumah kaca sebesar 50% dan kondisi ini akan terus memperburuk pencemaran udara perkotaan pada tahun 2050 yang akan datang (OECD, 2012). Meskipun laporan-laporan yang diajukan dalam pertemuan saling bertentangan, namun sebagian besar ilmuwan masih memprediksi bahwa suhu

rata-rata akan naik antara 1,8 dan 4,0 derajat Celsius selama abad ke-21, yang diakibatkan pembakaran bahan bakar fosil. Pada tahun 2030, bencana akibat perubahan iklim diproyeksikan akan menyebabkan kematian sejumlah 500.000 orang dan kerusakan lingkungan yang akan menghabiskan dana sebesar \$340 milyar, merupakan peningkatan jumlah kematian dari 315.000 orang dan kerusakan senilai \$125 milyar seperti yang sudah terjadi saat ini. Kebutuhan air secara global diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 55% pada tahun 2050, akibat cadangan air yang tidak cukup. Akibatnya, diperkirakan bahwa hampir 40% dari populasi dunia akan tinggal di daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang mengalami stres parah akibat minimnya air pada tahun 2050. Selama 25 tahun terakhir, 60% dari ekosistem utama dunia telah rusak atau tidak bisa digunakan secara berkelanjutan, termasuk adanya penurunan kualitas tanah, degradasi lahan dan penghijauan. Pada tahun 2050, keanekaragaman hayati global diproyeksikan menurun 10% lebih (OECD, 2012). Di bidang pertanian, peningkatan produktivitas telah membantu untuk membatasi kerugian ekosistem alami di banyak negara, tapi minimnya pengelolaan yang intensif telah memperburuk agrokimia dan polusi air tanah (Bank Dunia, 2012). Biaya dan konsekuensi atas kelambanan dalam mengatasi tantangan lingkungan sangat besar, baik dari segi ekonomi, manusia, dan dapat membahayakan perkembangan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (OECD, 2008). Dan ini bisa mengganggu kesejahteraan generasi mendatang secara signifikan.

Alasan mendasar untuk masalah-masalah kritis sesuai dengan pemahaman dasar Ekonomi, bagaimana orang menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan yang tidak terbatas (McTaggart, Findlay dan Parkin, 1992). Dengan demikian manusia memiliki keterbatasan sumber daya di bumi, namun harus melayani keinginan dunia yang tidak terbatas (Polonsky, 1994). Hak "Kebebasan Memilih", secara umum

telah ada pada individu dan organisasi, untuk memuaskan keinginan mereka. Ketika perusahaan menghadapi sumber daya alam yang tidak memadai, mereka harus mampu mengembangkan cara-cara atau alternatif baru untuk memuaskan keinginan yang tidak terbatas tersebut. Menyadari pentingnya hal ini, strategi bisnis utama yang dapat menjadi solusi terhadap masalah sumber daya terkait (pembangunan berkelanjutan) adalah pemasaran hijau. Pada akhirnya pemasaran hijau melihat bagaimana kegiatan pemasaran memanfaatkan sumber daya yang tidak memadai, untuk memuaskan keinginan konsumen, baik individu dan industri, serta untuk mencapai tujuan organisasi.

Mengingat masalah-masalah kritis yang timbul, negara memiliki kepedulian yang tinggi untuk perlindungan lingkungan. Orang-orang diseluruh dunia khawatir akan isu-isu keberlanjutan terkait dengan hal-hal yang dibahas sebelumnya. Berbagai penelitian ahli lingkungan menunjukkan bahwa orang sudah lebih peduli dan mengubah pola perilaku buruk mereka yang tidak peduli terhadap lingkungan.

Bisnis melayani berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan karyawan; sehingga pemimpin industri yang sensitif terhadap aturan baru akan melakukan proses untuk menghasilkan produk hijau. Mereka tahu bahwa untuk memproyeksikan citra sebagai pemimpin dan inovator, dapat diperoleh jika peduli terhadap soal-soal sosial dan sadar lingkungan. Pelanggan yang sudah tertarik, hanya ingin melakukan bisnis dengan perusahaan yang membangun bisnisnya yang berorientasikan *hijau*, juga pada perusahaan yang telah meluncurkan iklan dan *web* kampanye besar dan kuat, penerbitan laporan keberlanjutan secara luas didokumentasikan, bekerja sama dengan sumber-sumber eksternal untuk berkomunikasi secara transparan, dan mengkomunikasikan upaya mereka secara internal.

Sekarang kita melihat bahwa sebagian besar konsumen, baik individu maupun industri, menjadi lebih peduli terhadap produk ramah lingkungan. Menurut laporan global komprehensif terbaru oleh Analisis Industri Global, inc. (GIA 2011) di pasar pemasaran hijau, telah timbul peningkatan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dikalangan konsumen, baik pemerintah dan bisnis, putaran dana pada pasar global untuk pemasaran hijau diproyeksikan akan mencapai \$3,5 *trillion* pada tahun 2017. Jadi, di era dimana konsumen menentukan nasib sebuah perusahaan, pemasaran hijau menanamkan strategi proaktif untuk memenuhi pasar dengan memberikan produk atau jasa yang ramah lingkungan atau keduanya untuk mengurangi atau meminimalkan dampak merugikan pada lingkungan. Melihat pentingnya pemasaran hijau dalam kehidupan dasar, dapat dinyatakan bahwa pemasaran hijau adalah strategi yang harus dilakukan, untuk menyelamatkan bumi dan kesejahteraan generasi yang akan datang.

Pemasaran Hijau dan Pembangunan Yang Berkelanjutan. Tema umum dari strategi pembangunan berkelanjutan, adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan pertimbangan ekonomi dan ekologi dalam pengambilan keputusan dengan membuat kebijakan yang melestarikan kualitas pembangunan pertanian dan perlindungan lingkungan. Yang mengandung arti bahwa produk akhir pemasaran hijau akan memberikan perlindungan lingkungan untuk saat ini dan generasi masa depan. Semua kegiatan seperti pengembangan operasi yang efisien energi, pengendalian polusi yang lebih baik, kegiatan daur ulang dan kemasan yang bisa dipakai ulang, produk ekologi aman adalah bagian dari pemasaran hijau yang juga mengarah ke pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan ekonomi dan masyarakat dibatasi oleh batas-batas lingkungan (Ott K., 2003). Dengan demikian kita harus meringkainya dengan efektif untuk pemanfaatan secara optimal sumber daya

alam dan menjaga lingkungan yang aman. Semua perbedaan budaya dari seluruh dunia mengajarkan kita untuk mencintai alam. Namun sekarang kita tidak memanfaatkan sumber daya alam sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk memenuhi keserakahan. Akibatnya banyak masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang dialami penghuni planet yang serakah.

Solusi atas masalah ini adalah dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sesuai dengan "Laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations*, 1987)", dapat dilihat sebagai pola penggunaan sumber daya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sambil menjaga lingkungan sehingga kebutuhan tersebut dapat bermanfaat tidak hanya di masa sekarang, tapi dalam waktu yang tidak terbatas.

Pembangunan berkelanjutan adalah bentuk pembangunan yang bertujuan untuk konsumsi berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mencoba untuk melindungi lingkungan. Dua istilah utama tersebut bertujuan untuk mempertahankan ekonomi, sosial dan lingkungan modal jangka panjang. Sementara konsumsi berkelanjutan menjadi cara hidup dengan menggunakan sumber daya dengan cara yang meminimalkan kerusakan terhadap lingkungan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Istilah pemasaran hijau atau strategi bisnis hijau yang membangkitkan visi lingkungan hidup dan menambah biaya untuk barang yang normal, baru dikumandangkan pada satu dekade lalu. Saat ini sebagian besar industri memiliki persepsi yang mengasumsikan tidak ada nilai untuk produk ramah lingkungan. Mereka merasa tidak ada tekanan untuk membuat lingkungan bisnis hijau dan berperilaku dengan cara yang lebih bertanggung jawab, baik dari Pemerintah dan peraturan perundang-undangan maupun dari konsumen. Semuanya berjalan dengan kesadaran

akan betapa pentingnya kelestarian lingkungan, agar dapat bermanfaat bagi umat yang ada di dunia secara berkelanjutan.

Respons Terhadap Pemasaran Hijau. Pada tahun 1989, 67 persen orang Amerika menyatakan bahwa mereka bersedia membayar 5-10 persen lebih untuk produk ekologis yang kompatibel (Suchard, 1991). Pada 1991, orang-orang sadar lingkungan bersedia untuk membayar antara 15-20 persen untuk produk hijau. Saat ini, lebih dari sepertiga orang Amerika mengatakan mereka akan membayar sedikit tambahan untuk produk hijau (Rogers, 1995).

Sebuah tantangan penting yang dihadapi pemasar adalah untuk mengidentifikasi mana konsumen yang bersedia membayar lebih untuk produk ramah lingkungan. Hal ini jelas bahwa pengetahuan yang disempurnakan terhadap segmen konsumen akan sangat berguna.

Everett Rogers, sarjana komunikasi dan penulis *Difusi Inovasi*, mengklaim bahwa lima faktor berikut dapat membantu menentukan apakah ide baru akan diadopsi atau tidak, termasuk idealisme pergeseran ke arah *green*, yakni 1) Keuntungan Relatif, adalah sejauh mana cara baru diyakini dapat menambah hasil yang lebih menguntungkan dari pada praktek saat ini; 2) *Observability*, adalah semudah apa untuk menyaksikan hasil dari cara baru yang ditawarkan; 3) *Trialability*, adalah kemudahan dalam mencoba cara baru oleh seorang individu tanpa adanya komitmen penuh; 4) Kompatibilitas, adalah sejauh mana cara baru konsisten dengan praktek saat ini; 5) Kompleksitas, adalah betapa sulitnya untuk menerapkan cara baru (Rogers, 1995).

Hasil penelitian Choudhary (2013) menyimpulkan bahwa *Companies with smaller marketing budgets tend to spend more on green marketing. Firms with a marketing budget of under \$250,000 spend just over 26% on green marketing, while those with*

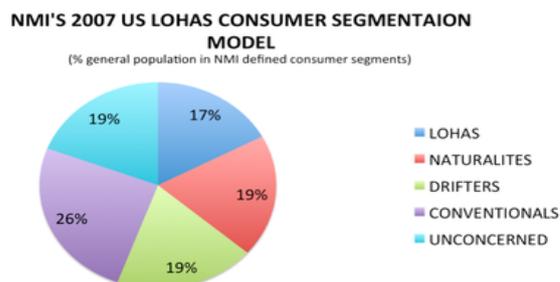
budgets of more than \$50 million spend 6% on green marketing. Yang bermakna bahwa untuk perusahaan yang memiliki anggaran pemasaran yang relatif kecil, cenderung akan mengeluarkan biaya lebih dalam melakukan *green marketing*, seperti terlihat pada perbandingan dimana perusahaan yang memiliki anggaran dibawah \$250,000 mengeluarkan biaya lebih dari 26% sementara perusahaan yang memiliki anggaran lebih dari \$50 juta mengeluarkan biaya untuk *green marketing* sebesar 6%.

Pola Hidup Sehat dan Berkelanjutan. LOHAS adalah singkatan dari *Lifestyles of Health and Sustainability* atau Pola hidup yang Sehat Dan Keberlanjutan, terpadu, pertumbuhan pasar barang dan jasa yang pesat, menarik konsumen akan rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mempengaruhi keputusan pembelian mereka. *The Natural Marketing Institute* (NMI) memperkirakan pasar konsumen LOHAS di AS akan produk dan jasa menjadi USD209 miliar (untuk semua segmen konsumen) (Todd, 2008).

Lima segmen LOHAS seperti yang ditentukan NMI, antara lain meliputi (1) LOHAS, segmen yang aktif dan sangat peduli lingkungan untuk kesehatan pribadi dan kelestarian alam. Segmen ini adalah pembeli fanatik atas produk hijau dan bertanggungjawab secara sosial dan pengadopsi awal yang mempengaruhi orang lain; (2) *Naturalites*, segmen yang termotivasi, terutama oleh pertimbangan kesehatan pribadi. Mereka cenderung membeli lebih LOHAS konsumsi produk-produk vs item tahan lama; (3) *Drifters*, segmen yang kemungkinan berminat akan produk hijau. Mereka akan tertarik akan tren pembelian jika terasa mudah terjangkau. Saat ini cukup terlibat dalam perilaku pembelian hijau; (4) *Conventionals*, segmen yang terdiri dari kaum pragmatis yang menganut perilaku LOHAS ketika mereka percaya bahwa LOHAS membuat perbedaan. Mereka sangat hati-hati dalam menggunakan uang; (5) *Unconcern*, segmen yang

memiliki karakter (menyadari atau tidak) tidak peduli tentang lingkungan dan masalah sosial terutama karena mereka tidak memiliki waktu atau sarana—konsumen ini sebagian besar terfokus pada mendapatkan kepuasan sesaat semata.

Berikut dalam diagram *pie* mengenai distribusi segmen LOHAS di AS:



Gambar 2. Diagram *pie*, Model Segmentasi Pengguna Produk Hijau di AS (Todd, 2008).

Tantangan Terhadap Pemasaran Hijau.

Pendekatan pemasaran hijau saat ini sangat populer dan efektivitasnya juga diperdebatkan. Kelompok *pro's* pemasaran hijau mengatakan bahwa dari 11.000 perusahaan yang berbeda, seperti *Energy Star*, mesin cuci dan bola lampu, mengalami penambahan jumlah produk yang nyata dan Shel Horowitz, seorang pemasar lebih dari 30 tahun dan penulis utama dari *Guerrilla*.

Marketing Goes Green (Levinson, 2010) menyatakan bahwa agar memperoleh pasar secara efektif, bisnis hijau perlu menerapkan strategi pemasaran dalam menentukan tiga audiens yang berbeda: yakni *deep green*, *lazy green*, dan *nongreen*; masing-masing akan memiliki titik pemicu yang berbeda yang akan mempengaruhi mereka untuk membeli. Dan untuk para *nongreen*, pemasaran efektif biasanya menekankan keunggulan produk selain terfokus pada penekanan produk hijau semata (Shell, 2013). Di sisi lain, Roper Hijau *Gauge* menunjukkan bahwa persentase yang tinggi dari konsumen (42%) (Wall

Street, 2007) menunjukkan bahwa hasil penjualan produk hijau tidak sebaik produk non hijau.

Namun dengan tindakan yang proaktif dalam mengkampanyekan pepatah *Happy Planet*, Hari Bumi setiap hari, maka capaian penjualan terhadap produk hijau semakin meningkat. (Hans, 2007)

Kasus Pemasaran Hijau. *Phillips's "Marathon" CFL lightbulb.* Pada saat peluncuran awal Philips *Lighting* di pasar, *compact fluorescent light* (CFL), merk *Earth Light*, harga \$15 dibandingkan 75 sen untuk lampu pijar (NN: 2010), produk tidak diminati pelanggan. Kemudian perusahaan kembali meluncurkan produk baru "*Marathon*", dengan semboyan 'hidup super panjang' dan janji akan menghemat \$26 pada biaya energi selama seumur hidup selama lima tahun (NN: 2010). Akhirnya, dengan label *Energy Star* EPA AS untuk menambah kredibilitas serta sensitivitas baru untuk meningkatnya biaya utilitas dan kekurangan listrik, penjualan naik 12 persen di pasar dinyatakan datar (Flower, 2002).

Layanan berbagi Mobil. Layanan berbagi mobil merupakan solusi jangka panjang untuk penghematan bahan bakar yang lebih baik, mengurangi kemacetan dan masalah parkir, agar memperoleh lingkungan yang lebih terbuka dan pengurangan gas rumah kaca. Masyarakat sudah sangat sadar tentang kelestarian lingkungan dengan mengorganisir *time sharing* seperti termasuk Zipcar (*East Coast*), I-GO Mobil (Chicago), dan Jam Mobil (*Twin Cities*) (NN, 2013).

Di Indonesia, selain kebijaksanaan *three in one* yang diterapkan untuk mengurangi pencemaran udara dan penghematan bahan bakar, ada komunitas, yang memiliki tujuan sama, dikenal dengan kelompok "nebenger", terutama pada masa mudik lebaran, melakukan layanan berbagi mobil.

Sektor Elektronik. Memberikan ruang untuk menggunakan pemasaran hijau untuk menarik

pelanggan baru. Salah satu contoh adalah janji Hewlett-Packard (HP) untuk mengurangi penggunaan energi global 20 persen pada tahun 2010 (NN, 2008). Untuk mencapai pengurangan ini, pada tahun 2005, Hewlett-Packard *Company* mengumumkan rencana untuk memberikan produk hemat energi, jasa dan lembaga energi untuk memberikan bimbingan tentang praktek operasi yang efisien tentang hemat energi di seluruh dunia.

Produk dan Jasa. Sekarang perusahaan menawarkan produk yang lebih ramah lingkungan sebagai alternatif bagi para pelanggan mereka. Produk daur ulang misalnya, adalah salah satu alternatif yang paling populer yang dapat bermanfaat bagi lingkungan, diantaranya penghutan yang berkelanjutan, udara bersih, efisiensi energi, konservasi air, dan kantor yang sehat. Salah satu contoh, adalah bisnis *E-commerce* dan peralatan kantor perusahaan *Shoplet* yang menawarkan alat web yang memungkinkan anda untuk mengganti barang serupa di keranjang belanja dengan produk ramah lingkungan.

Pengenalan CNG (Compressed Natural Gas) di Delhi. New Delhi, ibukota India, mengalami pencemaran yang sangat serius sehingga Mahkamah Agung India memaksa pelaku bisnis untuk melakukan perubahan ke bahan bakar alternatif. Pada tahun 2002, anjuran dikeluarkan untuk sepenuhnya mengadopsi CNG di semua sistem transportasi umum untuk mengekang polusi (NN, 2013).

Arah Pemasaran Hijau Saat Ini. Semua pihak, baik langsung atau tidak langsung, yang terlibat dalam kegiatan bisnis harus berhati-hati saat menetapkan tujuan dan kebijakan organisasi. Ini membantu untuk meningkatkan tren baru terhadap penghijauan suatu perusahaan. Sofia Ribeiro, seorang ahli pemasaran hijau dari *Green Corporate Climate Series* (GCCS) pendiri dan *co-pemilik* Kiwano Pemasaran, menjelaskan tren pemasaran hijau.

Dari karya penelitiannya pada *Expert Green Marketing Study* suatu studi tentang keahlian pada pemasaran hijau, menemukan beberapa temuan kunci sebagai berikut: atas pernyataan “Kebanyakan Pemasar Berniat Untuk Menghabiskan Lebih Lanjut Tentang Pemasaran Hijau”; diperoleh jawaban: lebih dari 80% dari responden menunjukkan bahwa mereka berharap untuk menghabiskan lebih banyak pada pemasaran hijau di masa depan. Di antara produsen, jumlah respon terlihat signifikan lebih tinggi. Setidaknya setengah, jika tidak lebih, dari responden lainnya berencana untuk terlibat dalam upaya pemasaran *online* di masa depan.

Atas pertanyaan “Pemasar Percaya Pemasaran Hijau Lebih Efektif; diperoleh jawaban: Tidak Kurang dari 28% dari pemasar sendiri berpikir pemasaran hijau lebih efektif daripada pesan pemasaran lainnya, dibandingkan dengan 6% dari pemasar yang berpikir bahwa pemasaran hijau itu kurang efektif.

Manajemen bahkan lebih optimis, dengan 46% dari mereka menunjukkan keyakinan bahwa pemasaran hijau lebih mujarab. Hanya 23% dari orang-orang dalam operasi berpikir bahwa pemasaran hijau lebih efektif (Choudhary, 2013).

Perusahaan Yang Menggerakkan Pemasaran Hijau Di Indonesia. Pelaksanaan *Green Marketing* di Indonesia telah diberlakukan pada beberapa perusahaan di Indonesia, antara lain: 1) *Go Green* ala BNI dengan meluncurkan KPR Griya Hijau BNI yaitu perumahan yang mengusung tema *green* dalam konsep pembangunannya; 2) *Go Green* ala Excelcomindo dengan menerapkan slogan *Go Green Go Paperless*, dimana para pelanggan Xplor (produk pasca bayar yang diluncurkan oleh Excelcomindo Pratama) tidak akan mendapatkan tagihan secara fisik, melainkan diubah ke dalam bentuk *e-bill* (yaitu melalui website resmi Excelcomindo atau dapat dikirim melalui email pelanggan). Namun

jika pelanggan menginginkan tagihan tersebut pelanggan bisa mendapatkannya dengan syarat pelanggan membayar Rp.10.000 setiap bulannya. Program ini dilakukan oleh Excelcomindo Pratama sebagai wujud partisipasi perusahaan yang sejak 29 Desember 2009 berganti nama menjadi PT. XL Axiata, Tbk., dalam menjaga kelestarian lingkungan seperti yang tertera pada surat edaran yang ditujukan oleh pelanggan Xplor yang berisi: "Pernahkan anda berhitung, berapa lembar kertas yang kita gunakan dalam sehari? dan tahukah anda, bahwa untuk menghasilkan 1 rim kertas HVS, dibutuhkan waktu selama 5 tahun untuk membesarkan sebuah pohon? Dalam rangka mendukung gerakan *GO GREEN GO PAPERLESS*, XL mengajak anda untuk ikut berpartisipasi menjadi kelestarian lingkungan, dengan mengurangi pemakaian kertas dengan cara mengalihkan tagihan fisik menjadi tagihan elektronik melalui e-mail dan website....." (<http://news.okezone.com/>); 3) *Carrefour* menerapkan Tas Hijau bagi pelanggannya. Pelanggan dapat menggunakan tas tersebut pada saat berbelanja, sehingga pelanggan tidak akan mendapatkan barang belanjanya dibungkus oleh plastik pada umumnya, dan pelanggan disarankan untuk membawanya kembali jika ingin berbelanja. Tas ini tidak diberikan secara gratis kepada pelanggan, tetapi pelanggan diminta untuk membeli dengan harga berkisar antara Rp.2000 sampai dengan Rp.10.000 per tas. Uniknya tas hijau tersebut dilengkapi oleh fasilitas garansi yang diberikan oleh pihak *carrefour*, dimana jika rusak maka pelanggan dapat menukarkan dengan tas yang masih layak pakai pada retail-retailnya; 4) Perusahaan elektronik pun tidak ingin ketinggalan salah satunya adalah PT. LG *Electronics* yang meluncurkan produk yang ramah lingkungan yaitu lemari pendingin *Big Ref* dan *Side-by-Side Flower Pattern*, serta mesin cuci *Front Loading Mega Pro*. Produk tersebut diperuntukan bagi pasar menengah atas. Tujuan dari peluncuran produk tersebut adalah sebagai upaya merespon keinginan pasar yang mengutamakan penghematan listrik dan air

namun tetap mengedepankan kemajuan teknologi dan tahan lama. Bahkan LG pun memperkenalkan kit tenaga surya *LG HFB-500 Bluetooth* yang merupakan *handphone* yang di-charge tidak hanya menggunakan listrik namun dapat menggunakan tenaga surya; 5) PT. Sampoerna. Selama tahun 2011 Sampoerna mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi, antara lain '2011 Indonesia *Customer Satisfaction Award (ICSA)*' oleh majalah SWA untuk produk *A-Mild* dan *Dji Sam Soe*, dan '*Green Proper Award*' (Penghargaan Lingkungan Hidup Nasional) oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dua penghargaan bergengsi ini cukup membuktikan bahwa Sampoerna berhasil menerapkan strategi mereka untuk mengarah ke *go green*.

Tanggung Jawab Sosial. Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, Sampoerna menjalankan tanggung jawab mereka dengan melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Kegiatan ini sebagai tolok ukur keberhasilan perusahaan dan peningkatan *value* perusahaan kepada masyarakat. Program CSR Sampoerna berfokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan penanganan bencana (Eva, 2012).

Program pengentasan kemiskinan. Sampoerna melalui berbagai pabriknya di beberapa daerah melakukan program pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk ikut menjalankan program pemerintah tentang pengentasan kemiskinan.

Wujud program tersebut diantaranya adalah Program Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna, mendirikan *UKM Center* di beberapa daerah, pemberdayaan petani melalui *System of Rice Intensification (SRI)*, membantu pengecer memperbaiki ruko atau tempat berjualannya melalui program *Sampoerna Retail Community (SRC)*, dan masih banyak lagi program lainnya yang telah mampu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

Pelestarian Lingkungan. Sampoerna ikut mendukung berbagai program untuk mengurangi penggundulan hutan dan memastikan keberlanjutan bahan baku seperti tembakau dan cengkeh. Program-program tersebut diantaranya penanaman 75.000 bibit pohon di Gunung Arjuno, 5.000 spesies pohon yang hampir punah di Bali, pemberian bantuan 1,2 juta bibit cengkih di beberapa daerah, mengadakan pelatihan *Good Agricultural Practice (GAP)* untuk petani tembakau di Jawa Barat, dan lain-lain.

Bidang Pendidikan. Sampoerna berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Beberapa programnya antara lain pemberian pelatihan kepada guru-guru di Pasuruan, Surabaya, dan Karawang, pendirian Taman Belajar Masyarakat (TBM) serta perpustakaan masyarakat di sekitar wilayah pabrik.

Penanggulangan Bencana. Sampoerna selalu berkontribusi dalam mendukung penanganan bencana yang ada di Indonesia. Seperti ketika gempa Aceh, Jogja, Sumatera, banjir bandang di Sumatera, dan lain-lain. Selain itu, Sampoerna juga memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang bertempat tinggal di sekitar pabrik demi tercapainya penduduk yang sehat.

III. Simpulan

Untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang, pemasaran harus sanggup menemukan solusi atas permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Temuan umum dari strategi pembangunan berkelanjutan adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan kebijaksanaan ekonomi dan ekologi dalam pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan agar dapat melestarikan kualitas pembangunan pertanian dan perlindungan lingkungan untuk saat ini dan generasi masa depan. Pengembangan efisien energi, pengendalian polusi yang lebih baik,

penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang, produk ekologis aman, kesemua itu adalah bagian dari pemasaran hijau, yang mengarah ke pembangunan berkelanjutan. Dengan cara ini, pemasaran hijau merupakan sarana menuju tujuan yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan strategi jangka panjang atas kebijakan yang membahas kemiskinan dan kelangkaan dan kesenjangan sumber daya; memberikan dorongan ekonomi, produksi dan mata pencaharian maupun model alternatif lain, dan bermaksud untuk melindungi pembangunan dan prospek pertumbuhan, serta dampak dari kerusakan lingkungan. Kunci pemasaran hijau yang sukses adalah kredibilitas. Jangan berlebihan dalam membahas isu lingkungan atau membangun harapan yang tidak realistis, namun terus mengembangkan komunikasi melalui sumber atau orang yang bisa dipercaya. Melihat tren terbaru pemasaran hijau dan manfaatnya bagi seluruh dunia, dapat dikatakan bahwa jika pembangunan berkelanjutan adalah saat yang diharapkan, maka pemasaran hijau adalah alat dan sarana untuk mencapai harapan, agar seluruh umat di dunia dapat menikmati manfaat yang dihasilkan pemasaran hijau.

Daftar Acuan

Choudhary, Aparna & Samir Gokarn. Green Marketing: A means For Sustainable Development, India. *Journal of Arts, Science & Commerce*. ISSN 2231-4172

Avoiding Green Marketing Myopia. 2010. *Journal*. Retrieved. 2010-12-07.

Belz F., Peattie K. 2009. *Sustainability Marketing: A Global Perspective*. John Wiley & Sons

Curtin, Emily (2006-09-14). Lower East Side Green Market. *Journal*. Retrieved January 2008.

Dodds, John (August 11, 2006). Green Marketing 101. *Journal*. Retrieved January 2008.

Dodds, John (May 21, 2007). Green Marketing 101. *Journal*. Retrieved January 2008.

Environmental Claims. 2008. Federal Trade Commission. 2008-11-17. *Journal*. Retrieved 2008-11-17.

'Green' Sales Pitch Isn't Moving Many Products. 2007. *Wall Street Journal*. March 6, 2007.

Green Trade & Development (.html). 2008. Green Markets International, Inc. *Journal*. Retrieved January 2008.

Grundey, D. and Zaharia, R.M. 2008. Sustainable incentives in marketing and strategic greening: the cases of Lithuania and Romania. *Baltic Journal on Sustainability*, 14(2), 130 –143.

Hanas, Jim (June 8, 2007). Environmental Awareness Has Not Only Tipped in the Media -- It's Hit Corporate Boardrooms as Well (PDF). *Advertising Age*.

Hawkins, Del I., Mathersbaugh David L, dan Best, Roger J. 2007. *Consumer Behaviour*. New York, USA: McGraw-Hill Irwin International Edition

Kartajaya, Hermawan. 2009. *New Wave Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kontan. (Bambang Rakhmanto. Januari 2012). *Bea Cukai Sumbang 21,6%25 Penerimaan Negara di 2010*. Diambil dari website Kontan: <http://kontan.co.id>.

Kotler, P. and Keller, K.L. 2006. *Marketing Management*. 12th. Edition. New Delhi: Pearson Prentice Hall.

Kotler, Philip and Lee Nancy. 2005. *Corporate Social Responsibility*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

Kotler, Philip. 2007. *Principles Of Marketing 13th Edition*. New Jersey: Prentice Hall.

Laporan Tahunan PT HM Sampoerna Tbk. Tahun 2011.

Levinson, Jay Conrad; Horowitz, Shel (2010). *Guerrilla Marketing Goes Green*. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-56458-5.

McDaniel, Stephen W.; David H. Rylander (1993). Strategic Green Marketing. *Journal of Consumer Marketing*. (MCB UP Ltd). 10 (3): 4-10. doi:10.1108/07363769310041929

Mendleson, Nicola; Michael Jay Polonsky (1995). Using strategic alliances to develop credible green marketing. *Journal of Consumer Marketing* (MCB UP Ltd) 12 (2): 4-18. doi:10.1108/07363769510084867.

Rogers, Everett (1995). New York: Free Press. ISBN 0029266718. G. Fowler (2002-03-06). Green Sales Pitch Isn't Moving Many Products. *Wall Street Journal*.

Shel Horowitz (June 14, 2013). Marcal Rebrand Let the World Know That It's Always Been Green. *Sustainable Brands*.

Suchard, H.T. and Polonski, M.J. (1991): *A theory of environmental buyer behavior and its validity: the environmental action-behaviour model*. in Gilly, M.C. et al. (Eds), *AMA Summer Educators' Conference Proceedings*, American Marketing Association, Chicago, IL, 2, 187-201.

SWA.(Eva Martha Rahayu. 2012). *Perusahaan yang Menerapkan Go Green Makin Diminati Investor*. Diambil dari website majalah SWA: <http://swa.co.id>.

Todd, Kaiser: *Eco-marketing: a blooming corporate strategy*, 2008.

U.S. Consumers Still Willing to Pay More for Green Products. *Journal*. Retrieved 27 March 2012.

Weinreich, Nedra. *What is Social Marketing?* Retrieved 2012-03-26.

Efektifitas Kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah untuk Kelangsungan Kesehatan Anak di Kota Depok

Irfan Purnawan, Muh. Kadarisman, Ismiyati¹

¹Dosen Teknik Kimia UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Tangerang Selatan 15419, Indonesia

¹e-mail: ismiyati.umj@gmail.com

Abstrak

Sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 18 Tahun 2008, masyarakat memiliki hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu, maka Pemerintah Kota Depok wajib menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat antara lain dengan pengelolaan sampah. Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis pengelolaan sampah untuk kelangsungan kesehatan anak di Kota Depok. Dengan metode deskriptif-kualitatif, penelitian berusaha menemukan fakta tentang efektifitas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis sampah untuk kelangsungan kesehatan anak, mengamati, menangkap realitas, menginterpretasi secara empirik tindakan fenomena kelompok dan individu. Penelitian menghasilkan: 1. Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok dilakukan melalui upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan, kebijaksanaan penataan, pemanfaatan pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan sampah domestik harus dikaitkan dengan upaya memelihara, mendayagunakan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 2. Dalam menjaga kelestarian lingkungan diperlukan rekonsiliasi semua pemangku kepentingan, melakukan assessmen, menentukan tujuan dan prioritas, menyusun *plan of action*, membagi tugas, memantau, mengevaluasi secara keberlanjutan. 3. Pertumbuhan penduduk di Kota Depok yang relatif cepat, berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup, tetapi lahan yang tersedia bersifat tetap sehingga menambah beban lingkungan hidup. Daya dukung alam semakin kurang seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup.

Abstract

Effectiveness of Environmental Policy Based Waste Management for Child's Health Surviving in Depok City

According to the “*Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 18 Tahun 2008*”, the community has the right to earn a good and healthy living environment. Then, the Depok City Government was obliged to create a good and healthy environment with waste management. The study aims to analyze the effectiveness of environmental policy based waste management for child health survival in Depok City. With descriptive-qualitative methods, the study seeks to find the evidence about the effectiveness of environmental management policy based waste management for child health survival, by observing, capturing reality, interpret empirical phenomena actions of groups and individuals. The result of study, included: 1 Environmental management in Depok done through an integrated effort to preserve environmental functions, planning policy, utilization of development, maintenance, restoration, monitoring, and control. Domestic waste management should be linked to efforts to preserve, utilize, and improve environmental quality, 2 In protecting the environment was necessary needed reconciliation of all stakeholders, assessment, goal setting and priorities, required the preparation of a plan of action, division of labor, monitoring, and evaluating the sustainability, 3 Population growth in Depok relatively fast, has implications for the availability of sufficient land to sustain the demands of well-being, but the available land is fixed so it makes the environmental burden. Natural carrying capacity became less balanced by the rate of subsistence demands.

Keywords: *environment, health, policy, waste management.*

I. Pendahuluan

Kajian formil terhadap Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dilakukan atas latar belakang pembentukan UU dan UU lain yang berkaitan dengan UU ini. UU ini secara vertikal berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memenuhi hak masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka Pemerintah Kota Depok memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakatnya. Salah satu dari pelaksanaan untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat itu adalah dengan melaksanakan pelayanan dalam pengelolaan sampah di masyarakat.

Dewasa ini masalah lingkungan hidup di Kota Depok telah berkembang sebagai isu lokal bahkan regional dan penting untuk diungkap fenomenanya. Berbagai tempat di wilayah Kota Depok semakin meningkatkan keperdulannya terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, yang merupakan perwujudan keprihatinan terhadap semakin merosotnya kondisi lingkungan di Kota Depok dan hal itu menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memperbaikinya. Masalah sampah muncul seiring pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tumbuh berkembangnya pembangunan di Kota Depok, atas prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan hidup, tertuang dalam Perda Kota Depok dengan memberikan penekanan tidak hanya manfaat ekonomi, lapangan kerja dan perolehan devisa, tetapi lebih menekankan pada dua aspek yang sangat mendasar yaitu peningkatan kelestarian lingkungan hidup, konservasi fisik, tata air tanah dan biota (flora dan fauna), serta peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan Daerah Kota Depok dimaksudkan untuk mewujudkan Visi Jangka Panjang yaitu “Depok Kota Niaga dan Jasa yang Religius dan Berwawasan Lingkungan”, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025. Mencermati atas penekanan seperti tersirat dalam Perda tersebut, sistem pengelolaan lingkungan hidup dikembangkan untuk memberikan panduan dasar agar kegiatan manusia senantiasa akrab dengan lingkungan. Kondisi lingkungan yang memburuk akibat kegiatan manusia (termasuk aktivitas membuang sampah), pada gilirannya akan merusak tempat hidup manusia khususnya bagi anak-anak sebagai generasi penerus dan sudah waktunya untuk dikendalikan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit.

Potensi bahaya kesehatan bagi anak-anak yang dapat ditimbulkan adalah diantaranya 1) Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (*haemorrhagic fever*) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai; 2) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit); 3) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah; dan sampah beracun.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi penyebab gangguan dan ketidakseimbangan lingkungan. Sampah padat yang menumpuk ataupun yang berserakan menimbulkan

kesan kotor dan kumuh, sehingga nilai estetika pemukiman dan kawasan di sekitar sampah terlihat sangat rendah. Bila di musim hujan, sampah padat dapat memicu banjir, dan di saat kemarau sampah akan mudah terbakar. Kebakaran sampah, selain menyebabkan pencemaran udara juga menjadi ancaman bagi pemukiman. Sampah (organik dan padat) yang membusuk umumnya mengeluarkan gas seperti metana (CH_4) dan karbon dioksida (CO_2) serta senyawa lainnya. Secara global, gas-gas ini merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas lingkungan (udara) karena mempunyai efek rumah kaca (*green house effect*) yang menyebabkan peningkatan suhu, dan menyebabkan hujan asam. Secara lokal, senyawa-senyawa ini, selain berbau tidak sedap/bau busuk, juga dapat mengganggu kesehatan manusia.

Sampah yang dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pun masih tetap berisiko, karena apabila TPA ditutup atau ditimbun terutama dengan bangunan akan mengakibatkan gas metan tidak dapat ke luar ke udara. Gas metan yang terkurung, lama kelamaan akan semakin banyak sehingga berpotensi menimbulkan ledakan. Hal seperti ini telah terjadi di sebuah TPA di Bandung, sehingga menimbulkan korban kematian. Proses pencucian sampah padat oleh air terutama oleh air hujan merupakan sumber timbulnya pencemaran air, baik air permukaan maupun air tanah. Akibatnya, berbagai sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (sumur) di daerah pemukiman telah terkontaminasi yang mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesehatan anak. Pencemaran air tidak hanya akibat proses pencucian sampah padat, tetapi pencemar terbesar justru berasal dari limbah cair yang masih mengandung zat-zat kimia dari berbagai jenis pabrik dan jenis industri lain.

Air yang tercemar tidak hanya air permukaan saja, tetapi juga air tanah; sehingga sangat mengganggu dan berbahaya bagi manusia khususnya anak-anak. Fisik sampah (sampah padat), baik yang masih

segar maupun yang sudah membusuk, yang terbawa masuk ke got/selokan dan sungai akan menghambat aliran air dan memperdangkal sungai. Pendangkalan mengakibatkan kapasitas sungai akan berkurang, sehingga air menjadi tergenang dan meluap menyebabkan banjir. Banjir tentunya akan mengakibatkan kerugian secara fisik dan mengancam kehidupan manusia (hanyut/tergenang air). Tetapi yang paling meresahkan adalah akibat lanjutan dari banjir yang selalu membawa penyakit khususnya bagi anak-anak yang merupakan pemilik masa depan bangsa (Gelbert, dkk, 1996) (Santoso, 2008). Sampah merupakan sumber penyakit, baik secara langsung, yaitu merupakan tempat berkembangnya berbagai parasit, bakteri dan pathogen, maupun tak langsung, yaitu merupakan sarang berbagai vektor (pembawa penyakit) seperti tikus, kecoa, lalat dan nyamuk. Sampah yang membusuk, maupun kaleng, botol, plastik, merupakan sarang patogen dan vektor penyakit.

Berbagai penyakit yang dapat muncul karena sampah yang tidak dikelola antara lain adalah diare, disentri, cacingan, malaria, kaki gajah (*elephantiasis*) dan demam berdarah, yang merupakan ancaman bagi manusia khususnya bagi anak-anak yang dapat menimbulkan kematian. Jadi, masalah sampah di Kota Depok masih menjadi masalah penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan juga masyarakat. Masih banyak sekali sampah yang beredar di sekitar kita yang bisa berdampak negatif seperti masalah banjir, kesehatan, dll. Dampak positifnya juga ada, seperti pengolahan sampah menjadi energi dimasa yang akan datang. Berikut beberapa penyebab banyaknya sampah yang berada di sekitar kita yaitu 1) Sangat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah itu sendiri; 2) Pengelolaan dan Pengolahan masih sangat kecil; dan 3) Budaya dari dalam diri kita sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, menjadikan bahasan tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup

dikaitkan dengan kesehatan anak-anak serta aktivitas pengelolaan sampah, adalah sesuatu yang sangat menarik dan penting untuk dikaji lebih dalam. Kajian tersebut adalah dalam bentuk penelitian dengan judul “Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Sampah Untuk Kelangsungan Kesehatan Anak Di Kota Depok”.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan desain kualitatif, karena dilakukan dengan memahami, mengamati dan menangkap realitas/fenomena empirik yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong, 2003). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena berusaha menemukan fakta tentang efektifitas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis sampah untuk kelangsungan kesehatan anak, dengan interpretasi yang tepat dan melukiskan secara akurat sifat dan tindakan dari fenomena kelompok maupun individu pada tataran empirik (Ishikawa, 1990).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena mengamati dan menangkap realitas dan mengkaji perilaku individu dan kelompok serta pengalaman informan sehari-hari (Bogdan dan Taylor, 1975: 45). Sejalan dengan pendapat tersebut, Ndraha (2003: 657) berpendapat sebagai berikut. “Pendekatan kualitatif adalah untuk instruspeksi, retrospeksi, menggambarkan sebagaimana adanya, mengalami dan menemukan *verstehen*, *uniqueness* sedalam-dalamnya, meneliti suatu gejala, mengamati kausalitas empirik, membentuk teori dari data”. Penekanan dari pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fokus dalam penelitian ini mengungkap proses dan menemukan makna tentang efektifitas kebijakan

pengelolaan lingkungan hidup berbasis sampah untuk kelangsungan kesehatan anak. Pengungkapan proses dan interpretasi makna dalam suatu penelitian, pendekatan kualitatif lebih relevan (Denzin dan Lincoln, 1994:27).

Dengan demikian pendekatan kualitatif di sini merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah lingkungan hidup, masalah sampah, dan masalah kesehatan anak-anak, berdasarkan penciptaan gambaran secara holistik yang dibentuk dengan kata-kata, dan melaporkan pandangan informan secara rinci. Selanjutnya, melalui teknik triangulasi, peneliti melakukan *crosscheck* data yang diperoleh dari informan satu dengan informan lainnya serta membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan berkaitan dengan efektifitas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis sampah untuk kelangsungan kesehatan anak. Keseluruhan data ini, diperoleh baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder. Sumber data utama penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, dokumen dan lain-lain.

Teknik Pemilihan Informan. Informan, merupakan sumber data primer yang sangat penting dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, menurut Creswell (2002: 29) bahwa cara dan syarat menentukan informan menjadi sangat menentukan dalam suatu penelitian guna menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dimaksud. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* atau pemilihan informan dilakukan dengan sengaja dengan kriteria tertentu sesuai dengan kapasitas dasar kompetensi yang dimiliki. Kerlinger (2000) mengemukakan sebagai berikut. “Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti adalah juga seorang instrumen penelitian. Teknik yang digunakan adalah partisipan *observation* yang dilengkapi dengan *indepth interview* dengan *key person* dan pembuatan catatan harian mengenai

peristiwa-peristiwa yang ditemui di lapangan”. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu 1. Sekretaris Daerah Kota Depok; 2. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok; 3. Wakil Kepala BLH; 4. Sekretaris BLH; 5. Kepala Dinas Kebersihan; 6. Wakil Kepala Dinas Kebersihan; 7. Sekretaris Dinas Kebersihan; 8. Kepala Dinas Kesehatan; 9. Wakil Kepala Dinas Kesehatan; dan 10. Sekretaris Dinas Kesehatan.

Teknik Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 1) Wawancara, yaitu pengumpulan informasi dengan tatap muka langsung antara peneliti dengan informan sebagai responden. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara mendalam (*In Depth Interview*) dengan Informan (*Key Informant*) menggunakan alat pedoman wawancara untuk mendapatkan data dan menggali informasi dari informan; 2) Observasi/pengamatan, pengambilan datanya bertumpu pada pengamatan langsung terhadap efektifitas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis sampah untuk kelangsungan kesehatan anak. 3) Dokumentasi, yaitu berupa laporan-laporan, buku-buku/literatur yang terkait dengan judul penelitian. Sebagai instrumen pendukung, peneliti mempergunakan *tape recorder*, peta, kamera, buku catatan, alat tulis dan buku agenda yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pengumpulan bahan dan data.

Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data. Selanjutnya analisa data dalam penelitian ini berdasarkan perspektif *emik* dan *etik*, guna menghasilkan gambaran yang mendalam (*thick description*) dan menemukan makna (*verstehen*). Dengan demikian, dalam pendekatan kualitatif maka pengolahan dan analisis data dilakukan untuk memahami dan menganalisis apa yang terdapat dibalik data tersebut agar lebih mudah pengolahannya, lebih bermakna dan dapat menemukan pola umum yang timbul atas data tersebut. Guna menetapkan keabsahan data (*trust*

worthiness), maka diperlukan teknik pemeriksaan data atas dasar kriteria tertentu. Dalam penelitian ini digunakan uji keabsahan dengan menggunakan triangulasi yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui perbandingan antara hasil kutipan wawancara antara *key informan* pendukung atau masyarakat yang terlibat langsung dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Tahap dan Prosedur Penelitian. Penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: tahap pra penelitian, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Prosedur dari setiap penelitian tersebut adalah sebagai berikut. a) tahap pra lapangan; kegiatan dalam tahapan pra lapangan ini terdiri dari (1) menyusun rancangan penelitian; (2) memilih dan menetapkan wilayah/tempat penelitian; (3) mengurus perizinan; (4) menjajagi dan menilai keadaan wilayah penelitian; (5) menyiapkan perlengkapan penelitian; (6) memilih dan memanfaatkan informan. b) tahap pekerjaan lapangan, yaitu (1) memahami latar penelitian dan persiapan diri; (2) memasuki wilayah penelitian untuk menghimpun dan mengumpulkan data; (3) berperan dalam kegiatan-kegiatan pada wilayah penelitian sambil mengumpulkan data.

Pada tahap ini, peneliti secara aktif melakukan pengamatan secara partisipatif di lapangan, yaitu melakukan pengamatan pada aktivitas pengelolaan lingkungan berbasis sampah terkait kelangsungan kesehatan anak. Bahkan peneliti berupaya terlibat langsung dalam proses kegiatan tersebut, agar makna penelitian lebih dirasakan. Selanjutnya, peneliti juga mengamati secara langsung lingkungan hidup masyarakat tempat pembuangan sementara (TPS) sampah yang tersebar di beberapa tempat terutama di masing-masing kecamatan di Kota Depok serta tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Cipayung Kota Depok; 4) melakukan pengolahan data, data yang telah dihimpun, diuji objektivitasnya, kesahihannya, kebenaran, dengan cara mengkonfirmasi dengan para narasumber

yang lainnya, kemudian membandingkan keterangan lisan dari instansi terkait, menguji hasil wawancara dengan hasil pengamatan di lapangan.

Jadi, data yang diperoleh, selanjutnya diolah sesuai kebutuhan melalui pengecekan silang antara yang diperoleh secara lisan dengan data tertulis dan diuji keabsahannya sesuai prinsip pemeriksaan keabsahan data dengan metode triangulasi, yakni triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi metodologi. c) Tahap analisis data, yang mencakup kegiatan, kategorisasi dan penafsiran/interpretasi data.

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini dikemukakan sebagian hasil penelitian, yaitu keseluruhan dimensi dan indikator dalam variabel I yaitu “Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Sampah”. Untuk variabel ke II yaitu “Kelangsungan Kesehatan Anak”, akan disiapkan naskahnya untuk dimuat dalam edisi jurnal berikutnya.

Variabel 1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Sampah, dimensinya meliputi **1) Upaya Terpadu**, indikatornya adalah (a) Usaha, dan akal yang disatukan. Terkait bahasan tentang indikator ini, dikemukakan penjelasan yang diberikan Informan I, II, dan III sebagai berikut. Pengelolaan lingkungan hidup di sini merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, kebijaksanaan penataan, pemanfaatan pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”. Berdasarkan pengertian pengelolaan lingkungan hidup yang telah diutarakan di atas, maka pengelolaan sampah domestik pun harus dikaitkan dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup (Mackhon, 2003). Artinya pengelolaan sampah hendaknya merupakan upaya dalam pendayagunaan, pengawasan, dan pengendalian

sampah, serta pemulihan lingkungan akibat pencemaran sampah.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pelayanan Pemerintah Daerah Kota Depok kepada masyarakatnya terkait mengatasi masalah lingkungan hidup pada hakekatnya identik dengan berbagai bentuk usaha dengan argumentasi atau penggunaan akal sehat guna menghasilkan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah baik kementerian terkait misalnya Kementerian Lingkungan Hidup yang benar-benar kompeten di bidangnya (Anderson, 1979) atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menangani substansi yang sama, dan juga instansi di daerah yang berwenang misalnya Badan Lingkungan Hidup Kota Depok. Manifestasi dari berbagai bentuk usaha dan upaya penggunaan pikiran atau akal yang melahirkan suatu kebijakan itulah yang selanjutnya akan dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat.

Dari hasil observasi dapat dikemukakan bahwa satu kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok dalam kenyataannya tidak banyak menerima penolakan, dan sebaliknya, manakala formulasi kebijakan yang dirumuskan tidak merepresentasikan kebutuhan (rakyat banyak) di Kota Depok serta kurang merespon pengguna manfaat (*stakeholders*), jelas mendapat respon negatif dari rakyat selaku pihak yang harus menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Suharto, 2005) (Parsons, 2006). Bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok terkait masalah lingkungan hidup tersebut, tentu berhubungan dengan problematika kehidupan masyarakat setempat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh terkait hal ini adalah penanganan terhadap persoalan sampah baik organik maupun anorganik di Kota Depok.

(b) Keterbatasan lahan pembuangan akhir sampah di Kota Depok, dapat menyebabkan persoalan baru bagi lingkungan setempat. Peningkatan sampah

yang terjadi tiap tahun harus dikelola dengan cara baru dan terpadu untuk mengurangi timbunan sampah yang dapat memperpendek umur pakai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem lama tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu sudah saatnya diganti dengan sistem baru. (c) Ikhtiar yang disatukan untuk mencapai maksud, dan memecahkan persoalan, serta mencari jalan keluar.

Dalam membahas indikator tentang “Ikhtiar yang disatukan untuk mencapai maksud, dan memecahkan persoalan, serta mencari jalan keluar ini”, Informan II, IV, dan V menjelaskan sebagai berikut. “Bahwa pengelolaan sampah yang ada di Kota Depok saat ini masih bertumpu pada pola lama, yaitu sampah dikumpulkan dari sumbernya, diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir). Sampah yang dihasilkan bila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu keindahan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi, aktivitas penanganan sampah tersebut adalah bermaksud memecahkan persoalan serta mencari solusi yang terbaik.

Misalnya, konsep pengolahan sampah secara terpadu berbasis 3R dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah dengan pendekatan melalui aspek hukum (peraturan), aspek organisasi (kelembagaan), aspek teknis operasional, aspek pembiayaan (retribusi), serta aspek peran aktif masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan meningkatnya laju pembangunan di Kota Depok, penambahan penduduk, serta aktivitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat Kota Depok telah memicu terjadinya peningkatan jumlah timbunan sampah. Hasil observasi menunjukkan bahwa hal ini menjadi semakin berat dengan hanya dijalkannya paradigma lama pengelolaan yang

mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, yang kesemuanya membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu, yang bila tidak tersedia akan menimbulkan banyak masalah operasional seperti sampah yang tidak terangkut, fasilitas yang tidak memenuhi syarat, cara pengoperasian fasilitas yang tidak mengikuti ketentuan teknis, dan semakin habisnya lahan pembuangan.

Dijelaskan bahwa daerah-daerah lain dalam pengelolaan sampahnya pada umumnya dilakukan menggunakan sistem *open dumping* (penimbunan secara terbuka) serta tidak memenuhi standar yang memadai. Keterbatasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di kota besar dan metropolitan juga berpotensi menimbulkan persoalan baru. Daerah pinggiran kota masih dianggap sebagai tempat paling mudah untuk membuang sampah. Begitu pula yang terjadi di Kota Depok. Dengan 44 unit hanggar Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang telah dibangun Pemerintah Kota Depok, dengan menggunakan dana APBD hingga miliaran rupiah nampaknya belum dapat beroperasi secara maksimal dalam menangani permasalahan sampah di kota sejuta belimbing ini. Tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayang menunjukkan bahwa peran dan fungsi dari UPS belum berjalan maksimal.

(d) Daya upaya yang disatukan. Berkaitan dengan bahasan tentang indikator “daya upaya yang disatukan” ini, dikemukakan penjelasan yang diberikan Informan I, II, dan III sebagai berikut. Bahwa Pemerintah Kota Depok kini tengah berbenah diri dengan segala daya upaya yang dipersatukan dalam suatu kebijakan penanggulangan masalah lingkungan di antaranya adalah penanganan masalah sampah tersebut. Yang terjadi kini bahwa wilayah Kota Depok tersebut kehilangan peluang untuk memberdayakan sampah, memanfaatkannya serta meningkatkan kualitas lingkungannya. Apabila hal ini tidak

tertangani dan dikelola dengan baik, peningkatan sampah yang terjadi tiap tahun itu bisa memperpendek umur TPA dan membawa dampak pada pencemaran lingkungan, baik air, tanah, maupun udara. Di samping itu, sampah berpotensi menurunkan kualitas sumber daya alam, menyebabkan banjir dan konflik sosial, serta menimbulkan berbagai macam penyakit.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penanganan sampah di Kota Depok tersebut harus segera ditanggulangi. Apabila ditangani secara serius, maka sampah bukan lagi musuh tapi sahabat, karena bisa didaur ulang, dan dapat menghasilkan peningkatan ekonomi. Pengelolaan sampah berbasis 3R yang saat ini merupakan konsensus internasional yaitu *reduce, reuse, recycle* atau 3M (Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur Ulang) merupakan pendekatan sistem yang patut dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan. Begitu pula di dalam Undang-undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan, bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah dikemudian hari, perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan konsep pengolahan sampah secara terpadu berbasis 3R tersebut.

Pengelolaan sampah terpadu dengan konsep 3R diharapkan dapat memenuhi konsep pengelolaan sampah menuju *zero waste*. Hasil observasi menunjukkan bahwa konsep 3R yang berprinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah dapat mereduksi timbunan sampah, sehingga dengan diterapkannya sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R diharapkan dapat menciptakan kondisi kebersihan, keindahan, dan kondisi kesehatan masyarakat, yang akhirnya berpengaruh pada perkembangan fisik Kota Depok.

2) Pelestarian Fungsi, Indikatornya adalah (a) Perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan dari pemanfaatan serta pengawetan dari kemusnahan dan kerusakan. Hal yang perlu dielaborasi terhadap indikator ini, Informan V, VI, dan VII menjelaskan sebagai berikut. Dalam rangka perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan dari pemanfaatan suatu hal misalnya terkait pengelolaan sampah di Kota Depok yang sehat dan sejahtera serta tetap menjaga kelestarian lingkungan (Pembangunan berwawasan lingkungan/*green city*), antara lain diperlukan langkah-langkah yaitu rekonsiliasi semua pemangku kepentingan, melakukan asesmen, menentukan tujuan dan prioritas, menyusun *Plan of Action*, membagi tugas, melaksanakan dan memantau bersama serta mengevaluasi dan keberlanjutan bersama. Pembangunan berwawasan lingkungan di Kota Depok adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya sehingga terdapat pelestarian fungsi lahan dll.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Depok yang relatif cepat, berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bisa bertambah, sehingga menambah beban lingkungan hidup. Daya dukung alam di Kota Depok ternyata semakin kurang seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduknya. Atas dasar inilah, eksploitasi sistematis terhadap lingkungan di Kota Depok secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih. Sementara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya diharapkan dapat memberi kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Kota Depok, ternyata juga harus dibayar mahal, karena dampaknya tidak hanya positif tetapi juga negatif terhadap kelestarian lingkungan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pertumbuhan industri dalam skala besar, sedang dan kecil/rumah tangga, sebagai hasil rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi di Kota Depok terus diupayakan untuk pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakatnya. Dengan demikian, sudah saatnya bahwa perencanaan pembangunan Kota Depok harus mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tersebut, perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur dan pola ruang. Untuk lingkup Kota Depok, bahwa pembentukan struktur ruang dilakukan dengan menetapkan hirarki bagi penyediaan ruang publik. Pada skala perkotaan dilayani oleh ruang publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota, yang meliputi taman kota pada skala metropolitan sampai dengan kota. Pada tingkat lingkungan permukiman (RT/RW) dilayani oleh ruang terbuka, berupa lapangan bermain anak dan taman lingkungan.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa akhir-akhir ini permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di kota-kota semakin rumit, terutama yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, oleh karenanya diperlukan pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan meningkatnya populasi manusia, pencemaran air permukaan, dan air tanah cenderung meningkat terutama yang diakibatkan oleh aktivitas pabrik/perusahaan yang ada, sehingga akan mengganggu kesehatan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian diperlukan suatu perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan dari pemanfaatan oleh aktivitas manusia serta pelestarian dari kemusnahan dan kerusakan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, dan sekaligus mengusahakan pemerataan yang adil. Jadi, pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga pilar yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial". Dengan demikian pembangunan berkelanjutan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan

sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi muda yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

(b) Kurangnya konservasi dari kemusnahan dan kerusakan. Informan I, II, VII, VIII, IX mengutarakan bahwa sampah pada umumnya merupakan masalah pelik yang tengah diperbincangkan dan gencar diatasi oleh pemerintah maupun masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Begitu pula di Kota Depok, masalah sampah juga berdampak sangat besar dan signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang akan terlihat setelah kesalahan dalam bagaimana menangani sampah tersebut. Dengan demikian, pentingnya konservasi dalam pengelolaan sampah tersebut dari kemusnahan dan kerusakan lingkungan yang ada. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.

Hasil observasi tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dapat dikatakan bahwa sampah adalah barang buangan, disamping dapat bermanfaat namun juga dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat karena dapat menimbulkan perasaan menjijikan dan merusak pandangan mata serta pencemaran terhadap lingkungan sehingga dapat menimbulkan kerusakan. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa keindahan lingkungan akan hilang, timbulnya dampak penyakit serta dapat mengganggu kenyamanan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup di sekitarnya adalah pengaruh negatif dari sampah.

3) Sisa Kegiatan Seharian Manusia atau Proses Alam, Indikatornya adalah (a) Sesuatu yang tertinggal sesudah dimakan/diambil. Atas indikator "Apa yang tertinggal sesudah

dimakan/diambil” tersebut, Informan VII, VIII, dan IX serta X mendeskripsikan bahwa spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang di Indonesia adalah antara 2,75 – 3,25 lt/org/hari. Dari observasi tentang pengelolaan sampah di Kota Depok (data tahun 2007), diasumsikan produksi sampah per hari per orang 2,65 liter (skala kota), dengan dasar timbulan tersebut (liter/orang/hari), maka pada tahun 2006, timbunan sampah total dengan jumlah penduduk Kota Depok adalah 1.420.480 jiwa diperkirakan rata-rata 3.764 m³/hari. Berdasarkan besarnya timbulan sampah tersebut di atas, jumlah timbulan sampah yang dihasilkan 3.764 m³/hari, sedangkan sampah yang terangkut 1281 m³/hari atau ekuivalen dengan jumlah penduduk 483.396 jiwa. Dengan demikian, sampah yang tidak terangkut 2.483 m³/hari. Tingkat pelayanan persampahan untuk Kota Depok hanya $483.396/1.420.480 = 34.03\%$.

Lebih lanjut dijelaskan di sini bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan sampah dan kebersihan hingga optimal, Pemerintah Kota Depok menerapkan strategi dan program yang dinilai tepat, sebagai berikut:

1) Strategi dan Program Peningkatan Kebersihan 2009. Sesuai dengan visi untuk mewujudkan Kota Depok yang bersih dan hijau, DKP merumuskan strategi peningkatan kebersihan 2009, yaitu (a) Penerapan paradigma baru pengelolaan sampah, yaitu mengurangi (*Reduce*), menggunakan kembali (*Reuse*), mendaur ulang (*Recycle*), melibatkan masyarakat (*Participation*); (b) Optimalisasi pengelolaan sampah di setiap kelurahan dengan membangun Unit Pengolah Sampah (UPS); (c) Mengurangi timbunan sampah di TPA dengan mengolahnya di TPS. (d) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan komposting rumah tangga. (e) Menyusun dan memberlakukan Perda tentang Pengelolaan Kebersihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk menjalankan strategi peningkatan kebersihan 2009 tersebut, DKP menyusun program-program a) Menerapkan paradigma baru pengelolaan sampah, yaitu mengurangi (*Reduce*), menggunakan kembali (*Reuse*), mendaur ulang (*Recycle*), melibatkan masyarakat (*Participation*); b) Mengoptimalkan pengelolaan sampah di UPS di tiap kelurahan; c) Mengoptimalkan fungsi dan manfaat TPA dan IPLT; d) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan melakukan Gerakan 3 K pada setiap hari libur; e) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan menerapkan penegakan hukum atau perda, terutama Perda Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum; f) Melakukan penambahan sarana dan prasarana; g) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kompetensi cukup; h) Melaksanakan remaining sampah lama menjadi kompos di TPA; i) Optimalisasi pengelolaan sampah di setiap kelurahan dengan membangun Unit Pengolah Sampah (UPS); j) Mengurangi timbunan sampah di TPA dengan mengolahnya di TPS; k) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan komposting rumah tangga;

2) Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat) Unit Pengolah Sampah (UPS). Dalam kaitan ini, dapat dikemukakan hasil observasi bahwa Pemerintah Kota Depok telah memiliki program unggulan dalam melakukan pengelolaan sampah, yaitu penerapan Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipesat)/Unit Pengolah Sampah (UPS) yang dicanangkan pada tahun 2006. UPS merupakan implementasi dari sebuah cara pandang bahwa masalah dapat diubah menjadi potensi. Dengan masuknya unsur teknologi, sumber daya manusia, sistem, hukum, sosial dan dana dalam UPS, maka sampah tidak lagi ditempatkan sebagai sumber masalah tetapi sebaliknya dipandang sebagai sumberdaya yang dapat diolah dan dikelola untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,

yaitu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan produk yang berpotensi menghasilkan uang. Pengolahan dan pengelolaan sampah di Kota Depok tersebut merupakan implementasi dari prinsip-prinsip 4R-P yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (mendaur ulang), *replace* (mengganti), *participation* (pelibatan masyarakat) dan mengolah untuk dijadikan bahan yang lebih bermanfaat seperti kompos, briket dan energi listrik.

(b) Runtunan perubahan/ peristiwa dalam perkembangan lingkungan kehidupan. Hal yang perlu dielaborasi terhadap indikator ini, Informan I, III, V, VII, dan IX menjelaskan sebagai berikut. Bahwa untuk menunjang perkembangan lingkungan kehidupan melalui pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), saat ini mulai dikembangkan penggunaan pupuk organik yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang harganya kian melambung. Penggunaan kompos telah terbukti mampu mempertahankan kualitas unsur hara tanah, meningkatkan waktu retensi air dalam tanah, serta mampu memelihara mikroorganisme alami tanah yang ikut berperan dalam proses adsorpsi humus oleh tanaman.

Penggunaan kompos sebagai produk pengolahan sampah organik juga harus diikuti dengan kebijakan dan strategi yang mendukung. Pemberian insentif bagi para petani yang hendak mengaplikasikan pertanian organik dengan menggunakan pupuk kompos, akan mendorong petani lainnya untuk menjalankan sistem pertanian organik. Kelangkaan dan makin membunganya harga pupuk kimia saat ini, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan sistem pertanian organik. Hasil observasi dapat ditunjukkan bahwa dari perkembangan kehidupan masyarakat, penanganan masalah sampah tidak dapat semata-mata ditangani oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi,

Kabupaten/Kota). Pada tingkat perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini memerlukan pergeseran pendekatan ke pendekatan sumber dan perubahan paradigma yang pada gilirannya memerlukan adanya campur tangan dari Pemerintah.

Pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan. Berangkat dari pengertian pengelolaan sampah dapat disimpulkan adanya dua aspek, yaitu penetapan kebijakan (*beleid, policy*) pengelolaan sampah, dan pelaksanaan pengelolaan sampah. Kebijakan pengelolaan sampah harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat karena mempunyai cakupan nasional. Kebijakan pengelolaan sampah ini meliputi: 1) Penetapan instrumen kebijakan. (a) Instrumen regulasi: penetapan aturan kebijakan (*beleidregels*), undang-undang dan hukum yang jelas tentang sampah dan perusakan lingkungan; (b) Instrumen ekonomik: penetapan instrumen ekonomi untuk mengurangi beban penanganan akhir sampah (sistem insentif dan disinsentif) dan pemberlakuan pajak bagi perusahaan yang menghasilkan sampah, serta melakukan uji dampak lingkungan. 2) Mendorong pengembangan upaya mengurangi (*reduce*), memakai kembali (*reuse*), dan mendaur-ulang (*recycling*) sampah, dan mengganti (*replace*); 3) Pengembangan produk dan kemasan ramah lingkungan; 4) Pengembangan teknologi, standar dan prosedur penanganan sampah, a) Penetapan kriteria dan standar minimal penentuan lokasi penanganan akhir sampah; b) Penetapan lokasi pengolahan akhir sampah; c) Luas minimal lahan untuk lokasi pengolahan akhir sampah; d) Penetapan lahan penyangga.

Cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan, walaupun kadang harus dihadapkan

pada mitos tertentu. Peraturan yang tegas dari pemerintah juga sangat diharapkan karena jika tidak, maka para perusak lingkungan akan terus merusak sumber daya. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidupnya sangat rendah, ini berkaitan dengan pemahaman tentang agama serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada negara maju, kepedulian atas kebersihan lingkungan sangat tinggi. Keberadaan Undang-Undang persampahan dirasa sangat diperlukan. Undang-Undang ini mengatur hak, kewajiban, wewenang, fungsi dan sanksi masing-masing pihak.

Undang-Undang juga mengatur soal kelembagaan yang terlibat dalam penanganan sampah. Tidak mungkin konsep pengelolaan sampah berjalan baik di lapangan, jika secara infrastruktur tidak didukung oleh Kementerian-Kementerian yang ada dalam pemerintahan. Demikian pula pengembangan sumber daya manusia (SDM), yaitu mengubah budaya masyarakat soal sampah bukan hal gampang. Tanpa ada transformasi pengetahuan, pemahaman, kampanye yang kencang. Ini tak bisa dilakukan oleh pejabat setingkat Kepala Dinas seperti terjadi sekarang. Itu harus melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan mungkin Kementerian Komunikasi dan Informasi. Di beberapa negara, seperti Filipina, Kanada, Amerika Serikat, dan Singapura yang mengalami persoalan serupa dengan Indonesia, sedikitnya 14 departemen dilibatkan di bawah koordinasi langsung presiden atau perdana menteri. Sebagai contoh kegagalan proyek *incinerator* (pembakaran sampah) yang dibangun DKI, yang ternyata tidak efisien, malahan mengakibatkan pencemaran dan akhirnya ditelantarkan begitu saja karena tidak sesuai dengan karakteristik sampah Jakarta. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam usaha mengatasi masalah sampah yang saat ini mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat adalah pemberian pajak lingkungan yang dikenakan pada setiap produk industri yang akhirnya akan menjadi sampah. Industri yang

menghasilkan produk dengan kemasan, tentu akan memberikan sampah berupa kemasan setelah dikonsumsi oleh konsumen. Industri diwajibkan membayar biaya pengolahan sampah untuk setiap produk yang dihasilkan, untuk penanganan sampah dari produk tersebut. Dana yang terhimpun harus dibayarkan pada pemerintah selaku pengelola IPS untuk mengolah sampah kemasan yang dihasilkan.

Pajak lingkungan ini dikenal sebagai *Polluters Pay Principle*. Solusi yang diterapkan dalam hal sistem penanganan sampah sangat memerlukan dukungan dan komitmen pemerintah. Tanpa kedua hal tersebut, sistem penanganan sampah tidak akan lagi berkesinambungan. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak terdapat benturan, di satu sisi, pemerintah memiliki keterbatasan pembiayaan dalam sistem penanganan sampah. Namun di sisi lain, masyarakat akan membayar biaya sosial yang tinggi akibat rendahnya kinerja sistem penanganan sampah. Sebagai contoh, akibat tidak tertanganinya sampah selama beberapa hari di Kota Bandung, tentu dapat dihitung berapa besar biaya pengelolaan lingkungan yang harus dikeluarkan akibat pencemaran udara (akibat bau) dan air lindi, berapa besar biaya pengobatan masyarakat karena penyakit bawaan sampah (*municipal solid waste borne disease*), hingga menurunnya tingkat produktifitas masyarakat akibat gangguan bau sampah.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan subsidi investasi dalam hal Industri Pengolahan Sampah (IPS) dan juga sebagian subsidi biaya pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan IPS. Sebagian investasi infrastruktur dibiayai oleh pemerintah, sementara biaya pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan diserahkan pada masyarakat. Bagi suatu kebutuhan sarana dasar, seperti air minum, biaya investasi disediakan oleh pemerintah, namun biaya pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan dibebankan pada masyarakat selaku konsumen. Hal ini dikarenakan

peran air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*).

(c) Rangkaian tindakan/pembuatan, pengolahan yang menghasilkan produk yang bukan buatan orang. Hal yang perlu dielaborasi terhadap indikator ini, Informan IV, VI, dan VIII menjelaskan sebagai berikut. Permasalahan sampah, merupakan salah satu persoalan yang masih melilit Pemerintah Kota Depok. Banyak sungai-sungai kecil yang berubah warna jadi tempat pembuangan air limbah. Dalam dunia pendidikan, kepada anak didiknya guru selalu menganjurkan untuk tampil bersih. "Bersih itu pangkal kesehatan," demikian pesan mereka. Juga dianjurkan agar murid membuang sampah pada tempatnya, yang tentu berkaitan dengan aspek kebersihan. Tetapi, apakah anjuran guru tersebut melekat pada diri seorang anak didik. Apakah anak didik yang kemudian beranjak dewasa, bahkan menjadi kepala keluarga peduli dengan arti pentingnya pesan tersebut. Ini tentu tidak lepas dari kultur lingkungan keluarga. Bagaimana kebersihan di lingkungan keluarga kita kondisikan. Sudahkah kita memiliki budaya yang adaptif dengan lingkungan, dan sudahkah kita mengelola sampah dengan baik.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa jawaban pertanyaan tadi penting artinya bila dikaitkan dengan kondisi lingkungan kita yang semakin terancam dengan kerusakan. Setelah di pedalaman hutan dibabat habis, gundul dan rawan banjir serta tanah longsor. Di kota pun seolah tidak mau ketinggalan, hujan sedikit saja dapat menimbulkan genangan air di jalanan. Sebab, sejumlah got saluran air tersumbat oleh sampah non-organik, yaitu plastik bekas kemasan aneka minuman dan makanan yang dibuang sembarangan. Sementara kecenderungan kita sebagai masyarakat kota di Jakarta ini seolah tidak ramah lagi melihat permukaan tanah. Halaman rumah nyaris diplester habis, tidak menyisakan permukaan tanah untuk resapan air.

Hasil observasi menunjukkan bahwa selayaknya kita berterima kasih pada saudara kita yang nasibnya kurang beruntung yaitu para Pemulung. Menjadi pemulung, memilah-milah sampah di TPA (Tempat Pembuangan (sampah) Akhir), sehingga problem sampah non-organik sedikit tertolong. Bayangkan, seandainya para pemulung tidak ada, sampah plastik bekas kemasan aneka makanan dan minuman era kini menyumbat sejumlah got. Sistem drainase perkotaan tidak berfungsi. Hujan sedikit sekalipun bisa saja menimbulkan banjir, minimal genangan air yang potensial bagi pembiakan wabah penyakit, seperti nyamuk malaria serta berjangkitnya penyakit demam berdarah.

4) Bentuk Padat atau Semi Padat, Indikatornya adalah **a) Rupa/wujud yang ditampilkan tetap bentuknya (bukan barang cair/gas)**. Terkait indikator ini, hal yang perlu dielaborasi menurut Informan V, VI, dan VII adalah sebagai berikut. Limbah padat/ semi padat sampah (*waste*) adalah berbagai proses dan aktivitas manusia yang tidak berguna dan tidak disukai yang kemudian dibuang dan selanjutnya dibuang lagi. Dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dinyatakan bahwa sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah perkotaan adalah limbah yang bersifat padat dan terdiri dari bahan organik maupun anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan yang timbul di kota (Gelbert, dkk, 1996).

Dijelaskan bahwa jenis-jenis sampah adalah (1) Sampah organik seperti sayuran, kulit buah lunak; (2) Sampah anorganik seperti gelas, plastik; (3) B3 (bahan berbahaya beracun) seperti baterai, bola lampu, potongan organ tubuh, reaktor nuklir, dll.

Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat karakteristik atas sampah tersebut yaitu (1)

Rubbish adalah sampah yang mudah atau susah terbakar berasal dari rumah tangga, pusat perdagangan, dan kantor. (2) *Ashes* (abu) merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar baik di rumah, di kantor, maupun industri. (3) *Street sweeping* (sampah jalanan) merupakan sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran, daun-daun, dll. (4) *Household refuse* (sampah pemukiman) yaitu sampah campuran yang terdiri dari *rubbish*, *garbage*, *ashes* yang berasal dari daerah pemukiman. (5) Sampah khusus adalah sampah yang memerlukan penanganan khusus dalam pengelolannya. Misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif, dan toksis.

Selanjutnya, terkait bagaimana teknik pengelolaan sampah tersebut. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan yang meliputi dasar-dasar perencanaan untuk daerah pelayanan dan teknik operasional mulai dari pewadahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah serta pembuangan akhir sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007). Dikemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah perkotaan, yaitu sebagai berikut (1) Kepadatan dan penyebaran penduduk; (2) Karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi; (3) Timbulan dan karakteristik sampah; (4) Budaya sikap dan perilaku masyarakat; (5) Jarak dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir sampah; (6) Rencana tata ruang dan pengembangan kota; (7) Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah; (8) Biaya yang tersedia; (9) Peraturan daerah setempat.

Diagram Teknik Operasional Pengelolaan Sampah sesuai dengan SNI 19-2454-2002 yaitu pada diagram tersebut dijelaskan bahwa timbunan

sampah yang akan dilakukan suatu pemilahan, pewadahan dan pengolahan di sumber, yang kemudian dikumpulkan dan diangkut ke pembuangan akhir. Teknik operasional terdiri dari berbagai cara yaitu sebagai berikut 1) Timbunan sampah, banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita per hari atau per luas bangunan, atau perpanjang jalan. 2) Pewadahan sampah merupakan aktivitas menampung sampah sementara, yaitu (a) Individual, bahwa di setiap sumber timbulan sampah terdapat tempat sampah. Misalnya di depan setiap rumah dan pertokoan; (b) Komunal, merupakan suatu timbulan sampah dikumpulkan pada suatu tempat sebelum sampah tersebut diangkut ke TPA.

Kriteria lokasi pada wadah individual diletakkan dihalaman muka atau dibelakang untuk sumber dari hotel atau restoran sedangkan pada wadah komunal diletakkan sedekat mungkin dengan sumber sampah dan tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya.

Kegiatan berikutnya adalah pengumpulan sampah, yaitu sebagai berikut 1) Pengumpulan sampah dimulai di tempat sumber dimana sampah tersebut dihasilkan, yaitu (a) Pola individual langsung, (b) Pola individual tidak langsung, (c) Pola komunal langsung, (d) Pola komunal tidak langsung, (e) Pola penyapuan jalan (SNI 19-2454-2002).

Kegiatan selanjutnya adalah pemindahan sampah. Penampungan sampah yaitu penampungan sementara sampah sebelum diangkut oleh truk. Sarana yang digunakan dapat berupa sebuah area pemindahan, atau sebuah wadah besar yang peletakkannya terpusat atau tersebar. Berdasarkan tipe, lokasi pemindahan terdiri dari:

1) Terpusat (transfer depo tipe I), fungsi: pada proses pemindahan, penyimpanan alat perawatan ringan, proses pengendalian (desentralisasi). Contoh: TPA dikarenakan cuma ada 1 sampah jadi terpusat pada TPA tersebut

2) Tersebar (transfer depo II dan III), fungsi: pada proses pemindahan dan penyimpanan alat. Contoh TPS namun tujuan akhirnya tetap ke TPA karena banyaknya sampah jadi melalui TPS dahulu. Jarak antara transfer depo untuk depo I dan II (1-1, 5km)

Kegiatan berikut adalah pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah dari lokasi pemindahan ke tempat daur ulang atau ke tempat pengolahan atau ke tempat pemrosesan akhir, yaitu 1) Sistem pengumpulan individual langsung (*door to door*); 2) Sistem pemindahan di transfer depo *type I* dan *type II*; 3) Sistem kontainer tetap biasanya untuk kontainer kecil.

Kegiatan selanjutnya adalah pengolahan sampah, bertujuan untuk memproses sampah agar 1) Pengomposan; 2) Insinerasi yang berwawasan lingkungan; 3) Daur ulang; 4) Pengurangan volume sampah dengan pencacahan/pemadatan; 5) Biogasifikasi (pemanfaatan energi hasil pengolahan sampah)

Teknik pengolahan digunakan dalam sistem pengolahan sampah untuk meningkatkan efisiensi operasional, antara lain 1) Reduksi volume secara mekanik (pemadatan); 2) Reduksi volume secara kimiawi (pembakaran); 3) Reduksi ukuran secara mekanik (cincang); 4) Pemisahan komponen (manual dan mekanik).

Kegiatan berikut adalah pembuangan akhir. Sesuai dengan SNI 03 3241 1994 mengenai Tata Cara Pemilihan lokasi TPA, terdapat dua metode pembuangan sampah 1) Metode yang tidak memuaskan, yaitu (a) Pembuangan sampah yang terbuka (*open dumping*) ex, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, di jalan tanah, dll; (b) Pembuangan sampah dalam air (*dumping in water*); (c) Pembakaran sampah di rumah-rumah (*burning on premises*). 2) Metode yang memuaskan, yaitu (a) Pembuangan sampah dengan system kompos (*composting*), pembakaran sampah melalui *incinerator*, pembuangan sampah dengan

maksud menutup tanah secara sanitair (*sanitary landfill*).

Terdapat jenis, sumber dan pengelolaan sampah perkotaan menurut UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Setiap orang berhak dan berkewajiban dalam pengelolaan sampah. Dalam pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Masyarakat juga dinyatakan berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.

- 1) Sampah rumah tangga: sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- 2) Sampah sejenis rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- 3) Sampah spesifik:
 - a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3)
 - b) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c) Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d) Puing bongkaran bangunan;
 - e) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f) Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Upaya pengurangan sampah dalam pasal 20 UU No.18 tahun 2008, kegiatan pengurangan sampah meliputi 1) Pembatasan timbulan sampah; 2) Pendaauran ulang sampah; dan/atau 3) Pemanfaatan kembali sampah.

Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengurangan sampah yaitu 1) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; 2) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; 3) Memfasilitasi penerapan label

produk yang ramah lingkungan; 4) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan 5) Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Diharapkan pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b) Rupa/wujud yang ditampilkan setengah padat bentuknya (setengah barang cair/gas). Atas indikator “Rupa/wujud yang ditampilkan setengah padat bentuknya (setengah barang cair/gas)” tersebut, Informan I, II, VIII, dan IX mendeskripsikan bahwa sampah, adalah merupakan limbah yang terdiri dari limbah cair dan limbah padat (kertas, logam, sayuran, dan lain-lain) yang antara lain berasal dari kegiatan rumah tangga, industri, pabrik, perkantoran, dan pariwisata. Sampah di sini merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sementara di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sampah, merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume serta jenis sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang digunakan sehari-hari. Berangkat dari pandangan tersebut sehingga sampah dapat dirumuskan sebagai bahan sisa dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sampah yang harus dikelola tersebut meliputi sampah yang dihasilkan dari 1) Rumahtangga; 2) Kegiatan komersial: pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran, tempat hiburan; 3) Fasilitas sosial: rumah ibadah, asrama, rumah tahanan/penjara, rumah sakit, klinik, puskesmas; 4) Fasilitas umum: terminal, pelabuhan, bandara, halte kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar; 5) Industri; 6) Fasilitas lainnya: perkantoran, sekolah; 7) Hasil pembersihan saluran terbuka umum, seperti sungai, danau, pantai.

Hasil observasi menunjukkan bahwa secara umum, sampah padat dapat dibagi 2, yaitu sampah organik (biasa disebut sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). Sampah Organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun. Sampah Anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam.

Sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Kertas, koran, dan karton merupakan pengecualian. Berdasarkan asalnya, kertas, koran, dan karton termasuk sampah organik. Tetapi karena kertas, koran, dan karton dapat didaur ulang seperti sampah anorganik lain (misalnya gelas, kaleng, dan plastik), maka dimasukkan ke dalam kelompok sampah anorganik. Sudah kita sadari bahwa pencemaran lingkungan di Kota Depok akibat perindustrian maupun rumah tangga sangat merugikan manusia/ masyarakat, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan perindustrian dan teknologi diharapkan kualitas kehidupan dapat lebih ditingkatkan. Namun seringkali peningkatan teknologi juga menyebabkan dampak negatif yang tidak sedikit. Sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah di sini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (*refuse*) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.

Produk pembakaran berupa gas buang CO_x, NO_x, SO_x, partikulat, dioksin (CO₂), furan, dan logam berat (Hg) yang dilepaskan ke atmosfer harus dipertimbangkan. Selain itu proses insinerator menghasilkan Dioxin yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, misalnya kanker, sistem kekebalan, reproduksi, dan masalah pertumbuhan. *Global Anti-Incinerator Alliance* (GAIA) juga menyebutkan bahwa *insinerator* juga merupakan sumber utama pencemaran Merkuri. Merkuri merupakan racun saraf yang sangat kuat, yang mengganggu sistem motorik, sistem panca indera dan kerja sistem kesadaran.

5) Kebijakan Penataan, Indikatornya, adalah a) Memakai akal budi dalam memproses sesuatu, perbuatan tertentu, cara menata sesuatu, pengaturan, dan dalam penyusunan sesuatu. Hal yang perlu dielaborasi terhadap indikator ini, Informan IV, VII, dan VIII menjelaskan sebagai berikut. Proses pengolahan

sampah, saat ini tengah ditata dan diatur serta disusun menjadi salah satu program utama sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2011 Kota Depok. Dalam melaksanakan program utama tersebut, kebijakan penataan atau pengelolaan sampah di Kota Depok dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu 1) Pendekatan skala rumah tangga. Pendekatan skala rumah tangga dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Salah satunya adalah dengan gerakan pemilahan sampah dan pengomposan sampah skala rumah tangga. Pemilahan dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga merupakan tindakan awal dalam memisahkan sampah organik dan non organik. Setelah dilakukan pemilahan, maka sampah organik diolah menjadi kompos, terutama dengan menggunakan keranjang *takakura*; 2) Pendekatan skala kawasan. Pendekatan pengelolaan sampah skala kawasan, adalah upaya mengubah paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi kumpul-olah-manfaat. Program yang dilaksanakan adalah membangun unit pengolahan sampah (UPS) dalam skala kawasan. Dari kajian sebelumnya, lahan yang dibutuhkan untuk 1 unit UPS adalah sekitar 500 m². Dalam jangka waktu empat tahun, diharapkan unit-unit pengolahan sampah tersebut akan mendominasi pengolahan sampah di kota Depok yang mengambil alih peranan TPA.

Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan perhatian untuk meningkatkan pengelolaan persampahan di Kota Depok, antara lain a) Pengelolaan sampah harus benar-benar dilaksanakan secara profesional dan tidak bisa dikelola hanya asal-asalan (manajemen sederhana); b) Biaya untuk pengelolaan sampah harus ditanggung bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta karena perlu biaya yang sangat besar; c) TPA harus dikendalikan secara teknis, ekonomis dan ramah lingkungan

karena dikemudian hari akan menjadi masalah besar di perkotaan; d) Pengurangan sampah dari sumbernya sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan secara menyeluruh; e) Peningkatan kerjasama dan koordinasi dalam pengelolaan TPA dan mendorong pengelolaan TPA skala regional (regionalisasi).

b) Bertindak bila menghadapi kesulitan/permasalahan. Hal yang perlu dielaborasi terhadap indikator “bertindak bila menghadapi kesulitan” ini, Informan II, III, VII, IX, dan X menjelaskan sebagai berikut. Melalui interaksi dan komunikasi, perencanaan bersama dengan masyarakat membantu mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, memahami situasi dan mengidentifikasi solusi bagaimana memecahkan masalah sampah tersebut. Dalam konteks ini perencanaan adalah aktivitas moral, perencanaan merupakan komunikator yang menggunakan bahasa sederhana dalam pekerjaannya agar membuat logik dari perilaku manusia. Kunci dari gagasan perencanaan dan pembelajaran sosial adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tahapan perencanaan yang dilakukan masyarakat di Kota Depok pada umumnya, adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut (1) Tahap pembuatan kesepakatan awal, dimaksudkan untuk menetapkan wilayah dari perencanaan, termasuk prosedur teknis yang akan diambil dalam proses perencanaan. (2) Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari hasil penyelidikan. Data atau informasi yang dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. (3) Identifikasi daya dukung, yang dimaksud dalam hal ini adalah daya dukung tidak harus segera diartikan dengan dana kongkrit (*money*), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktivitas dalam

mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Daya dukung akan sangat tergantung pada persoalan yang dihadapi, tujuan yang hendak dicapai, aktivitas yang akan datang. Pengelolaan sampah tentu tidak saja dapat di topang dengan gerakan yang hanya ditanamkan pada masyarakat. Hal tersebut ditanamkan pada pemerintah, yang juga bertanggung jawab terhadap persoalan pengolahan sampah ini.

Ditegaskan bahwa secara umum, pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis pengelolaan sampah terpadu 3R (*reuse, reduce, recycle*) yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung, mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah, memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan, maka 5 tahap pelaksanaan pekerjaan, yaitu: tahap persiapan, tahap pemilihan lokasi, tahap pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, tahap uji coba pelaksanaan pengelolaan sampah 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), serta terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi. Pertama, tahap persiapan. Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah melakukan persiapan dengan melakukan tindakan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, terutama teknologi komposting di tingkat masyarakat.

Dinas Kebersihan Kota Depok menyusun metode dan pendekatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang meliputi antara lain; menentukan pemilihan lokasi, menentukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, serta pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kedua, tahap pemilihan lokasi disini merupakan awal dimulainya tahap pengumpulan data calon lokasi yang akan dipilih untuk melaksanakan program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Data data tersebut dapat diperoleh dari hasil kajian studi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Retail Tata Ruang Kota

(RDTRK). Ketiga, Tahap Perencanaan Teknis. Tahap perencanaan teknis adalah tahap penyusunan dokumen kerja serta melakukan pengadaan peralatan pengelolaan sampah.

Peralatan prasarana dan sarana persampahan 3R (*reuse, reduce, recycle*) yang meliputi penentuan jenis dan jumlah peralatan, baik untuk pemilahan jenis sampah, pewadahan dan pengangkutan dan alat pengolahan sampah untuk menjadi kompos, termasuk mengidentifikasi kebutuhan tempat untuk pengolahan sampah terpadu TPS (Tempat Penampungan Sementara). Keempat, Tahap Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengorganisasian tentang pemberdayaan masyarakat dan *stakeholder* menjadi fasilitator terhadap kegiatan ditingkat komunitas/masyarakat dikawasan lokasi terpilih. Tahap ini dibagi menjadi 4 kegiatan yaitu melakukan identifikasi lokasi terpilih, melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan cara memperkenalkan program pengelolaan sampah, pembentukan organisasi, melakukan pelatihan pengelolaan sampah terpadu.

Kegiatan Penyusunan Program Sampah 3R (*reuse, reduce, recycle*) adalah proses penyusunan rencana pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dengan pola 3R adalah membuat identifikasi permasalahan dan menentukan rumusan permasalahan serta menentukan kebutuhan yang dilakukan dengan metode penyerapan aspirasi masyarakat dan melakukan survei kampung sendiri dan menyusun analisis permasalahan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan serta menentukan potensi sumber daya setempat. Kegiatan Menyusun Identifikasi Kebutuhan peralatan Prasarana dan Sarana persampahan 3R (*reuse, reduce, recycle*) yaitu menentukan jenis dan jumlah peralatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat, pewadahan, pengangkutan dan alat pengolahan sampah untuk menjadi kompos. Kelima, Tahap Evaluasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 3R. Tahap

evaluasi ini merupakan rangkuman dari keseluruhan hasil program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemajuan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, dan dilakukan pengontrolan secara intensif serta sebagai upaya untuk menyiapkan kemandirian masyarakat.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut 1) Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok dilakukan melalui upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan, kebijaksanaan penataan, pemanfaatan pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan sampah domestik pun harus dikaitkan dengan upaya memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Jadi, pengelolaan sampah hendaknya merupakan upaya dalam pendayagunaan, pengawasan, dan pengendalian sampah, serta pemulihan lingkungan akibat pencemaran sampah.

Pelayanan Pemerintah Daerah Kota Depok kepada masyarakatnya terkait mengatasi masalah lingkungan hidup pada hakekatnya identik dengan berbagai bentuk usaha dengan argumentasi atau penggunaan akal sehat guna menghasilkan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah baik kementerian terkait misalnya Kementerian Lingkungan Hidup yang benar-benar kompeten di bidangnya atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menangani substansi yang sama, dan juga instansi di daerah yang berwenang misalnya Badan Lingkungan Hidup Kota Depok. Manifestasi dari berbagai bentuk usaha dan upaya penggunaan pikiran atau akal yang melahirkan suatu kebijakn itulah yang dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat. 2) Pengelolaan sampah yang ada di Kota Depok

saat ini masih bertumpu pada pola lama, yaitu sampah dikumpulkan dari sumbernya, diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir). Sampah yang dihasilkan bila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu keindahan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi, aktivitas penanganan sampah adalah bermaksud memecahkan persoalan serta mencari solusi yang terbaik.

Dengan meningkatnya laju pembangunan di Kota Depok, penambahan penduduk, serta aktivitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat Kota Depok telah memicu terjadinya peningkatan jumlah timbunan sampah. Dengan hanya dijalankannya paradigma lama pengelolaan yang mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, yang kesemuanya membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu, yang bila tidak tersedia akan menimbulkan banyak masalah operasional seperti sampah yang tidak terangkut, fasilitas yang tidak memenuhi syarat, cara pengoperasian fasilitas yang tidak mengikuti ketentuan teknis, dan semakin habisnya lahan pembuangan. 3) Pemerintah Kota Depok kini tengah berbenah diri dengan segala daya upaya yang dipersatukan dalam suatu kebijakan penanggulangan masalah lingkungan di antaranya adalah penanganan masalah sampah tersebut. Pemerintah Kota Depok akan kehilangan peluang untuk memberdayakan sampah, memanfaatkannya serta meningkatkan kualitas lingkungannya, apabila hal ini tidak tertangani dan dikelola dengan baik. Peningkatan sampah yang terjadi tiap tahun di Kota Depok tersebut, bisa memperpendek umur TPA dan membawa dampak pada pencemaran lingkungan, baik air, tanah, maupun udara. Disamping itu, masalah sampah di Kota Depok berpotensi menurunkan kualitas sumber daya alam, menyebabkan banjir dan konflik sosial, serta menimbulkan berbagai macam penyakit. 4) Dalam rangka perlindungan dari kemusnahan dan

kerusakan atas pemanfaatan pengelolaan sampah di Kota Depok agar menjadi Kota yang sehat dan sejahtera serta tetap menjaga kelestarian lingkungan (pembangunan berwawasan lingkungan/*green city*), antara lain diperlukan langkah-langkah yaitu rekonsiliasi semua pemangku kepentingan, melakukan *assessment*, menentukan tujuan dan prioritas, menyusun *plan of action*, membagi tugas, melaksanakan dan memantau bersama serta mengevaluasi dan keberlanjutan bersama.

Pertumbuhan penduduk di Kota Depok yang relatif cepat, berimplikasi pada ketersediaan lahan yang cukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak bisa bertambah, sehingga menambah beban lingkungan hidup. Daya dukung alam di Kota Depok ternyata semakin kurang seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduknya. 5) Untuk menunjang perkembangan lingkungan kehidupan melalui pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), di Kota Depok saat ini mulai dikembangkan penggunaan pupuk organik yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang harganya kian melambung. Penggunaan kompos telah terbukti mampu mempertahankan kualitas unsur hara tanah, meningkatkan waktu retensi air dalam tanah, serta mampu memelihara mikroorganisme alami tanah yang ikut berperan dalam proses adsorpsi humus oleh tanaman. Penggunaan kompos sebagai produk pengolahan sampah organik juga harus diikuti dengan kebijakan dan strategi yang mendukung. Pemberian insentif bagi para petani yang hendak mengaplikasikan pertanian organik dengan menggunakan pupuk kompos, akan mendorong petani lainnya untuk menjalankan sistem pertanian organik. Kelangkaan dan makin membungahnya harga pupuk kimia saat ini, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan sistem pertanian organik.

Daftar Acuan

- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bogdan, R and J. Taylor. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Willey, hlm 45
- Cresswell, John W. 2002. *Research Design: Quantitative & Qualitative Approaches*. New York: Sage Publication, Inc.
- Denzin, Norman, K, and Yvonna S. Lincoln (eds). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications, Hlm 27.
- Gelbert, dkk. 1996. *Dampak Sampah Terhadap Manusia dan Lingkungan*. Hlm 34.
- Ishikawa, Kaoru. 1990. *Introduction to Quality Control*. Translator: J. H. Loftus
- Kerlinger, Fred N. 2000. *Azas-azas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Mackhon. 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. hlm 10
- Moleong, J. Lexy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan 22. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Cetakan III. Jakarta: Bina Aksara, hlm 57.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. hal, 9. Jakarta: Kencana Prenada Media Group (Hasil Penelitian).
- Santoso. 2008. *Perencanaan Pangan dan Status Gizi Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 16
- SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan.
- Suharto. 2005. dalam Nur. 2013. *Formulasi Kebijakan Publik*. hlm 7 (Tesis, 2013).
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Pemasaran Hijau: Dalam Ekonomi Islam Ditinjau dari Perspektif Kekhalifahan Umar bin Khattab r.a

Khoirul Umam

Dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Jakarta, Indonesia

e-mail: khoirulumam77@yahoo.com

Abstrak

Dampak negatif akibat eksploitasi kegiatan ekonomi modern bagi lingkungan dan masyarakat, telah menjadikan kegiatan bisnis hijau sebagai isu sentral dalam kegiatan bisnis di millennium ini yang memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan yang berorientasi pemasaran hijau. Padahal pemikiran ekonomi Islam tentang bisnis hijau telah lama menjadi bagian dari kebijakan yang tertulis dalam Al-Quran, dicatat dalam Konstitusi Madinah dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat oleh Khalifah Umar. Tulisan ini menjelaskan pemikiran ekonomi Islam pada pemasaran hijau, persyaratan umum kegiatan pemasaran hijau menurut ekonomi Islam dan upaya preventif Khalifah Umar terhadap pemasaran hijau. Makalah ini dibuat dengan metode pengumpulan jurnal deskriptif, kualitatif, dan literatur. Kegiatan pemasaran hijau merupakan bentuk kebijakan pembangunan ekonomi yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang berdampak kepada kegiatan usaha yang sadar lingkungan (bisnis hijau) sebagaimana praktik pemasaran hijau yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*, dan lingkungan alam sebagai perwujudan mandat dari Allah SWT. Prinsipnya adalah membuat *green product*, tidak mengeksploitasi hewan dan tumbuhan, efisiensi energi, menjaga kualitas produk dan halal berdasarkan kejujuran demi menciptakan produk yang aman bagi kesehatan konsumen dan menjaga lingkungan bisnis yang sehat dengan menciptakan produk yang tetap bersih secara menyeluruh.

Abstract

Green Marketing: Islamic Economic Perspective Reviewing from the Perspective of the Caliphate of Umar bin Khattab

Negative impact due to the exploitation of modern economic activities on the environment and society, has made green business activities as central issues in business activity in this millennium interested in sustainability and environmental balance of green marketing oriented. Though Islamic economic thought about green business has long been a part of the policy that is written in the Koran, is recorded in the Constitution of Medina and economic development policies made by Caliph Umar. This paper describes the Islamic economic thought on green marketing, green marketing activities of the general requirements according to Islamic economics and preventive measures against the Caliph Umar green marketing. This paper was prepared by the method of collecting the journal descriptive, qualitative, and literature. Green marketing activities is a form of economic development policies that maintain a balance between economic growth and environmental sustainability are impacting the business activities that are environmentally conscious as a green marketing practices that have been done during the reign of Caliph Umar, as well as a form of corporate responsibility to stakeholders, and the natural environment as a manifestation of Allah's mandate. The principle is to create a green product, no exploitation animals and plants, energy efficiency, maintain quality and halal products based on honesty for the sake of creating a safety product for the consumer's health and maintaining healthy business environment by creating products that stay clean thoroughly.

Keywords: *business ethics of Islam, Caliph, green marketing, green product.*

I. Pendahuluan

Persoalan mendasar yang dihadapi manusia dalam ilmu ekonomi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya memiliki keterbatasan. Melalui akal pikirannya manusia berusaha untuk mencari jalan keluar masalah keterbatasan sumber daya tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Efisiensi pengelolaan sumber daya alam demi memenuhi kebutuhan hidup manusia menjadi tidak efektif ketika sifat serakah (*greedy*) dan perilaku eksploitatif telah mendominasi diri manusia yang pada akhirnya membawa pada dampak negatif terhadap diri dan lingkungan di sekitarnya, baik alam maupun sosial. Pada masa kini, teknologi telah memegang peranan penting dan mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia. Kecanggihan teknologi serta ilmu pengetahuan telah mampu memenuhi dan menemukan solusi terhadap kebutuhan manusia. Revolusi industri yang ditandai oleh penciptaan mesin-mesin mutakhir sebagaimana yang terjadi di Eropa dan Negara Barat lainnya, telah membuktikan bahwa manusia telah mencapai keberhasilan peradabannya dan selalu berusaha memecahkan persoalan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk lebih baik.

Akan tetapi, keberhasilan manusia dengan berbagai kemajuan iptek dan teknologi tersebut ternyata menimbulkan pengaruh buruk terhadap kehidupan manusia dan kelompok masyarakat yang lain. Bahkan hewan, tanaman dan lingkungan pun terkena dampak buruk akibat sikap tamak manusia tersebut.

Dalam realitasnya, revolusi industri tidak memperhatikan dampak buruk atas penciptaan berbagai produk-produk tersebut terhadap berbagai aspek-aspek yang lain seperti dampak organ tubuh manusia terhadap konsumsi makanan berpengawet dan konsumsi tanaman yang disemprot pestisida,

pengaruh pencemaran pabrik dan hasil emisi bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor terhadap pernafasan dan lapisan bumi, dampak kehidupan tanaman air dan hewan yang berada di sungai, danau dan laut sebagai tempat akhir pembuangan sampah rumah tangga manusia dan pabrik atas penggunaan barang-barang yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, dampak pupuk-pupuk berbahan kimia yang tidak memperhitungkan sifat-sifat tanah, penebangan pohon yang tidak disertai reboisasi, penjarahan serta penebangan pepohonan di hutan lindung yang tidak memperhatikan kehidupan hewan yang bernaung di dalamnya dan tidak memperhatikan fungsi akar pohon hutan lindung dan peranannya sebagai tempat resapan air hujan yang akan bermanfaat pada musim kemarau, dan lain sebagainya.

Manusia mulai menyadari atas dampak perilaku buruk yang ditimbulkannya setelah mengalami berbagai bencana alam, banjir pada musim hujan dan kekeringan pada saat kemarau, peningkatan suhu bumi yang menimbulkan perubahan musim yang ekstrim dan tidak normal yang menyebabkan suhu di kutub menjadi lebih hangat, munculnya berbagai penyakit yang tidak lazim seperti kanker dan tumor ganas, mulai punahnya hewan-hewan tertentu dan berkurangnya hutan lindung, berkurangnya kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia dan rusaknya lapisan ozon pelindung bumi dari radiasi panas matahari yang berefek buruk terhadap kesehatan kulit manusia berupa kanker kulit dan peningkatan suhu di bumi.

Atas fenomena tersebut, manusia mulai memperhatikan pentingnya pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelangsungan masa depan bumi. Menurut Situmorang (2011) pada akhir tahun 1960-an Amerika Serikat (AS) memulai gerakan lingkungan hidup modern dan menjadi pemimpin dunia untuk reformasi lingkungan hidup. Di AS ternyata gerakan ekologi tahun 1960-an tersebut mampu meningkatkan perhatian dan

kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Gerakan ini berhasil mewujudkan *The Council on Environmental Quality* (CEQ) dan *The Environmental Protection Agency* (EPA) pada tahun 1970 dan menghasilkan banyak sekali undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup pada dekade 1970-an. Inilah awal dari regulasi yang kuat sebagai bentuk respon terhadap "reputasi buruk" dari industri di AS yang kurang respek terhadap lingkungan. Masyarakat di AS memilih untuk menyalahkan industri dalam hal terjadinya problem-problem lingkungan hidup nasional.

Lebih lanjut Situmorang (2011) menuliskan bahwa di benua Eropa lebih belakangan muncul gerakan pro lingkungan hidup dibandingkan di AS. Pada akhir tahun 1970-an *Green Party* (Partai Hijau) dibentuk di Jerman. Secara umum baru pada dekade 1980-an publik di Eropa mulai menaruh perhatian dan mengambil tindakan terhadap persoalan lingkungan hidup. Munculnya *Green Party* berarti sudah mulai ada politikus yang membawa isu lingkungan hidup ke ranah politik. *Green Party* kemudian bermunculan di negara-negara lain di Eropa yang berarti semakin banyak politikus yang membawa isu lingkungan hidup dalam percaturan politik di Eropa. Keadaan seperti itu menjadi faktor utama terjadinya revolusi hijau di Eropa. Mulai era tahun 1990-an sampai sekarang lingkungan hidup telah menjadi isu penting di sebagian besar negara-negara di Eropa termasuk di negara-negara yang enggan membahas isu lingkungan hidup seperti Inggris Raya dan Italia.

Berbagai negara sepakat melalui Konferensi Tingkat Tinggi Dunia pada 2005 mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan mencegah rusaknya. Hasil dari KTT Dunia 2005 tersebut adalah tiga tiang utama dalam pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (Mai, 2012).

Isu lingkungan pun menjadi tema sentral kegiatan ekonomi pada abad 21 ini yang diwujudkan dengan kehadiran bisnis yang berorientasi ramah lingkungan yang dikenal dengan sebutan bisnis atau industri hijau. Konsekuensi dari bisnis dan industri hijau ini melatarbelakangi konsep pemasaran hijau atau pemasaran yang berbasis lingkungan yaitu konsep pemasaran holistik yang tidak hanya mencakup bagaimana memasarkan produk yang ramah lingkungan saja, namun lebih luas daripada itu adalah mulai dari proses produksi, pengemasan, pelabelan, pendistribusian hingga pembuangan produk yang mudah terurai oleh daya dukung lingkungan.

Konsep dan usaha penerapan pemasaran hijau sebagai efek kepedulian terhadap kelestarian lingkungan baru disadari oleh penduduk dunia pada abad 21 sekarang. Kepedulian terhadap lingkungan yang merupakan titik berat gagasan pemasaran hijau, telah lama dijadikan salah satu poin penting dalam konstitusi atau piagam terbentuknya pemerintahan yang berlandaskan Al Quran dan Hadist Rasulullah Saw Nabi Muhammad yaitu Piagam Madinah yang berisikan pernyataan sebagaimana dikutip dalam Perwataatmadja dan Byarwati (2008) sebagai berikut:

"Ibrahim menyucikan Mekkah dan Saya menyucikan Madinah antara dua Harrah. Tidak seorangpun boleh menanam tumbuh-tumbuhan liar atau berburu binatang-binatang liar. Tidak boleh menyimpan barang-barang temuan tanpa mengumumkannya. Tidak boleh memotong pepohonan kecuali bagi yang bermaksud memberi makan untanya. Dan senjata untuk berperang tidak boleh dibawa ke sini."

Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, setiap orang dilarang melakukan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan manusia dan alam. Dalam kerangka ini Rasulullah saw melarang setiap individu memotong rumput,

menebang pohon atau membawa masuk senjata untuk tujuan kekerasan atau pun peperangan di sekitar kota Madinah (Karim, 2004).

Dengan demikian konsep kepedulian terhadap alam dan lingkungan termasuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tanaman dan hewan yang diaplikasikan dengan bentuk pemasaran yang ramah lingkungan adalah salah satu dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip *khilafah*, artinya manusia diberi amanat untuk menjadi khalifah di bumi guna mengelola sumber-sumber daya alam sekitarnya untuk kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi individu tertentu yang memiliki modal besar. Pada dasarnya kehadiran ilmu ekonomi syariah di Indonesia dan di negara-negara tertentu yang memiliki warga negara beragama Islam adalah sebagai respon dari dampak buruk yang telah ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi manusia modern yang mengabaikan kepedulian terhadap kesejahteraan sesama manusia dan lingkungan.

II. Pembahasan

Pemasaran Hijau Menurut Ekonomi Syariah.

Ekonomi Kapitalisme mengabaikan aspek yang paling fundamental dalam kegiatan manusia di muka bumi yaitu pengabaian terhadap keberadaan dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta alam semesta ini. Pengabaian hubungan manusia dengan Sang Pencipta ini menimbulkan perilaku semena-mena manusia dalam menjalankan kegiatannya. Perilaku buruk disertai tidak adanya kontrol yang bersumber dari ketentuan absolut Sang Pencipta tentang bagaimana menjalin harmonisasi hubungan dengan sesama manusia dengan lingkungannya menimbulkan ancaman bagi kelangsungan kehidupan manusia di muka bumi akibat berbagai kerusakan yang telah ditimbulkannya. Oleh sebab itulah, kegiatan manajemen yang ramah lingkungan yang diwujudkan oleh praktek pemasaran hijau perlu dilakukan oleh perusahaan

yang bertanggungjawab terhadap masa depan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Karakteristik pemasaran hijau sebagaimana ditulis oleh Peattie (1995) dalam Walker dan Hanson (1998) adalah kegiatan manajemen yang bersifat menyeluruh yang bertanggungjawab untuk mengidentifikasi, mengantisipasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan dan masyarakat dengan cara yang menguntungkan dan berkelanjutan. Selanjutnya Walker dan Hanson (1998) menyatakan bahwa kata kunci kegiatan pemasaran hijau adalah menyeluruh (*holistic*) dan berkelanjutan (*sustainable*) serta mengakomodasi keperluan dan kebutuhan masyarakat dan individu. Bentuk pemasaran hijau adalah bentuk kepedulian kepada alam sekitar terhadap masukan (*input*) berupa sumber pasokan, konsumsi sumber daya, desain dan proses produk. Sama halnya dengan hasil keluaran produk (*output*) yang tidak hanya memperhatikan aspek manfaat, ketahanan dan limbah produk semata tetapi juga memperhatikan sikap pelanggan dan harapan serta dampak pemanfaatan produk terhadap masyarakat dan individu secara keseluruhan untuk saat ini dan masa yang akan datang. Dengan demikian pemasaran hijau sebagaimana diketahui tidak hanya sekedar memproduksi barang yang ramah terhadap lingkungan namun ramah bagi kesehatan masyarakat secara umum. Berdasarkan pengertian tersebut, pemasaran hijau berkaitan dengan 1) Proses produksi yang ramah lingkungan mulai dari pemilihan bahan baku, penggunaan energi. 2) Proses pengemasan dan pelabelan yang ramah lingkungan. 3) Proses pendistribusian. 4) Dampak pemanfaatan produk bagi kesehatan masyarakat.

Keberadaan ekonomi syariah bertujuan untuk mengarahkan perilaku manusia supaya hidup selaras dan seimbang dengan keadaan alam sekitarnya. Pada dasarnya semua yang ada di muka bumi diciptakan untuk kepentingan manusia yang meliputi tanah, sumber daya alam mineral, hutan, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup

berdampingan dengan sesama manusia berbaur dengan alam sekitarnya. Manusia lalu diberi tanggungjawab untuk mengelola faktor-faktor produksi sambil menjaga kelestariannya. Artinya manusia tidak boleh berperilaku tamak dalam mengeksploitasi amanat tersebut karena manusia diminta menjaga keadilan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar dan masyarakat.

Ekonomi syariah berdiri atas dasar keyakinan terhadap Allah swt (aqidah), syariah dan akhlak. Kegiatan bisnis dalam ekonomi syariah tidak hanya dipenuhi oleh unsur-unsur etika yang bersumber dari akhlak Rasulullah saw namun dilandasi oleh jiwa yang memiliki keyakinan atau aqidah yang kuat terhadap keEsaan-Nya sehingga terwujud dalam kepatuhan terhadap syariah-Nya yang bersumber dari Alquran dan Hadist Rasulullah saw. Dalam dunia bisnis, bentuk dari keyakinan dan kepatuhan yang tinggi terhadap-Nya membentuk jiwa dan karakter muslim yang beretika dan berakhlak mulia.

Karakter yang terbentuk adalah karakter yang bertanggungjawab terhadap Sang Pencipta dan lingkungannya. Rasa tanggungjawab yang mendalam tersebut diwujudkan melalui perilaku yang tidak semena-semena dan mementingkan keuntungan diri pribadi semata, namun karakter mulia tersebut dinampakkan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan alam dengan berusaha menjaganya tetap lestari. Dengan demikian kegiatan bisnis dalam ekonomi syariah meliputi kegiatan menyeluruh terhadap semua aktivitas bisnis mulai dari proses pemilihan bahan baku, proses produksi produk, proses pengemasan, pendistribusian, penjualan dan pengiklanan produk yang dilandasi

oleh kerangka aturan Islam yang sesuai aqidah, syariah dan akhlak. Bisnis yang dijalankan adalah bisnis yang penuh dengan jiwa ketuhanan yang melahirkan etika bisnis Islam yang tunduk pada aturan syariah-Nya. Ketundukan yang mendalam melahirkan bisnis yang menjalankan kegiatan pemasaran yang bertanggungjawab terhadap kelestarian alam dan lingkungan serta masyarakat sekitarnya.

Kegiatan pemasaran hijau merupakan perwujudan dari etika bisnis Islam karena pemasaran hijau adalah bentuk pertanggungjawaban individu terhadap amanah yang diberikan sang pencipta untuk mengelola alam dan memberikan kesejahteraan untuk semua yaitu alam dan masyarakat. Bentuk kegiatan pemasaran hijau dalam perspektif syariah merupakan bagian dari bentuk tanggungjawab dari kegiatan bisnis perusahaan sebagaimana diutarakan oleh Beekun (1997) bahwa tanggungjawab sosial perusahaan mengacu kepada kewajiban organisasi usaha atau perusahaan untuk melindungi dan berkontribusi terhadap masyarakat sesuai dengan fungsinya. Menurut Beekun (1997) terdapat 3 praktek bentuk pertanggungjawaban sosial organisasi usaha, yaitu terhadap *stakeholder*, lingkungan alam sekitar dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitarnya yang dijabarkan sebagai berikut (a) Tanggungjawab Terhadap *Stakeholder*. *Stakeholder* adalah orang atau organisasi yang memiliki kepentingan yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Mereka yang termasuk *stakeholder* adalah karyawan, konsumen, pemasok, pemberi pinjaman, masyarakat umum, pemilik, mitra dan pesaing. Hubungan terhadap masing-masing *stakeholder* diuraikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Bentuk Tanggungjawab Perusahaan Terhadap Stakeholder

No	Stakeholder	Bentuk Pertanggungjawaban
1.	Karyawan	Upah yang adil, promosi, budaya organisasi perusahaan
2.	Konsumen	Menerima barang dalam kondisi dan harga yang adil
3.	Pemasok	Negoisasi dengan harga yang adil dan menulis perjanjian
4.	Pemilik/mitra	Distribusi keuntungan
5.	Pesaing	Persaingan yang sehat
6.	Pemberi Pinjaman	Membayar kembali sesuai tempo
7.	Masyarakat	Menjaga pelestarian lingkungan sekitar, menghindari kerusakan alam sekitar, membantu anggota masyarakat yang lemah dan miskin

(b) Tanggungjawab Terhadap Lingkungan Alam Sekitar. Bentuk tanggungjawab manusia terhadap

lingkungan alam sekitar merupakan mandat yang dianugerahkan Allah kepada manusia sebagaimana dinyatakan dalam surat Al Baqarah (2): 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Berdasarkan ayat tersebut, kegiatan bisnis dalam perspektif syariah merupakan peranan manusia sebagai khalifah yang diharapkan memiliki bentuk kepedulian yang besar terhadap lingkungan. Tren bisnis di masa sekarang yang peduli terhadap lingkungan bukanlah sesuatu yang baru bagi kegiatan ekonomi syariah. Beberapa contoh kegiatan yang mengarahkan kepada pentingnya dalam menjaga lingkungan alam adalah : perlakuan

terhadap hewan, perlakuan terhadap pencemaran lingkungan dan hak kepemilikan barang serta membebaskan lingkungan air dan udara dari polusi. (c) Tanggungjawab Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat dan bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, maka perusahaan harus peduli terhadap kesejahteraan anggota masyarakat sekitar yang

lemah dan miskin. Menurut Ahmad (1995), perintah Alquran dalam pendistribusian kekayaan membawa kepada sebuah sistem yang unik yaitu sistem jaminan sosial, suatu sistem dimana setiap orang dijamin memperoleh kesejahteraan. Jumlah minimum yang diperoleh setiap individu dalam jaminan sosial ditentukan oleh seberapa besar kebutuhannya.

Penekanan Alquran adalah menyediakan bantuan dan pendampingan terhadap mereka yang lemah dan miskin. Dalam sistem jaminan sosial dipastikan tak ada seorang pun yang tertinggal untuk dibantu. Sistem jaminan sosial yang ditekankan oleh Alquran adalah sistem jaminan sosial dengan ikatan komunitas yang kuat yang dideklarasikan atas persaudaraan dengan bangunan kokoh tak tertandingi dan motivasi yang teramat dalam untuk membantu orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka konsep pemasaran hijau berdasarkan pandangan ekonomi syariah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban individu atau pebisnis atas amanah yang telah dimandatkan sebagai khalifah oleh Allah swt, untuk berperan menjaga dan mengelola sumber daya-sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya untuk kesejahteraan bersama.

Sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta akan melahirkan bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder*, lingkungan alam dan lingkungan masyarakat sekitar. Pebisnis akan beraktivitas menurut aturan yang telah digariskan sesuai dengan bingkai syariah Islam yang berlandaskan aqidah, syariah dan akhlak sehingga terwujudlah kegiatan bisnis yang beretika terhadap lingkungan dan konsumen.

Ketentuan Umum Pemasaran Hijau Menurut Ekonomi Syariah. Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, bahwa pemasaran hijau adalah perwujudan etika bisnis Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban pebisnis terhadap

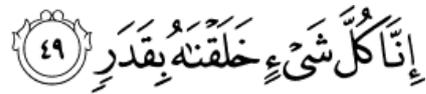
Sang Pencipta terhadap faktor-faktor produksi yang telah diamanahkan oleh-Nya untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan makhluk hidup di seluruh muka bumi yang dilandasi oleh jiwa aqidah, dengan mematuhi aturan syariah dan dibingkai dengan akhlak Rasulullah saw.

Dengan demikian kegiatan bisnis yang berlangsung adalah kegiatan yang bertanggungjawab terhadap sang Pencipta, alam dan manusia sekitarnya yang tidak semata-mata mengejar keuntungan materi saja tapi juga mempertimbangkan aspek kelestarian sumber daya hayati serta bersikap tidak berlebihan dalam mengeksplorasi sumber daya mineral. Pada intinya kegiatan pebisnis sebagai khalifah mendatangkan kebaikan dan manfaat positif bagi seluruh makhluk hidup dan benda-benda di alam semesta. Menurut Beekun (1997) kegiatan bisnis tidak bisa terlaksana apabila menimbulkan dampak merugikan dan membahayakan bagi keselamatan dan kenyamanan orang lain disekitarnya serta lingkungan dimana bisnis akan dilaksanakan.

Dengan demikian ketentuan-ketentuan umum yang telah disepakati bersama dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran hijau sebagai bagian kegiatan bisnis yang bertanggungjawab terhadap pencipta, lingkungan alam dan manusia sekitarnya sebagaimana dirangkum dalam bingkai etika bisnis Islam menurut Badroen *et al* (2007) adalah sebagai berikut: (1) *Unity* (Ketauhidan). *Unity* adalah hubungan vertikal manusia dengan Sang pencipta. Makna *unity* adalah menjaga hubungan baik, patuh dan tunduk hanya kepada aturan dari Allah swt Sang Pencipta sehingga pebisnis hanya akan mengikuti aturan yang benar dan menjauhi larangan-Nya dalam menjalankan bisnisnya. Aplikasi dalam kegiatan pemasaran hijau menurut Beekun (1997) menyebabkan seorang pebisnis tidak bersikap memaksakan praktek bisnis yang tidak etis. (2) *Equilibrium* (Keseimbangan/keadilan). Sedangkan *equilibrium* atau '*adl*' adalah hubungan horisontal sesama manusia. Makna

equilibrium adalah keadilan dan hubungan harmoni seluruh makhluk di alam semesta.

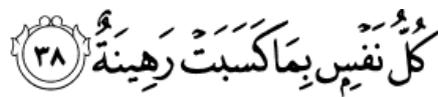
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Qamar ayat 49 yang menyatakan bahwa:



“*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.*”

Ayat tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu di bumi telah ditetapkan masing-masing fungsi, posisi, peranan dan ukuran-ukurannya. Artinya lingkungan alam semesta memiliki kadar yang optimal yang telah diukur kemampuannya. Aplikasi pemasaran hijau adalah pebisnis harus memperhatikan aspek daya dukung lingkungan dan tidak berlebih-lebihan dalam mengeksplorasi kekayaan alam. (3) *Free Will* (Kehendak Bebas). Kegiatan bisnis dalam ketentuan ini diarahkan kepada kebaikan kolektif. Kehendak bebas berarti

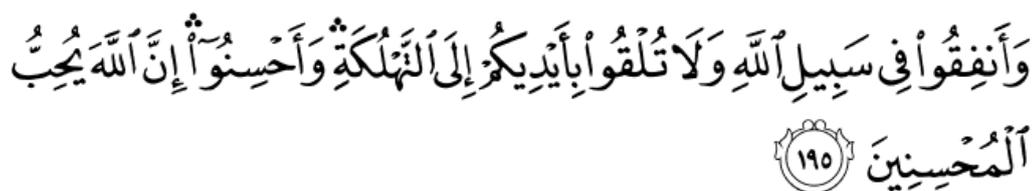
setiap individu terbuka lebar untuk menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai aturan syariah dengan bingkai etika bisnis Islam. Aplikasi dalam kegiatan pemasaran hijau adalah pebisnis mana pun berhak memenuhi hak konsumen dalam mengkonsumsi produk yang halal dan baik untuk kesehatan yaitu produk-produk yang ramah lingkungan. (4) *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Firman Allah dalam Alquran surat Al Muddatstsir (74) ayat 38 menyatakan:



“*Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.*”

Maknanya adalah setiap pebisnis harus bersikap hati-hati dalam menjalankan bisnisnya karena kegiatan bisnis akan dimintai pertanggungjawaban. Aplikasi dalam pemasaran hijau adalah pebisnis tidak bisa menjalankan bisnis sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan aspek kepedulian terhadap lingkungan alam dan masyarakatnya karena kegiatan bisnis yang merusak lingkungan dan mengganggu ketenangan masyarakat akan dimintai

pertanggungjawaban di hadapan-Nya atas perannya sebagai khalifah di muka bumi. Pebisnis harus memperhatikan keamanan produk yang mereka tawarkan kepada konsumen supaya tidak membahayakan jiwa dan tubuh konsumen ketika mengkonsumsinya. (5) *Benevolence* (Ihsan). Ihsan bermakna kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 195:



“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Rasulullah saw juga bersabda,

قَتَلْتُمْ فَإِذَا شَيْءٌ كُلُّ عَلَى الْإِحْسَانِ عَلَيْكُمْ كَتَبَ اللَّهُ إِنَّ
الدَّبْحَةَ فَأَحْسِنُوا دَبْحَتُمْ إِذَا وَ الْقَتْلَةَ فَأَحْسِنُوا

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berbuat baik (ihsan) pada segala sesuatu, maka jika kamu membunuh, bunuhlah dengan baik, dan jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik...”
(HR. Muslim)

Fondasi ihsan dalam berbisnis menurut Ahmad (1995) dalam Badroen *et al* (2007) adalah murah hati, motif melayani dan kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi skala prioritas. Aplikasi ihsan dalam pemasaran hijau adalah menjalankan pertanggungjawaban kepada lingkungan masyarakat sekitar dengan membantu anggota masyarakat yang lemah dan miskin sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kegiatan bisnis terhadap sesama dan memperlakukan lingkungan, tanaman dan hewan secara adil. Artinya tidak mendirikan bangunan pada daerah resapan air atau membangun perumahan di daerah pegunungan sehingga menurunkan fungsi hutan sebagai daerah resapan air hujan.

Kebijakan Preventif Khalifah Umar Bin Khattab yang Berhubungan dengan Pemasaran

Hijau. Seperti telah diutarakan pada pendahuluan bahwa masyarakat era modern abad 20 dan 21 baru menyadari dampak buruk akibat kerugian yang ditimbulkan oleh praktek bisnis yang mengabaikan lingkungan alam dan masyarakat sekitar, sebaliknya ekonomi syariah telah mencantumkan dalam konstitusi Madinah yang dibuat ketika Rasulullah saw hijrah ke Madinah. Dalam konstitusi tersebut, kehidupan komunitas masyarakat berdampingan dengan alam sekitar berupa tanaman dan hewan. Kegiatan perburuan binatang dan penebangan pohon terlarang dilakukan karena mereka adalah bagian dari komunitas masyarakat yang kehadirannya diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan secara adil dan efisien atau tidak melampaui batas untuk semua sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Ar-Rahman (55) ayat 7-13:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ
فِيهَا فَكِيهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ



“Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu tidak melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu memperlakukan neraca. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

Makna yang tercantum dalam konstitusi Madinah tersebut memiliki arti yang luas. Pesan Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bermakna bahwa manusia harus menjaga harmonisasi hubungan yang seimbang dengan lingkungan

sekitarnya. Karena harmonisasi hubungan dengan alam sekitar merupakan salah satu bentuk ibadah sebagaimana diminta oleh Allah dalam Al Quran surat Az-zariyat (51) ayat 56:



“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”

Makna pengabdian kepada Sang Pencipta diwujudkan dengan menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta (aspek vertikal) dan dengan lingkungan sekitar yang terdiri dari sesama manusia, tanaman, hewan dan benda-benda yang berada dalam lingkungan sekitarnya (aspek horisontal). Aspek vertikal diwujudkan melalui ibadah ritual yang diaplikasikan melalui rukun Islam sedangkan aspek horisontal diaplikasikan dengan mematuhi ketentuan syariah dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat dan alam yang terdapat dalam ketentuan fiqh atau hukum.

Upaya menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar ditunjukkan oleh Khalifah Abu Bakar ketika mengutus Yazid bin Abu Sufyan pada suatu ekspedisi peperangan. Beliau memberi wejangan agar tidak membunuh secara membabi buta atau

menghancurkan tanaman atau binatang meskipun berada di wilayah musuh. Jika merusak lingkungan di waktu perang saja dilarang, maka apalagi dalam keadaan damai kegiatan merusak lingkungan sudah sangat jelas pasti terlarang (Chapra, 2000).

Demikianlah Islam memandang upaya menjaga lingkungan merupakan bagian dari wujud ketundukan yang dalam terhadap Sang Pencipta (aqidah) yang termanifestasikan dalam kepatuhan terhadap aturan syariah-Nya dengan diwarnai oleh bingkai akhlak melalui etika bisnis Islam.

Pada dasarnya aturan-aturan dalam syariah Islam bersifat preventif atau mencegah dari awal supaya tidak terjadi pelanggaran. Aturan syariah bersifat peringatan supaya manusia tidak berlaku berlebihan atau melampaui batas karena segala sesuatu di muka bumi telah diciptakan secara adil

sesuai dengan neraca yang digariskan (sunnatullah/hukum alam). Upaya preventif dalam mencegah kerusakan selalu diambil oleh khalifah selaku pemimpin yang diberi amanat untuk bertanggungjawab terhadap hajat hidup orang banyak. Sebagaimana kebijakan yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Menurut Al-Kharitsi (2003), strategi Khalifah Umar bin Khattab dalam menjaga lingkungan dapat diketahui melalui kebijakan ekonominya dalam hal konsumsi, distribusi, investasi ekonomi, hubungan ekonomi internasional dan lain sebagainya. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan menjaga lingkungan supaya tetap terjaga kelestariannya. Secara garis besar poin langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam upaya menjaga keadilan antara pertumbuhan ekonomi dengan terpeliharanya lingkungan sebagaimana ditulis oleh Al-Kharitsi (2003) adalah 1) Kegiatan produksi melalui skala prioritas terhadap jenis kebutuhan yang rangka merealisasikan tujuan-tujuan syariah. Pemberian skala prioritas terhadap produksi kebutuhan primer, kemudian setelah primer terpenuhi menyusul kebutuhan sekunder dan tersier; 2) Kegiatan ekonomi yang diwarnai oleh prinsip akhlak yang mengedepankan keadilan bagi konsumen dengan mengedepankan kejujuran dan kualitas produk serta melarang kegiatan yang membahayakan orang lain; 3) Pendistribusian hasil pembangunan secara merata dan adil dan terciptanya kesempatan untuk semua dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok semua rakyat sehingga tidak ada yang kelaparan. Dampak kelaparan bagi si miskin adalah merusak lingkungan dengan menebang pohon dan memenuhi kota-kota besar sehingga mencemari lingkungan; 4) Tidak memberi izin masuk barang yang membahayakan lingkungan; 5) Mengurangi pajak pada barang-barang pokok, sebaliknya

membiarkan pajak tetap tinggi pada barang-barang sekunder. Kebijakan tersebut diambil dalam rangka melindungi lingkungan dari produksi atau impor barang yang berpotensi mencemari lingkungan. 6) Bersikap ekonomis dalam kegiatan konsumsi atau tidak berlebih-lebihan; 7) Pembangunan wilayah perkotaan dengan memperhatikan masalah syarat-syarat terpeliharanya lingkungan misalkan dengan menjamin tetap tersedianya air bersih, udara bersih dan lain-lain; 8) Melarang penggunaan barang-barang yang menyebabkan pencemaran lingkungan; 9) Memperhatikan kepentingan terhadap kebutuhan generasi yang akan datang; 10) Melarang mengambil apa yang ada di dalam hutan lindung dan memburu hewan didalamnya dan menghukum dengan tegas bagi yang melanggar. Melarang menyakiti hewan. Melestarikan tanaman dan tidak membiarkan tanah kosong tidak ditanami tanaman.

Berdasarkan poin-poin yang telah disebutkan di atas, maka Khalifah Umar bin Khattab melakukan pembangunan ekonomi yang tetap menjaga terpeliharanya keseimbangan dengan tanaman, hewan dan terjaganya lingkungan sekitarnya. Dengan demikian kegiatan ekonomi secara umum yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab berorientasi pemasaran hijau yang mengedepankan urgensi membuat dan memasarkan produk kepada konsumen dengan tetap memperhatikan kebaikan untuk individu dan lingkungan. Poin-poin pemasaran hijau yang bisa digarisbawahi adalah sebagai berikut (a) Pemilihan bahan-bahan baku produk yang ramah lingkungan sudah disadari oleh Khalifah sejak barang tersebut diperoleh. Contohnya adalah melarang impor barang-barang yang berpotensi mencemari lingkungan. Dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan maka kemungkinan produk kecil dalam mencemari lingkungan. (b) Perilaku konsumsi yang tidak berlebihan atau ekonomis menyebabkan efisiennya penggunaan energi. (c) Pentingnya kejujuran dalam kualitas produk didasari oleh pertimbangan tidak boleh membuat

segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Artinya produk yang dibuat sudah tentu terbuat dari bahan-bahan yang tidak membahayakan kesehatan konsumen. (d) Terjaminnya kehalalan produk karena terbuat dari bahan-bahan yang sesuai ketentuan syariah yaitu bahan-bahan yang halal dan baik. Makna bahan yang baik adalah bahan-bahan yang tidak merusak kesehatan konsumen. Bahan-bahan yang demikian diperoleh melalui bahan-bahan yang ramah terhadap lingkungan. (e) Kebersihan dalam segala hal menjamin terciptanya produk yang terjaga sanitasi dan higienisnya sehingga aman untuk konsumen. (f) Pentingnya menjaga kelestarian tanaman dan hewan mengindikasikan untuk bersikap tidak melampaui batas atau efisiensi dalam menggunakan sumber daya hewani dan nabati. (g) Menjaga kelestarian sumber daya air sehingga tidak mencemari lingkungan memungkinkan tetap tersedianya kualitas air yang tetap terjaga.

Demikianlah, ekonomi syariah ternyata telah lebih dahulu memperhatikan pentingnya menjaga keadilan antara pertumbuhan ekonomi dengan harmonisasi dan kelestarian lingkungan yang ada di dalamnya termasuk dengan masyarakat, tanaman, hewan dan benda-benda mati. Praktek pemasaran hijau pada dasarnya merupakan sesuatu yang menjadi bagian rutinitas dari kegiatan bisnis dalam ekonomi syariah. Pada abad modern ini perusahaan-perusahaan sudah mengaplikasikannya sebagai bagian dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun dalam kegiatan bisnis ekonomi syariah, kegiatan pemasaran hijau tersebut merupakan bagian dari etika bisnis Islam yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan umum berupa ketauhidan, keadilan, sikap ihsan, bentuk pertanggungjawaban dan kebebasan dalam berbisnis.

III. Simpulan

Kegiatan pemasaran hijau merupakan bagian dari etika bisnis Islam yang dilaksanakan atas dasar

ketentuan-ketentuan umum yaitu ketauhidan, keadilan, sikap ihsan, bentuk pertanggungjawaban dan kebebasan dalam berbisnis. Kegiatan pemasaran hijau diaplikasikan dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* yaitu bentuk tanggungjawab yang didasari oleh nilai ketauhidan, keadilan dan ihsan terhadap *stakeholder*, masyarakat sekitar dan lingkungan alam.

Bagi pebisnis kegiatan pemasaran hijau merupakan bentuk amanah yang telah dimandatkan oleh Allah swt untuk bertanggungjawab mengelola sumber-sumber daya alam dan lingkungan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya guna kepentingan bersama. Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka kegiatan pemasaran hijau terwujud melalui pemanfaatan sumber-sumber daya alam dengan cara tidak melampaui batas dengan memilih bahan-bahan yang tepat dan ramah terhadap konsumen dan lingkungan serta bersikap efisiensi dalam penggunaan energi. Selain itu, pebisnis hendaknya menjaga kelestarian sumber daya hayati dan hewani sebagai bagian dari bentuk tanggungjawabnya sebagai khalifah.

Ekonomi syariah memandang pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan karena harmonisasi hubungan dengan lingkungan merupakan perintah Allah untuk menjaga neraca tersebut. Pentingnya menjaga harmonisasi hubungan tersebut telah dituangkan dalam piagam Madinah dan telah dipraktekkan masa Khalifah Umar bin Khattab. Perwujudan dari keadilan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan membuahkan kegiatan bisnis yang peduli lingkungan. Sebagai aplikasi dari kegiatan bisnis yang peduli lingkungan adalah kegiatan pemasaran hijau. Dengan demikian kegiatan pemasaran hijau merupakan kegiatan yang sejalan dengan pandangan ekonomi syariah

Daftar Acuan

Al Qur'anul Kariim

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, Dr. 2003. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*. Penerjemah H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.

Ahmad, Mushtaq, Dr. 1995. *Business Ethics in Islam*. Academic Dissertation. The International Institute of Islamic Thought and International Institute Islamic Economics. Pakistan.

Badroen, Faishal., Suhendra., M. Arief Mufraeni dan Ahmad Bashori. 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana Prenada Media Group bekerjasama dengan UIN Press. Jakarta.

Beekun, Rafik Isa. 1997. *Islamic Business Ethics*. The International Institute of Islamic Thought. Virginia, USA.

Chapra, Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Penerjemah Ikhwan Abidin Basri. Penerbit Gema Insani Press. Jakarta.

Karim, Adiwarman. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mai, Chandra., Askardiya Mirza G dan Fitri Amalia. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Unindra Press. Jakarta.

Perwataatmadja, Karnaen dan Anis Byarwati. 2008. *Jejak Rekam Ekonomi Islam*. Cicero Publishing. Jakarta.

Situmorang, James. 2011. Pemasaran Hijau yang Semakin Menjadi Kebutuhan dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Parahyangan. Volume 7 No 3. Bandung.

Walker, Rhett H and Dallas J Hanson. 1998. Green Marketing and Green Place, Taxonomy for the Destination Marketer. *Journal of Marketing Management*. Faculty of Commerce and Law. University of Tasmania. Westburn Publisher. Australia.

Kajian Kelembagaan dan Klasifikasi Wilayah dan Cabang PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang

Gofur Ahmad

Dosen Tetap, Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

¹*e-mail: gofur1973@yahoo.com*

Abstrak

Salah satu upaya strategik yang dilakukan PDAM TKR Kabupaten Tangerang dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi pekerjaan yang lebih efektif dan efisien adalah dengan melakukan rekayasa ulang terhadap struktur bisnis dan kelembagaannya. Kajian ini dimaksudkan untuk merevitalisasi kelembagaan PDAM TKR dan melakukan klasifikasi terhadap unit kerja pelayanan disesuaikan dengan beban kerja dan parameter kinerja lain yang mempengaruhi indeks produktivitas masing-masing unit pelayanan. Kajian ini juga dimaksudkan untuk merespons tuntutan dan kebutuhan pengembangan organisasi yang sejalan dengan prinsip optimalisasi fungsi kelembagaan berdasarkan kondisi eksisting jumlah pelanggan, rentang kendali, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan penataan fungsi organisasi secara optimal. Menggunakan metode penelitian eksplorasi, telaah pengkajian secara teoretis dan empiris, melakukan dengar pendapat/*brainstorming*, konsultasi pakar, dan observasi lapangan, yang berkaitan dengan lingkup kajian. Hasil dari kajian ini mengungkap bahwa adanya Peningkatan jumlah pelanggan menuntut adanya perubahan strategi organisasi yang lebih mengedepankan aspek peningkatan keunggulan pelayanan melalui strategi "*functional focus*", "*developing capacity building*", dan "*Business Process Reengineering*". Selain itu, penanganan di cabang/wilayah maupun Usaha Air Curah perlu dilakukan secara fokus, sehingga diperlukan rentang kendali dan fungsi koordinasi yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi pelaksanaan tugas, mengingat potensi berkembangnya yang sudah semakin cepat. Kajian terhadap klasifikasi wilayah dan cabang diperoleh hasil sebagai berikut: Wilayah Pelayanan I, Pelayanan III, Cabang Serpong dan Cabang Teluk Naga masuk dalam kategori pelayanan kelas B, Wilayah Pelayanan II dan Cabang Tiga Raksa masuk dalam kategori pelayanan kelas A.

Abstract

INSTITUTIONAL AND CLASSIFICATION STUDY OF THE REGION AND BRANCH IN PDAM TIRTA KERTA RAHARJA, SUB PROVINCE OF TANGERANG

Abstract

Strategic effort of PDAM TKR to optimize duties and functions of works more effective and efficient is by doing reengineering against business structure and its institutional. This study is intended to revitalize institutional of PDAM TKR and classify region and branch of PDAM TKR based on workload and other parameters which influence productivity index and service unit. This study is also meant to respond demand and needs of organizational development line with the principles of function optimization based on existing condition of customer, span of control, and other aspects relating to the organization optimally. The method of study is exploration research, theoretical and empiric review, brainstorming, experts consultation, and field observation relating to scope of study. The results of this study reveals that the increasing of customer size demand a change of strategy organization that are more prioritizes the aspects of service competitiveness by strategy of functional focus, developing capacity building, and Business Process Reengineering. Besides, the handling in region and branch or curah business water need to be done focus, so it necessary span of control and coordination function that can increase performance and duties efficiency in region and brach or curah business water. The study of the classification of a region and branch of PDAM TKR obtained the results as follows: service region I is class B, service region II is class A, service region III is class B, Serpong branch is class B, Tiga Raksa branch is class a, and Teluk Naga branch is class B.

Keywords: *business structure reengineering, institutional development, classification of region and branch of PDAM TKR.*

I. Pendahuluan

PDAM Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR) merupakan salah satu perusahaan daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 10/HUK/1976 tanggal 13 April 1976, yang selanjutnya mengalami perubahan

beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang. PDAM TKR memiliki instalasi pengolahan air bersih di berbagai lokasi (termasuk instalasi IKK) dengan total kapasitas terpasang sebesar 4.612 liter/detik. Hingga akhir Mei 2012, jumlah pelanggan PDAM TKR telah mencapai sekitar 113.660 Sambungan Langganan (SL), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Wilayah/Cabang/IKK dan Jumlah SL PDAM TKR Mei Tahun 2012

No	Wilayah/Cabang/ IKK	Jumlah Pelanggan	Proporsi (f)
1	Wilayah Pelayanan I	17.704	15,58
2	Wilayah Pelayanan II	41.907	36,87
3	Wilayah Pelayanan III	26.650	23,45
4	Cabang Serpong	9.076	7,99
5	Cabang Teluk Naga	7.364	6,48
6	Cabang Tiga Raksa	8.368	7,36
7	Pelayanan IKK	2.567	2,26
8	Air Curah	24	0,02
Jumlah		113.660	100

Sumber: Satuan Litbang PDAM TKR, 2012

Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan adanya target penambahan SL pada tahun 2012 sebanyak 5.000 SL. Rencana pembangunan IPA Cihuni dengan kapasitas produksi sebesar 500 liter/detik diharapkan pada tahun 2013 akan mampu meningkatkan jumlah pelanggan PDAM TKR hingga mencapai sekitar 50.000 SL. Belum lagi adanya target-target pencapaian pelanggan lainnya, yang menjadi target pencapaian pelanggan di masing-masing wilayah/cabang.

Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah pelanggan di wilayah I sampai dengan III, begitu pula dengan jumlah SL di Cabang, memiliki besaran yang beragam, sehingga terkesan terjadi ketidaksamaan beban pekerjaan antar masing-masing wilayah/cabang. Ini tentu saja berdampak kinerja operasional dan beban kerja yang harus ditanggung

oleh pegawai yang ada di masing-masing wilayah/cabang tersebut.

Di sisi yang lain, dua unit kerja fungsional yang bertugas menangani pengawasan internal serta penelitian dan pengembangan juga dipandang perlu untuk dikaji ulang, mengingat fungsi kedua unit organisasi tersebut lebih banyak diisi oleh orang-orang yang secara organisatoris berkedudukan sebagai pejabat struktural. Padahal idealnya, kedua fungsi tersebut diisi oleh orang-orang dari rumpun jabatan fungsional yang memiliki profesionalitas dan kemandirian dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penelitian dan pengembangan.

Beberapa isu lainnya yang menjadi perhatian dalam upaya melakukan rekayasa ulang terhadap struktur organisasi dan tata kerjanya adalah bentuk organisasi PDAM TKR yang juga harus selalu

mengakomodir lingkungan usaha PDAM TKR. Berkaitan dengan proporsi antara jumlah orang dengan jumlah jabatan yang ada – karena menyangkut dinamika pengembangan karier pegawai – maka jika dilihat dari kondisi saat ini, organisasi PDAM TKR memiliki jumlah pegawai sekitar 380 orang, sementara jumlah jabatan strukturalnya sedikit, dengan jumlah jenjang yang juga kurang variatif, sehingga pola kariernya menjadi tidak dinamis.

Bentuk struktur organisasi yang cenderung *flat* (datar), seperti saat ini, menjadikan seorang pegawai yang ingin mencapai menjadi seorang Kasubbag minimal membutuhkan waktu 10 – 15 tahun, untuk menjadi seorang Kabag bisa mencapai 10 – 20 tahun, karena sedikitnya jumlah struktural yang ada. Dalam konteks ini, yang menjadi isu adalah meskipun jenjangnya dipandang sudah cukup, namun masih perlu diperluas untuk masing-masing jabatan. Misalkan seperti jenjang PNS, yang disamping ada Jabatan Struktural, pada masing-masing jabatan tersebut juga tersedia *eselonering* dan kelas jabatan. Untuk itu, perlu klustering terhadap kelas jabatan yang mempertimbangkan *leveling/grading* wilayah/cabang dan beban pada masing-masing unit kerja, dengan parameter yang sesuai dengan karakteristik masing-masing unit kerja tersebut.

Isu selanjutnya yang menjadi perhatian dalam konteks pembahasan terhadap upaya melakukan rekayasa ulang terhadap struktur organisasi PDAM TKR ini adalah bahwa saat ini di Wilayah Pelayanan 2, memiliki jumlah pelanggan sekitar 41.907. Pertanyaannya, apakah dibagi di Wilayah Pelayanan 2 perlu dipecah menjadi 2 wilayah pelayanan. Atau alternatif lain adalah menambah jumlah seksi yang ada, khususnya seksi yang menangani fungsi-fungsi teknis. Alternatif lain adalah IKK Rajeg dan Pasar Kemis yang sudah ditutup digabungkan dengan pecahan dari wilayah pelayanan 2, dan dijadikan menjadi cabang. Isu ini yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai landasan

dalam melakukan kajian terhadap upaya melakukan rekayasa ulang terhadap struktur organisasi PDAM TKR saat ini.

Sementara itu, terkait dengan optimalisasi beban kerja dengan indeks produktivitas pegawai, jika dilihat dari kondisi yang ada, bahwa pada tahun 2005 PDAM TKR memiliki jumlah pegawai sekitar 500 orang pegawai yang menangani jumlah sambungan langganan mencapai sekitar 80 ribu sambungan langganan. Saat ini, pelanggan PDAM TKR sudah mencapai sekitar 113.660 dengan jumlah pegawai yang hanya sekitar 380 orang pegawai. Ini artinya, terjadinya penambahan jumlah SL dibarengi dengan adanya jumlah pegawai yang secara alamiah berkurang, mengindikasikan bahwa beban pekerjaan yang dilakukan masih belum sepenuhnya optimal, atau sebaliknya, mereka bekerja secara terpaksa karena beban semakin bertambah, sementara orang yang mengerjakan semakin berkurang, ini artinya belum sepenuhnya pekerjaan itu dilakukan secara maksimal dengan beban kerja yang efektif dan efisien, atau dengan kata lain berbanding terbalik antara jumlah pegawai dengan produktivitas yang dihitung hanya dengan jumlah SL yang ada pada masa itu hingga saat ini.

Untuk itu, dipandang perlu untuk melakukan kajian mendalam terhadap permasalahan yang menjadi alasan mengapa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) PDAM TKR perlu dilakukan, termasuk mengevaluasi klasifikasi wilayah dan cabang yang memiliki beban pekerjaan yang berbeda-beda. Terutama dalam rangka melakukan rekayasa ulang menuju sebuah fungsi organisasi yang lebih optimal dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Adapun maksud dari dilaksanakannya Kajian Kelembagaan dan Klasifikasi Wilayah dan Cabang PDAM TKR Kabupaten Tangerang ini adalah untuk merespons tuntutan dan kebutuhan pengembangan organisasi yang sejalan dengan

prinsip optimalisasi fungsi kelembagaan berdasarkan kondisi *eksisting* jumlah pelanggan, rentang kendali, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan penataan fungsi organisasi secara optimal. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan kajian ini adalah sebagai berikut 1)Diperolehnya informasi mengenai urgensi perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang sejalan dengan prinsip optimalisasi fungsi kelembagaan berdasarkan kondisi eksisting jumlah pelanggan, rentang kendali, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan penataan fungsi organisasi secara optimal; 2)Diperolehnya klasifikasi wilayah cabang sesuai dengan parameter beban kerja yang ditetapkan.

Organisasi. Berasal dari kata *organon* yang dalam bahasa Yunani berarti alat, bagian, anggota, ataupun badan. Pandangan tentang konsep organisasi disampaikan oleh beberapa ahli sebagaimana ditulis oleh Rusdiana dan Ahmad Ghazin (2014:152), yakni sebagai berikut:

- a) Chester I. Barnard mengemukakan bahwa "Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih";
- b) James D. Mooney mengemukakan bahwa "Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama";
- c) Dimock mengemukakan bahwa "Organisasi adalah perpaduan secara sistematis dari bagian-bagian yang saling ketergantungan/ berkaitan untuk membentuk satu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan";
- d) Menurut Stoner, "Organisasi adalah pola hubungan yang mendorong orang-orang di bawah pengarahan manajer untuk mengejar keuntungan bersama'.

Organisasi menurut Kreitner dan Kinicki (2000: 400), yang dimaksud dengan organisasi adalah sistem aktivitas dua orang atau lebih yang dikoordinasi secara sadar. Termasuk dalam aspek koordinasi yang dilakukan dengan sadar dari

definisi ini menurut Kreitner dan Kinicki adalah empat denominator umum dari semua organisasi, yakni: koordinasi usaha, tujuan bersama, pembagian tenaga kerja, dan hierarki wewenang.

Dalam pandangannya, Kreitner dan Kinicki (2000: 400) kemudian memberikan ilustrasi grafis terkait bagan organisasi yang umum digunakan untuk menggambarkan denominator tersebut, yakni sebuah gambar grafis dari wewenang formal dan pembagian hubungan tenaga kerja. Bagi sebagian besar pendapat ahli, istilah bagan organisasi berarti pola kotak-kotak dan garis-garis seperti pohon keluarga yang ditempelkan pada dinding tempat kerja, yang menggambarkan nama dan jabatan tertentu sesuai dengan hierarki dan garis komandonya.

Menurut Bittel dan Newstrom (1990:156) organisasi adalah suatu struktur yang diperoleh dari mengelompokkan orang-orang sehingga mereka dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Newstrom dan Davis (2002:6) memberikan konsep organisasi dalam bentuk struktur organisasi yang menggambarkan hubungan formal diantara pada personil organisasi. Nelson dan Campbel (2006: 494) mendefinisikan struktur organisasi sebagai "*The linking of department and jobs within an organization*".

Sementara itu, Robbins dan Judge (2007: 478) mendefinisikan stuktur organisasi terkait dengan bagaimana tugas-tugas kerja yang secara formal didistribusikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Menurut Robbins and Judge, setidaknya terdapat 6 elemen kunci yang diperlukan bagi seorang manajer ketika mereka akan mendisain sebuah organisasi, yakni: spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi.

Menurut William (2005: 354), struktur organisasi didefinisikan sebagai konfigurasi vertikal dan

horizontal dari berbagai departemen, kewenangan, dan tugas-tugas dalam sebuah organisasi. Lebih lanjut, William berpandangan bahwa proses di dalam organisasi merupakan kumpulan dari berbagai aktivitas yang berfungsi mentransformasi berbagai masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*).

Sedangkan menurut Tossi, Rizzo, dan Carroll (1994:34) yang dimaksud dengan organisasi adalah "... a group of people, working toward objectives, which develops and maintains relatively stable and predictable behavior patterns, even, though the individuals in the organizations in term of how they differ on three dimensions: complexity, formalization, and centralization".

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah departementalisasi fungsi pekerjaan ke dalam bentuk bagan yang menggambarkan rantai komando dan rentang kendali dari masing-masing hierarki tugas dan jabatan, yang secara spesifik memberikan informasi mengenai pembagian kewenangan pada masing-masing level jabatan di setiap fungsi pekerjaan.

Dimensi Organisasi. Rhenald Kasali (2007: 162) berpandangan bahwa organisasi tidak harus selalu dibentuk dalam bagan fungsional, tetapi dapat dibagi-bagi ke dalam pekerjaan yang membutuhkan tim untuk saling bekerjasama. Organisasi fungsional cenderung mengkotak-kotak orang ke dalam fungsi-fungsi. Organisasi yang berbentuk tim dapat dibentuk untuk memudahkan pengaturan *flow*, baik informasi maupun transaksi. Organisasi dalam pandangan ekologis menurut Winardi (2009: 74) harus memiliki kemampuan untuk hidup tumbuh dan berkembang. Ini berarti bahwa organisasi berhasil dalam membangun hubungan dengan lingkungannya dan berhasil pula dalam memberikan kepuasan kepada para pelanggannya. Organisasi perlu didorong untuk selalu melakukan rekayasa terhadap seluruh

tahapan proses dan aktivitasnya, agar mampu berinteraksi dengan lingkungan yang sudah semakin dinamis. Kemampuan organisasi untuk hidup tumbuh dan berkembang di tengah lingkungan yang semakin dinamis tersebut, harus diikuti dengan kemapanaan dan kesiapan sistem pengendalian organisasi.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Indrajit dan Djokopranoto (2002: 50-51) menegaskan beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengerjakan *business process reengineering* menuju organisasi yang tumbuh berkembang dan mapan, yakni sebagai berikut a) Perubahan unit kerja dilakukan dari yang bersifat *functional department* ke *process teams*; b) Perubahan dalam tugas dilakukan dari yang *simple tasks* kepada tugas-tugas yang *multi-dimensional work*; c) Perubahan dalam peran pegawai dilakukan dari yang bersifat *controlled* menjadi *empowered*; d) Perubahan dalam persiapan pelaksanaan tugas dilakukan dari yang bersifat *training* menjadi *education*; e) Pergeseran dalam ukuran kinerja dan kompensasi dilakukan dari yang bersifat *activity* ke arah *result*; f) Perubahan tugas manajer dilakukan dari yang bersifat *supervise* menjadi *coach*; g) Perubahan dalam struktur organisasi dilakukan dengan merubah bentuk struktur organisasi dari yang bersifat *hierarchical* menjadi *flat*; h) Perubahan dalam tugas eksekutif dilakukan dari yang bersifat *scorekeepers* menjadi *leaders*.

Beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi menurut Williams sebagaimana dikutip Rusdiana dan Ghazin (2014:153-155) diantaranya adalah a) Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Dalam hal ini, organisasi dibentuk atas dasar tujuan yang ingin dicapai sehingga tidak mungkin ada organisasi tanpa tujuan; b) Prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai dengan pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan

menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan; c) Prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggungjawab kepada seorang atasan saja; d) Prinsip pendelegasian wewenang. Seorang pimpinan mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya sehingga perlu melakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya; e) Prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggungjawab sepenuhnya kepada atasan; f) Prinsip pembagian pekerjaan. Untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut berjalan optimal, dilakukan pembagian tugas/pekerjaan yang didasarkan pada kemampuan dan keahlian dari tiap-tiap pegawai; g) Prinsip rentang pengendalian. Bahwa seorang bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional; h) Prinsip fungsional. Seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenang, kegiatan, hubungan kerja, serta tanggungjawab pekerjaannya; i) Prinsip pemisahan. Beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggungjawabnya kepada orang lain; j) Prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi harus dilakukan secara proporsional. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan organisasi; k) Prinsip fleksibilitas. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri dan karena adanya pengaruh di luar organisasi, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya; l) Prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi apapun bentuknya, diperlukan kepemimpinan.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kajian ini adalah metode eksplorasi, telaah pengkajian

secara teoretis dan empiris, melakukan *brainstorming*, konsultasi pakar, dan observasi lapangan, yang berkaitan dengan lingkup kajian.

Data yang dibutuhkan terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keahlian dan kemampuan yang mumpuni di bidang terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen internal dan eksternal PDAM TKR Kabupaten Tangerang yang relevan dengan substansi kajian.

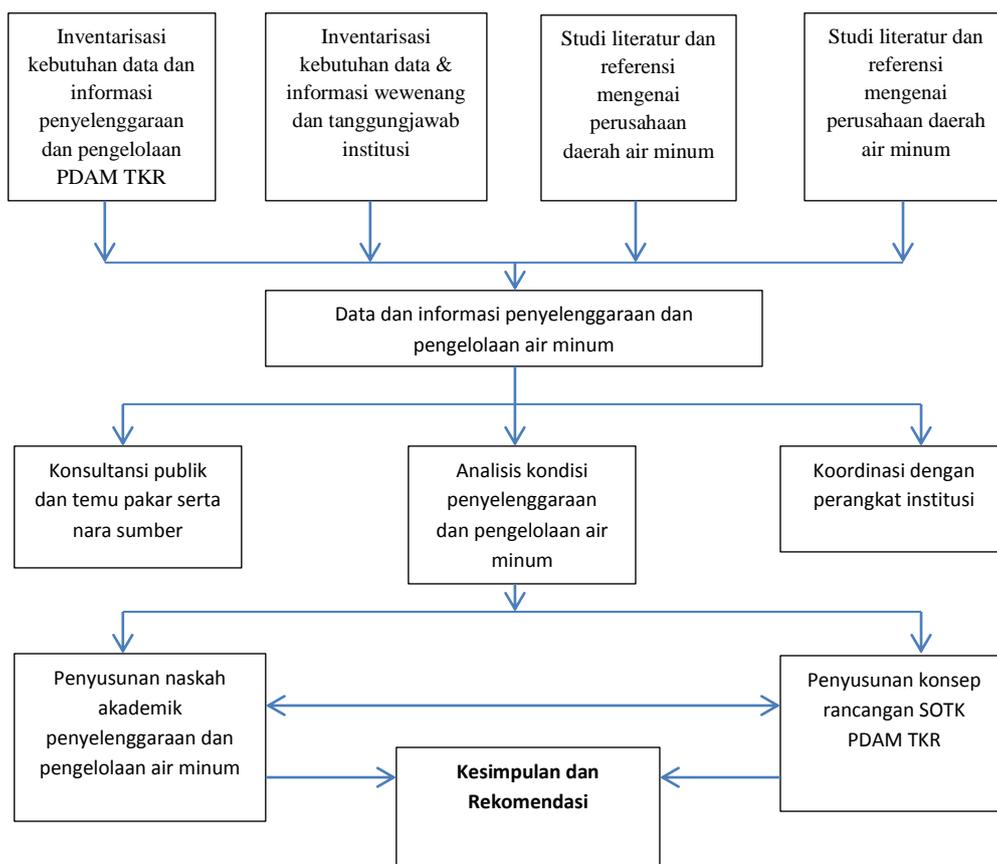
Domain utama jenis data pada kajian ini adalah data yang berasal dari dokumen di wilayah kajian, yang meliputi data tentang struktur organisasi dan tata kerja, jumlah pelanggan secara keseluruhan dan di masing-masing wilayah/cabang, gambaran tentang kondisi di masing-masing wilayah/cabang, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, tingkat pengendalian pekerjaan, indikator dan kriteria keberhasilan masing-masing unit kerja, dan sebagainya, serta peraturan dan kebijakan yang berkaitan substansi kajian. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur di wilayah kajian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian kelembagaan dan klasifikasi wilayah dan cabang PDAM TKR adalah sebagai berikut **a) Desk Study**, dilakukan untuk menginventarisasi data sekunder serta informasi umum mengenai substansi kajian, yang diantaranya meliputi struktur organisasi dan tata kerja PDAM TKR Kabupaten Tangerang, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, uraian jabatan, lingkup kegiatan, pengendalian unit kerja dan sasaran kerja masing-masing bagian, jumlah pelanggan di masing-masing wilayah/ cabang, dsb; **b) Survei Lapangan**, melakukan survei untuk mendapatkan data dan informasi mengenai substansi kajian terutama yang berkaitan dengan rencana perubahan SOTK PDAM TKR Kabupaten Tangerang. Survei

dilaksanakan berdasarkan ketentuan unit kerja yang telah disepakati; c) **Focussed Group Discussion (FGD)**, FGD atau Diskusi Kelompok Terarah dimaksudkan sebagai media interaktif untuk menjangkau data dan informasi yang belum terjangkau melalui daftar pertanyaan. Secara spesifik tujuan FGD adalah untuk: (1) melengkapi data dan informasi yang ada, (2) curah pendapat peserta diskusi, dan (3) membuat rumusan tentang saran tindak lanjut; d) **Wawancara**, dilakukan untuk menggali pendapat dari berbagai sumber yang terkait dengan adanya keinginan untuk melakukan kajian perubahan SOTK PDAM TKR Kabupaten Tangerang serta urgensinya. Kajian ini dilaksanakan di PDAM TKR Kabupaten

Tangerang Jl. Kisamaun 204 Kabupaten Tangerang.

Prosedur kajian kelembagaan dan klasifikasi wilayah dan cabang PDAM TKR Kabupaten Tangerang dalam rangka *review* struktur organisasi dan tata kerja serta klasifikasi wilayah dan cabang meliputi tahapan: inventarisasi dan studi literatur, konsultasi pakar, analisis kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan air minum, penyusunan naskah akademik, dan perancangan struktur organisasi dan tata kerja serta klasifikasi wilayah dan cabang PDAM TKR Kabupaten Tangerang.



Gambar 1. Prosedur Kajian

III. Hasil dan Pembahasan

Keorganisasian PDAM TKR. PDAM TKR yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 10/HUK/1976 tanggal 13 April 1976. PDAM TKR sesungguhnya sudah ada sejak tahun 1923 di bawah penguasaan Pemerintah Hindia Belanda dengan nama *Water Leideng*, yang pada waktu itu berkapasitas 6 ltr/detik dan hanya dikhususnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih para pejabat pemerintah.

Sejalan dengan perkembangan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, maka pengelolaan *Water Leideng* tersebut beralih ke Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang dalam proses selanjutnya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah tersebut di atas yang kemudian diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 tanggal 7 Desember 1987.

Sesuai dengan dinamika yang berkembang di dalam aktivitas operasional perusahaan secara mandiri, maka PDAM TKR kemudian mengukuhkan dirinya sebagai sebagai sebuah perusahaan Pelayanan Publik (*public service*) yang dikelola secara profesional dengan nama PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PDAM TKR Kabupaten Tangerang Nomor 001/SK.41-Litb/98 tanggal 31 Oktober 1998 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 001.690/SK.108-Huk/1999 tanggal 27 Mei 1999.

Semangat otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang nomor 2 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai efektif sejak tahun 2001 yang kemudian dirubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi suatu pijakan utama bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang pada khususnya dalam pengelolaan seluruh potensi sumberdaya alam yang tersedia sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Nuansa kemandirian yang muncul dari semangat otonomi daerah ini telah memberikan tempat yang lebih leluasa kepada PDAM TKR dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat, dengan tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain:

- a) UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998, tentang Pedoman Penyusunan Tarif Air Minum;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998, tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pedoman Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- k) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
- l) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907 Tahun 2002, tentang Kualitas Air Minum;
- m) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyusunan Tarif Air Minum;

- n) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13/HUK/76 Tanggal 13 April 1976 jo Perda Nomor 13 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Minum; diganti Perda Nomor 10 Tahun 2008;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Peran Serta Badan Usaha Swasta dalam Pengelolaan Potensi Daerah.

Kajian Aspek Pengelolaan PDAM TKR. Sampai dengan akhir Mei 2012, jumlah Sambungan Langganan PDAM TKR sudah mencapai sekitar 113.660 SL, dimana target penambahan SL pada tahun 2012 diperkirakan mencapai sekitar 5.000 SL. Ini berarti diperkirakan pada tahun 2012 akan terus bertambah. Di sisi pengembangan IPA, pada tahun 2012 hingga 2013, akan dibangun IPA Cihuni dengan kapasitas sebesar 500 L/D. Ini berarti potensi peningkatan jumlah pelanggan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2013.

Jumlah pelanggan di masing-masing wilayah dan cabang di PDAM TKR berdasarkan data pada Mei 2012 terlihat tidak berimbang, jika dikaitkan antara beban kerja yang harus ditanggung struktur jabatan di satu wilayah/cabang dengan yang lainnya. Jumlah SL di Wilayah Pelayanan II adalah yang tertinggi, yakni mencapai sekitar 41.907 SL. Bandingkan dengan Wilayah Pelayanan I dan II ataupun dengan Cabang, yang hanya kurang lebih setengahnya. Sementara jumlah struktur yang merefleksikan pembagian tugas struktural antara Wilayah/Cabang yang satu dengan yang lainnya adalah sama. Hal ini tentu saja berdampak pada semakin luasnya rentang kendali (*span of control*) yang dimiliki oleh wilayah pelayanan 2, sehingga konsentrasi pelayanan menjadi lebih menyebar dan

proporsi kemungkinan menerima pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pelanggan agak lebih mengecil, dikarenakan jumlah armada di wilayah pelayanan 2 tidak sebanding dengan jumlah pelanggan yang harus dilayani.

Dengan peningkatan jumlah pelanggan hingga diperkirakan mencapai lebih dari 150.000 SL pada tahun 2013, menuntut adanya perubahan strategi organisasi yang lebih mengedepankan aspek peningkatan keunggulan pelayanan melalui strategi “*functional focus*”, “*developing capacity building*”, dan “*Business Process Reengineering*”.

Di samping itu, optimalisasi kerjasama air curah dan peningkatan serta perluasan kerjasama dengan pihak ketiga perlu mendapatkan porsi perhatian yang lebih tinggi. Jika merujuk pada tuntutan dunia usaha yang sudah semakin kompleks dan dinamis, maka diperlukan *strategic focus* melalui rekayasa ulang terhadap *internal business process*, terutama dalam menjawab setiap tantangan melalui strategi pengembangan organisasi dan tata laksana.

Dengan demikian, baik penanganan (pengembangan, peningkatan, dan perluasan pelanggan) di cabang/ wilayah maupun usaha air curah perlu dilakukan secara fokus, sehingga diperlukan rentang kendali dan fungsi koordinasi yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas di cabang/wilayah maupun usaha air curah, mengingat potensi berkembangnya yang sudah semakin cepat.

Dalam konteks ini, perlu dihitung beban kerja maksimal dari suatu Wilayah Pelayanan/Cabang dengan beberapa parameter yang dapat mengukur tingkat kemampuan sebuah wilayah pelayanan/cabang dalam mengelola layanannya secara maksimal. Di samping itu, pembagian kelas wilayah/cabang dan juga kriteria level jabatan perlu dielaborasi, sehingga kaitan antara kelas wilayah/cabang dengan level jabatan dapat sejalan.

Untuk itu perlu dihitung klasifikasi wilayah pelayanan/cabang dan juga level jabatan berdasarkan beberapa parameter yang ditetapkan dan mengacu pada ketentuan yang ada.

wilayah pelayanan dan cabang, ditetapkan beberapa parameter ukuran yang menjadi acuan dalam penentuan kelas wilayah pelayanan dan cabang. Adapun parameter klasifikasi kelas wilayah pelayanan dan cabang ditetapkan sebagai berikut:

Klasifikasi Kelas Wilayah Pelayanan dan Cabang. Untuk menetapkan klasifikasi kelas

Tabel 2. Klasifikasi Wilayah Pelayanan

No	Parameter	Ukuran	Skala Nilai	Bobot
1	Jumlah Sambungan Langganan	≥ Standar Jumlah SL	4	35
		< Standar Jumlah SL	2	
2	<i>Booster</i>	Terdapat <i>Booster</i>	4	20
		Tidak Terdapat <i>Booster</i>	2	
3	Katerakteristik Tempat Tinggal	Dominan Perkampungan	4	15
		Dominan Perumahan	2	
4	Golongan	R3 ke atas dan Industri	4	15
		R2 ke bawah	2	
5	Jumlah Komplain Pelanggan (Per Tahun)	≤ 5% Jumlah SL per tahun	4	15
		> 5% Jumlah SL per tahun	2	

Skoring dan Penilaian Klasifikasi Wilayah

Skor Tertinggi	:	4
Skor Terendah	:	2
Penilaian	:	
- Nilai 2 s/d 3	:	Kelas B
- Nilai 3,1 s/d 4	:	Kelas A

Tabel 3. Klasifikasi Cabang

No	Parameter	Ukuran	Skala Nilai	Bobot
1	Jumlah Sambungan Langganan	≥ Standar Jumlah SL	4	35
		< Standar Jumlah SL	2	
2	IPA	≥ 100 L/S	4	20
		< 100 L/S	2	
3	Katerakteristik Tempat Tinggal	Dominan Perkampungan	4	15
		Dominan Perumahan	2	
4	Golongan	R3 ke atas dan Industri	4	15
		R2 ke bawah	2	
5	Jumlah Komplain Pelanggan (Per Tahun)	≤ 5% Jumlah SL per tahun	4	15
		> 5% Jumlah SL per tahun	2	

Skoring dan Penilaian Klasifikasi Cabang

Skor Tertinggi	:	4
Skor Terendah	:	2
Penilaian	:	
- Nilai 2 s/d 3	:	Kelas B
- Nilai 3,1 s/d 4	:	Kelas A

Koefisien Penentu Jumlah Sambungan Langganan Ideal. Koefisien Penentu Jumlah Sambungan Langganan (ϕ SL) adalah nilai baku standar untuk menentukan jumlah Sambungan Langganan yang paling ideal berdasarkan Kepadatan Penduduk di suatu Wilayah Pelayanan (WP)/Cabang. Formulasi ϕ SL ditentukan sebagaimana berikut:

$$\phi \text{ SL} = \frac{\text{Rata-rata Jumlah Sambungan PDAM TKR}}{\text{Kepadatan Penduduk di WP/Cabang}}$$

Sedangkan formulasi untuk menentukan jumlah SL Ideal di WP/Cabang adalah sebagai berikut:

$$\text{Jumlah SL} = \frac{\text{Kepadatan Penduduk di WP/Cabang}}{\phi \text{ SL}}$$

Untuk mengetahui ϕ SL di WP/Cabang PDAM TKR ditentukan berdasarkan perhitungan sebagaimana tabel 4 berikut:

Tabel 4. Perhitungan ϕ SL di WP/Cabang PDAM TKR

No	Wilayah Pelayanan	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	Jumlah SL	ϕ SL
1	Wilayah Pelayanan I	Tangerang	151.346	9.715	10.893	1,12
		Batuceper	93.893	8.108	4.232	0,52
		Benda	90.275	15.249	1.836	0,12
		Neglasari	108.839	6.434	302	0,05
		Pinang	173.776	7.399	1.475	0,20
2	Wilayah Pelayanan II	Periuk	135.591	13.496	16.715	1,24
		Karawaci	184.157	12.724	7.244	0,57
		Cibodas	143.616	14.944	3.395	0,23
		Pasar Kemis	259.973	9.134	16.102	1,76
3	Wilayah Pelayanan III	Cibodas	143.616	14.944	10.103	0,68
		Karawaci	184.157	12.724	7.320	0,58
		Kelapa Dua	178.035	7.490	9.456	1,26
4	Cabang Serpong	Serpong	127.002	5.283	18.000	3,41
		Serpong Utara	100.118	5.612	26.000	4,63
		Kebon Jeruk	209.122	-	-	-
		Cilandak	172.280	-	-	-
5	Cabang Tiga Raksa	Solear	46.781	2.542	9	0,00
		Balaraja	122.976	3.316	4.952	1,49
		Cisoka	73.433	2.912	66	0,02
		Sukamulya	45.466	2.206	1.009	0,46
6	Cabang Teluk Naga	Tigaraksa	203.764	2.435	577	0,24
		Teluk Naga	91.589	3.412	275	0,08
		Kosambi	140.804	4.427	4.817	1,09
7	IKK Rajeg	Pakuhaji	109.415	1.992	188	0,09
		Rajeg	93.944	2.490	1.654	0,66
8	IKK Kronjo	Kronjo	81.631	1.224	212	0,17
9	IKK Mauk	Mauk	74.497	1.503	167	0,11
10	IKK Kresek	Kresek	65.011	2.330	776	0,33
Standar ϕ SL PDAM TKR Ditetapkan						0,81

Jumlah Sambungan Langganan Ideal.
Berdasarkan standar ϕ SL yang diperoleh dari tabel di atas, maka jumlah sambungan langganan ideal

pada masing-masing Wilayah/Cabang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah sambungan langganan ideal pada masing-masing Wilayah/Cabang

No	Wilayah Pelayanan	Kecamatan	Kepadatan Penduduk	Jumlah SL Eksisting	Jumlah SL Ideal
1	Wilayah Pelayanan I	Tangerang	9.715	10.893	8.161
		Batuceper	8.108	4.232	6.811
		Benda	15.249	1.836	12.809
		Neglasari	6.434	302	5.405
		Pinang	7.399	1.475	6.215
Jumlah SL WP I			18.738	39.401	
2	Wilayah Pelayanan II	Periuk	13.496	16.715	11.337
		Karawaci	12.724	7.244	10.688
		Cibodas	14.944	3.395	12.533
		Pasar Kemis	9.134	16.102	7.673
Jumlah SL WP II			43.456	42.251	
3	Wilayah Pelayanan III	Cibodas	14.944	10.103	12.553
		Karawaci	12.724	7.320	10.688
		Kelapa Dua	7.490	9.456	6.292
Jumlah SL WP III			26.879	29.533	
4	Cabang Serpong	Serpong	5.283	18.000	4.438
		Serpong Utara	5.612	26.000	4.714
		Kebon Jeruk	-	-	-
		Cilandak	-	-	-
Jumlah SL Cabang Serpong			9.076	9.152	
5	Cabang Tiga Raksa	Solear	2.542	9	2.135
		Balaraja	3.316	4.952	2.785
		Cisoka	2.912	66	2.446
		Sukamulya	2.206	1.009	1.853
Jumlah SL Cabang Tiga Raksa			6.613	11.265	
6	Cabang Teluk Naga	Teluk Naga	3.412	275	2.866
		Kosambi	4.427	4.817	3.719
		Pakuhaji	1.992	188	1.673
Jumlah SL Cabang Teluk Naga			5.280	8.258	
7	IKK Rajeg	Rajeg	2.490	1.654	2.092
8	IKK Kronjo	Kronjo	1.224	212	1.028
9	IKK Mauk	Mauk	1.503	167	1.263
10	IKK Kresek	Kresek	2.330	776	1.957

Perhitungan Kelas Wilayah Pelayanan dan Cabang. Berdasarkan data jumlah sambungan langganan dan parameter lainnya sebagaimana

parameter penentuan klasifikasi kelas WP, diperoleh nilai perhitungan sebagai berikut:

Tabel 6. Perhitungan Kelas Wilayah Pelayanan dan Cabang

NO	WILAYAH PELAYANAN	KELAS
1	Wilayah Pelayanan I	B
2	Wilayah Pelayanan II	A
3	Wilayah Pelayanan III	B

Tabel 7. Perhitungan penentuan Kelas Wilayah Pelayanan I

No	Parameter	Ukuran	Skala Nilai	Bobot	Skor	Keterangan
1	Jumlah Sambungan Langganan	\geq Standar Jumlah SL $<$ Standar Jumlah SL	2	35	0,7	Jumlah SL eksisting 18.738, Standar SL 29.533
2	<i>Booster</i>	Terdapat <i>Booster</i> Tidak Terdapat <i>Booster</i>	2	20	0,4	Tidak Terdapat <i>Booster</i>
3	Katerakteristik Tempat Tinggal	Dominan Perkampungan Dominan Perumahan	2	15	0,3	Dominan Perumahan
4	Golongan	R3 ke atas dan Industri R2 ke bawah	4	15	0,6	R3 ke atas dan Industri
5	Jumlah Komplain Pelanggan (Per Tahun)	\leq 5% Jumlah SL per tahun $>$ 5% Jumlah SL per tahun	4	15	0,6	\leq 5% Jumlah SL per tahun
TOTAL SKOR					2,6	KELAS B

Tabel 8. Perhitungan penentuan Kelas Wilayah Pelayanan II

No	Parameter	Ukuran	Skala Nilai	Bobot	Skor	Keterangan
1	Jumlah Sambungan Langganan	\geq Standar Jumlah SL $<$ Standar Jumlah SL	4	35	1,4	Jumlah SL eksisting 43.456, Standar SL 42.451
2	<i>Booster</i>	Terdapat <i>Booster</i> Tidak Terdapat <i>Booster</i>	4	20	0,8	Terdapat <i>Booster</i>
3	Katerakteristik Tempat Tinggal	Dominan Perkampungan Dominan Perumahan	4	15	0,6	Dominan Perkampungan
4	Golongan	R3 ke atas dan Industri R2 ke bawah		15		R2 ke bawah
			2		0,3	
5	Jumlah Komplain Pelanggan (Per Tahun)	\leq 5% Jumlah SL per tahun $>$ 5% Jumlah SL per tahun	4	15	0,6	\leq 5% Jumlah SL per tahun
TOTAL SKOR					3,7	KELAS A

Tabel 9. Perhitungan penentuan Kelas Wilayah Pelayanan III

No	Parameter	Ukuran	Skala Nilai	Bobot	Skor	Keterangan
1	Jumlah Sambungan Langganan	\geq Standar Jumlah SL $<$ Standar Jumlah SL	2	35	0,7	Jumlah SL eksisting 26.879, Standar SL 29.533
2	<i>Booster</i>	Terdapat <i>Booster</i> Tidak Terdapat <i>Booster</i>	2	20	0,4	Tidak Terdapat <i>Booster</i>
3	Katerakteristik Tempat Tinggal	Dominan Perkampungan Dominan Perumahan		15		Dominan Perumahan
			2		0,3	
4	Golongan	R3 ke atas dan Industri R2 ke bawah	4	15	0,6	R3 ke atas dan Industri
5	Jumlah Komplain Pelanggan (Per Tahun)	\leq 5% Jumlah SL per tahun $>$ 5% Jumlah SL per tahun	4	15	0,6	\leq 5% Jumlah SL per tahun
TOTAL SKOR					2,6	KELAS B

Sedangkan penentuan klasifikasi kelas Cabang, dan perhitungan penentuan Kelas Wilayah Pelayanan berdasarkan parameter yang telah

ditetapkan, diperoleh nilai perhitungan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 10. klasifikasi kelas Cabang

NO	WILAYAH PELAYANAN	KELAS
1	Cabang Serpong	B
2	Cabang Tiga Raksa	A
3	Cabang Teluk Naga	B

Tabel 11. Perhitungan Penentuan Kelas Wilayah Pelayanan Cabang Serpong

No	Parameter	Ukuran	Skala Nilai	Bobot	Skor	Keterangan
1	Jumlah Sambungan Langganan	\geq Standar Jumlah SL $<$ Standar Jumlah SL	2	35	0,7	Jumlah SL eksisting 19.076, Standar SL 9.152
2	IPA	Terdapat IPA Tidak Terdapat IPA	4	20	0,8	Terdapat IPA
3	Katerakteristik Tempat Tinggal	Dominan Perkampungan Dominan Perumahan	2	15	0,3	Dominan Perumahan
4	Golongan	R3 ke atas dan Industri R2 ke bawah	4	15	0,6	R3 ke atas dan Industri
5	Jumlah Komplain Pelanggan (Per Tahun)	\leq 5% Jumlah SL per tahun $>$ 5% Jumlah SL per tahun	4	15	0,6	\leq 5% Jumlah SL per tahun
TOTAL SKOR					3,0	KELAS B

Tabel 12. Perhitungan Penentuan Kelas Wilayah Pelayanan Cabang Tiga Raksa

No	Parameter	Ukuran	Skala Nilai	Bobot	Skor	Keterangan
1	Jumlah Sambungan Langganan	\geq Standar Jumlah SL $<$ Standar Jumlah SL	2	35	0,7	Jumlah SL eksisting 6.613, Standar SL 11.265
2	IPA	Terdapat IPA Tidak Terdapat IPA	4	20	0,8	Terdapat IPA
3	Katerakteristik Tempat Tinggal	Dominan Perkampungan Dominan Perumahan	4	15	0,6	Dominan Perkampungan
4	Golongan	R3 ke atas dan Industri R2 ke bawah	2	15	0,3	R2 ke bawah
5	Jumlah Komplain Pelanggan (Per Tahun)	\leq 5% Jumlah SL per tahun $>$ 5% Jumlah SL per tahun	4	15	0,6	\leq 5% Jumlah SL per tahun
TOTAL SKOR					3,0	KELAS B

Tabel 13. Perhitungan Penentuan Kelas Wilayah Pelayanan Cabang Teluk Naga

No	Parameter	Ukuran	Skala Nilai	Bobot	Skor	Keterangan
1	Jumlah Sambungan Langganan	\geq Standar Jumlah SL $<$ Standar Jumlah SL	2	35	0,7	Jumlah SL eksisting 5.280, Standar SL 8.258
2	IPA	Terdapat IPA Tidak Terdapat IPA	4	20	0,8	Terdapat IPA
3	Katerakteristik Tempat Tinggal	Dominan Perkampungan Dominan Perumahan	4	15	0,6	Dominan Perkampungan
4	Golongan	R3 ke atas dan Industri R2 ke bawah	2	15	0,3	R2 ke bawah
5	Jumlah Komplain Pelanggan (Per Tahun)	\leq 5% Jumlah SL per tahun $>$ 5% Jumlah SL per tahun	4	15	0,6	\leq 5% Jumlah SL per tahun
TOTAL SKOR					3,0	KELAS B

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap parameter yang telah ditetapkan dihasilkan klasifikasi wilayah dan cabang di PDAM TKR Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Klasifikasi Wilayah dan Cabang di PDAM TKR berdasarkan Perhitungan Parameter yang telah ditetapkan.

NO	WILAYAH PELAYANAN	KELAS
1	Wilayah Pelayanan I	B
2	Wilayah Pelayanan II	A
3	Wilayah Pelayanan III	B
1	Cabang Serpong	B
2	Cabang Tiga Raksa	A
3	Cabang Teluk Naga	B

Berdasarkan hasil kajian terhadap aspek kelembagaan dan klasifikasi dapat disimpulkan beberapa hal, yakni sebagai berikut 1) Peningkatan jumlah pelanggan hingga diperkirakan mencapai lebih dari 150.000 SL pada tahun 2013, menuntut adanya perubahan strategi organisasi yang lebih mengedepankan aspek peningkatan keunggulan pelayanan melalui strategi “*functional focus*”, “*developing capacity building*”, dan “*Business Process Reengineering*”; 2) Baik penanganan (pengembangan, peningkatan, dan perluasan pelanggan) di cabang/wilayah maupun UAC perlu dilakukan secara fokus, sehingga diperlukan rentang kendali dan fungsi koordinasi yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas di cabang/wilayah maupun UAC, mengingat potensi berkembangnya yang sudah semakin cepat; 3) Perlu dibentuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sebagai respons atas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa secara profesional, mandiri, dan akuntabel; 4) Klasifikasi terhadap wilayah dan cabang PDAM TKR Kabupaten Tangerang perlu dilakukan dengan melakukan penghitungan terhadap beban kerja maksimal pada suatu Wilayah Pelayanan atau

Cabang dengan beberapa parameter yang dapat mengukur tingkat kemampuan sebuah wilayah pelayanan/cabang dalam mengelola layanannya secara maksimal.

Daftar Acuan

Bittel, Lester R, dan John W. Newstrom. 1990. *Pedoman bagi Penyelia-Manajemen Kepenyeliaan, Perencanaan dan Pengendalian, Pengorganisasian dan Pelatihan, Menggiatkan Armada Kerja*. Penerjemah Bambang Hartono. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo

Kretiner, Robert dan Angelo Kinicki. 2000. *Perilaku Organisasi*. Buku 2 Edisi 5. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: McGraw-Hill-Penerbit Salemba Empat

Nelson, Debra L., and James Campbell Quick. 2006. *Organizational Behavior-Foundation, Realities, & Challenge*. International Student Edition. South-Western: Thomson

Newstrom, John W., and Keith Davis. 2002. *Organizational Behavior-Human Behavior at Work*. International Edition. McGraw-Hill Irwin

Kasali, Rhenald. 2007. *Re-Code Your Change DNA - Membebaskan Belenggu-belenggu untuk Meraih Keberanian dan Keberhasilan dalam Pembaharuan*. Jakarta: PT. Gramedia

Indrajit, Richardus Eko dan Richardus Djokopranoto. 2002. *Konsep dan Aplikasi Business Process Reengineering - Strategi Meningkatkan Kinerja Bisnis secara Dramatis dan Signifikan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. 2007. *Organizational Behavior*. Pearson International Edition. Twelfth Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall

Rusdiana dan Ahmad Ghazin. 2014. *Asas-asas Manajemen Berwawasan Global*. Cetakan Ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia

Tossi, H. L., JR. Rizzo, and SJ. Carrol. 1994. *Managing Organizational Behavior*. Third Edition. Cambridge: Blackwell

Williams, Chuck. 2005. *Management*. International Student Edition. South- Western, USA: Thomson Corporation

Winardi. 2009. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Cetakan ke-3. Jakarta: Prenada Media Group

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13/HUK/76 Tanggal 13 April 1976 jo Perda Nomor 13 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Minum; diganti Perda Nomor 10 Tahun 2008;

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Peran Serta Badan Usaha Swasta dalam Pengelolaan Potensi Daerah; Profil Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja.

Gaji, Lingkungan dan Fasilitas Sebagai Anteseden dari Intensitas *Turn Over*, Dimediasi oleh Kepuasan Kerja

Rinaldy Arifin Siregar, Gofur Ahmad, Suhendar Sulaeman¹

¹Dosen Tetap Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang, Indonesia

¹e-mail: mmumjcirendeu@yahoo.co.id

Abstrak

Kemajuan suatu perusahaan amat tergantung dari Sumber Daya Manusia produktif yang dimilikinya. Untuk itu, sebuah perusahaan harus mampu menjaga SDM produktif yang dimilikinya agar tidak melakukan tindakan perpindahan kerja (*Turn Over*). Untuk dapat menghindari *Turn Over* perusahaan harus mampu menjaga Kepuasan Kerja Karyawan melalui Gaji, Fasilitas, dan Lingkungan Kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan faktor-faktor tersebut mempengaruhi *Turn Over*. Objek penelitian yang diambil adalah perusahaan perkebunan PT TPS Agro dengan jumlah sampel sebanyak 130 sampel. Dengan metodologi penelitian *Structural Equation Modelling* dapat diketahui bahwa variabel gaji memberikan hubungan positif terhadap kepuasan kerja dengan koefisien korelasi sebesar 1.502. selanjutnya variabel kepuasan kerja memberikan hubungan negatif terhadap *Turn Over* dengan koefisien korelasi sebesar -0.753. Kemudian pengaruh variabel gaji terhadap *Turn Over* secara tidak langsung menghasilkan hubungan negatif terhadap *Turn Over* sebesar -1.130. Dari hasil penelitian ini dapat diintrepassikan bahwa kepuasan kerja yang tinggi akan menyebabkan rendahnya *Turn Over* pada karyawan PT. TPS Agro, untuk tercapainya peningkatan kepuasan kerja dilakukan dengan peningkatan gaji, yang selanjutnya akan menurunkan *Turn Over*.

Salaries, Environmental, and Facilities as Antecedent of Intensity Turn Over, Mediated by Job Satisfaction

Abstract

The progress of a company is very dependent on Human Resources productive assets. Therefore, a company must be able to maintain its productive human resources so as not to transfer employment action (*Turn Over*). In order to avoid the *Turn Over* company should be able to maintain the Employee Satisfaction through Salary, Facilities and Work Environment. This study was conducted to determine how the relationship of these factors influence *Turn Over*. The object of research is taken TPS plantation company PT Agro to the sample size of 130 samples. With Equation Structural Modeling methodology research can be seen that the variable salary giving a positive relationship to job satisfaction with a correlation coefficient of 1.502. next job satisfaction variables provide a negative relationship to *Turn Over* with a correlation coefficient of -0.753. Then the effect of the variable salary to *Turn Over* indirectly result in a negative relationship to the *Turn Over* of -1.130. From the results of this study can diintrepassikan that high job satisfaction will lead to low tun over the employees of PT. TPS Agro, to achieve an increase in job satisfaction dilukan with salary increases, which in turn will lower *Turn Over*.

Keywords: facility work, job satisfaction, payroll, *Turn Over*, work environment.

I. Pendahuluan

Perusahaan sering sekali melupakan bahwa sumber daya manusia yang dimilikinya ialah asset perusahaan. Kemajuan atau kemunduran suatu

perusahaan sedikit banyak ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia. Penting bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan sumber daya manusia yang dimilikinya. Diperlukan cara dan upaya untuk mendorong setiap tenaga kerja

agar bekerja sebaik mungkin di bidangnya masing-masing. Tingkat kinerja karyawan merupakan hasil proses yang kompleks, baik berasal dari diri pribadi karyawan (*internal factor*) maupun upaya strategis dari perusahaan. Faktor-faktor internal misalnya motivasi, pemberian gaji dan tunjangan, dan lain-lain sementara contoh faktor eksternal adalah lingkungan fisik dan non fisik perusahaan, pelatihan dan pengembangan karyawan. Kinerja karyawan yang baik tentu saja merupakan harapan bagi semua perusahaan dan institusi yang mempekerjakan karyawan, sebab kinerja karyawan ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan hasil output perusahaan secara keseluruhan.

Masalah prestasi kerja karyawan berkaitan dengan masalah terpenuhi atau tidaknya kebutuhan seseorang dan puasnya seseorang atau tidak. Untuk mendapatkan kepuasan tersebut ada harga yang harus dibayar perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Hal tersebut bisa berupa pemberian gaji, Lingkungan kerja dan Fasilitas. Keberhasilan sebuah perusahaan bukan hanya tergantung dari permodalan secara riil yaitu berbentuk uang, namun salah satu hal yang juga berpengaruh adalah sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut. Sebab semua bahan baku dan mesin produksi yang dimiliki perusahaan tidak

akan dapat bekerja tanpa adanya ide dan kreativitas dari para karyawan, yang tersebar dalam berbagai divisi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apabila tugas dan tanggung jawab para karyawan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, apalagi apabila produktivitas yang mereka raih dapat tercapai semaksimal mungkin maka dapat dipastikan lebih dari separuh roda perusahaan itu telah berputar dengan baik. Selebihnya menjadi bagian dari penerimaan pasar akan produk yang menjadi output perusahaan. Sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan, dan sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan akhir suatu perusahaan.

Turn over/ keluarnya karyawan berprestasi rendah dalam suatu perusahaan akan bermanfaat positif bagi organisasi, namun dengan keluarnya sumber daya manusia (karyawan) yang berpotensi akan merugikan perusahaan, sumber daya manusia yang berprestasi akan mengundang perusahaan melakukan usaha dan mengeluarkan banyak biaya untuk merekrut karyawan baru agar mengisi posisi yang kosong. Tabel di bawah ini menjelaskan rincian pegawai PTPN IV yang masuk dan yang keluar selama bulan Januari 2012 – Juli 2012.

Tabel 1. Pegawai PTPN IV masuk dan keluar

Bulan	Karyawan Keluar	Karyawan Masuk
Januari	-	-
Februari	1	-
Maret	3	2
April	2	-
Mei	1	-
Juni	2	1
Juli	2	-

Sumber : Personalia PTPN IV

Tabel 1 menjelaskan bahwa banyaknya pegawai yang keluar dari perusahaan yang jumlahnya tidak

sebanding dengan jumlah karyawan yang masuk perusahaan. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat

Turn Over perusahaan yang diakibatkan oleh rendahnya gaji, upah, dan tunjangan. Rendahnya gaji, upah, dan tunjangan mengakibatkan lemahnya kinerja karyawan yang berujung pada keluarnya karyawan dari perusahaan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

Perusahaan ingin mengetahui seberapa besar faktor gaji, upah, dan tunjangan mempengaruhi kinerja karyawan dengan harapan perusahaan akan dapat meningkatkan kembali kinerja karyawan. Perbedaan gaji dan upah dalam perusahaan ini ialah gaji untuk karyawan tetap sedangkan upah untuk karyawan *outsourcing*.

Kepuasan Kerja. Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2001:271) kepuasan kerja adalah suatu efektifitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Davis (2002: 106) mendeskripsikan kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Menurut Robbins (2003:78) kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima.

Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek pekerjaan dan

tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Kepuasan Kerja merupakan sikap (*positif*) tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya, penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada tidak menyukainya.

Menurut Martoyo (2007:156), kepuasan kerja adalah keadaan emosional karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dari perusahaan/organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Begitu penting peranan kepuasan kerja bagi setiap karyawan, tidak hanya semata-mata dapat meningkatkan gairah kerja karyawan namun juga jika karyawan sudah merasa puas dalam bekerja maka karyawan akan berupaya semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang dimiliki karyawan dalam menyelesaikan tugasnya.

Perasaan-perasaan yang berhubungan dengan kepuasan dan ketidakpuasan kerja cenderung mencerminkan penaksiran dari tenaga kerja tentang pengalaman-pengalaman kerja pada waktu sekarang dan lampau daripada harapan-harapan untuk masa depan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat dua unsur penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan dasar.

Nilai-nilai pekerjaan merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan tugas pekerjaan. Yang ingin dicapai ialah nilai-nilai pekerjaan yang dianggap penting oleh individu. Dikatakan selanjutnya bahwa nilai-nilai pekerjaan harus sesuai atau membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja

merupakan hasil dari tenaga kerja yang berkaitan dengan motivasi kerja.

Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi seorang individu adalah jumlah dari kepuasan kerja (dari setiap aspek pekerjaan) dikalikan dengan derajat pentingnya aspek pekerjaan bagi individu. Seorang individu akan merasa puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya merupakan sesuatu yang bersifat pribadi, yaitu tergantung bagaimana ia mempersepsikan adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginan-keinginannya dengan hasil keluarannya (yang didapatnya).

Sehingga dapat disimpulkan pengertian kepuasan kerja adalah sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan.

Kompensasi finansial adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Boone dan Kurtz (2009:327) menyatakan Kompensasi finansial adalah penghargaan atau ganjaran dalam bentuk uang yang mencakup upah (*wage*) dan gaji (*salary*) di tambah dengan tunjangan-tunjangan (*benefit*). Pemberian kompensasi finansial yang layak dan sesuai dengan beban kerja yang di pikul karyawan selain dapat membantu menunjang kehidupan karyawan, karyawan pun menjadi akan merasa lebih dihargai dalam bekerja.

Erbasi dan Arat (2012:212) menyimpulkan bahwa jika program kompensasi dirasa adil dan kompetitif dilakukan oleh perusahaan, akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat sebagian orang lebih puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa lainnya. Teori ini juga mencari landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan kerja. Ada beberapa teori tentang kepuasan kerja yaitu a) *Two Factor Theory*, teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan

ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda yaitu *motivators* dan *hygiene factors*. Ketidakpuasan dihubungkan dengan kondisi disekitar pekerjaan (seperti kondisi kerja, upah, keamanan, kualitas pengawasan dan hubungan dengan orang lain) dan bukan dengan pekerjaan itu sendiri. Karena faktor mencegah reaksi negatif dinamakan sebagai *hygiene* atau *maintainance factors*. Sebaliknya kepuasan ditarik dari faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri atau hasil langsung daripadanya seperti sifat pekerjaan, prestasi dalam pekerjaan, peluang promosi dan kesempatan untuk pengembangan diri dan pengakuan. Karena faktor ini berkaitan dengan tingkat kepuasan kerja tinggi dinamakan *motivators*. b) *Value Theory*, menurut teori ini kepuasan kerja terjadi pada tingkatan dimana hasil pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Semakin banyak orang menerima hasil, akan semakin puas dan sebaliknya. Kunci menuju kepuasan pada teori ini adalah perbedaan antara aspek pekerjaan yang dimiliki dengan yang diinginkan seseorang. Semakin besar perbedaan, semakin rendah kepuasan orang.

Gaji atau upah (*pay*). Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak. Gaji merupakan bentuk kompensasi, yaitu manfaat jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang karyawan. Seseorang akan menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat. Di lihat dari jangka waktu penerimaannya, gaji pada umumnya diberikan setiap bulan (Siswanto, 2010: 53). Menurut Notoadmodjo (2010: 101) dijelaskan bahwa sistem upah yang baik perlu memenuhi syarat 1). Adil bagi pekerja dan pimpinan perusahaan, artinya karyawan jangan sampai dijadikan alat pemerasan dalam mengejar angka-angka produksi karyawan. 2). Sistem upah sebaiknya bisa mempunyai potensi untuk mendorong semangat kerja karyawan dalam produktivitas kerja. 3). Selain upah dasar (*standard*) perlu disediakan pula upah perangsang

sebagai imbalan tenaga yang dikeluarkan oleh karyawan. 4). Sistem upah sebaiknya harus mudah dimengerti artinya jangan berbelit-belit sehingga karyawan akan sulit memahaminya. Ini penting untuk menghilangkan adanya kesan prasangka bagi karyawan terhadap perusahaan.

Gaji dapat mendorong tercapainya produktivitas karyawan yang tinggi, maka gaji harus memenuhi syarat-syarat (Sujak, 2010:150-155) sebagai berikut a) Gaji harus dapat memenuhi kebutuhan minimum karyawan Perusahaan hendaknya berusaha agar gaji terendah yang diberikan kepada karyawan dapat memenuhi kebutuhan mereka secara minimum. b) Gaji harus dapat mengikat karyawan Untuk dapat menentukan gaji yang mengikat, perusahaan harus mengetahui besarnya gaji yang diberikan oleh perusahaan lain. Pekerjaan yang sama atau sejenis bahkan bisa memungkinkan dapat diberikan lebih tinggi. c) Gaji harus dapat menimbulkan semangat dan gairah kerja karyawan Gaji yang mampu mengikat karyawan belum tentu menimbulkan semangat dan kegairahan kerja bagi karyawan. Bila karyawan merasa bahwa gaji yang diterima masih kurang layak, karyawan mungkin akan bekerja lagi diluar perusahaan untuk menambah penghasilan. Hal ini berpengaruh terhadap mental dan kedisiplinan kerja yang menurun. d) Gaji harus adil. Pengupahan yang tepat tidak semata-mata karena jumlahnya saja tetapi harus mengandung unsur -unsur keadilan. Adil disini adalah sesuai dengan haknya.

Menurut Panggabean (2010:92) syarat gaji tersebut adalah 1) Sederhana, peraturan dari sistem insentif harus singkat, jelas dan dapat dimengerti. 2) Spesifik, karyawan harus mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan untuk mereka lakukan. 3) Dapat dicapai, setiap karyawan mempunyai kesempatan yang masuk akal untuk memperoleh sesuatu. 4) Dapat diukur, sasaran yang dapat diukur merupakan dasar untuk menentukan rencana insentif. Program dolar akan sia-sia (dan program evaluasi akan terhambat), jika prestasi

tertentu tidak dapat dikaitkan dengan dolar yang dibelanjakan.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas. Orang berpendapat bahwa produktivitas dapat dinaikkan dengan meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja mungkin merupakan akibat dari produktivitas atau sebaliknya. Produktivitas yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja hanya jika tenaga kerja mempersepsikan bahwa apa yang telah dicapai perusahaan sesuai dengan apa yang mereka terima (gaji/upah) yaitu adil dan wajar serta diasosiasikan dengan performa kerja yang unggul. Dengan kata lain bahwa performansi kerja menunjukkan tingkat kepuasan kerja seorang pekerja, karena perusahaan dapat mengetahui aspek-aspek pekerjaan dari tingkat keberhasilan yang diharapkan.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Ketidakhadiran (*Absenteeism*). Menurut Porter dan Steers, ketidakhadiran sifatnya lebih spontan dan kurang mencerminkan ketidakpuasan kerja. Tidak adanya hubungan antara kepuasan kerja dengan ketidakhadiran. Karena ada dua faktor dalam perilaku hadir yaitu motivasi untuk hadir dan kemampuan untuk hadir. Sementara itu menurut Wibowo (2007:312) antara kepuasan dan ketidakhadiran/kemangkiran menunjukkan korelasi negatif. Sebagai contoh perusahaan memberikan cuti sakit atau cuti kerja dengan bebas tanpa sanksi atau denda termasuk kepada pekerja yang sangat puas.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Keluarnya Pekerja (*Turn Over*). Sedangkan berhenti atau keluar dari pekerjaan mempunyai akibat ekonomis yang besar, maka besar kemungkinannya berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Menurut Robbins (2003), ketidakpuasan kerja pada pekerja dapat diungkapkan dalam berbagai cara misalnya selain dengan meninggalkan pekerjaan, mengeluh,

membangkok, mencuri barang milik perusahaan/organisasi, menghindari sebagian tanggung jawab pekerjaan mereka dan lainnya.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Respon terhadap Ketidakpuasan Kerja. Menurut Robbins (2003: 346) ada empat cara tenaga kerja mengungkapkan ketidakpuasan yaitu a) Keluar (*Exit*) yaitu meninggalkan pekerjaan termasuk mencari pekerjaan lain. b) Menyuarakan (*Voice*) yaitu memberikan saran perbaikan dan mendiskusikan masalah dengan atasan untuk memperbaiki kondisi. c) Mengabaikan (*Neglect*) yaitu sikap dengan membiarkan keadaan menjadi lebih buruk seperti sering absen atau semakin sering membuat kesalahan. d) Kesetiaan (*loyalty*) yaitu menunggu secara pasif sampai kondisi menjadi lebih baik termasuk membela perusahaan terhadap kritik dari luar.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Meningkatkan Kepuasan Kerja. Menurut Riggio (2005: 107), peningkatan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut a) Melakukan perubahan struktur kerja, misalnya dengan melakukan perputaran pekerjaan (*job rotation*), yaitu sebuah sistem perubahan pekerjaan dari salah satu tipe tugas ke tugas yang lainnya yang (disesuaikan dengan *job description*). Cara kedua yang harus dilakukan adalah dengan pemekaran (*job enlargement*), atau perluasan satu pekerjaan sebagai tambahan dan bermacam-macam tugas pekerjaan. Praktik untuk para pekerja yang menerima tugas- tugas tambahan dan bervariasi dalam usaha untuk membuat mereka merasakan bahwa mereka adalah lebih dari sekedar anggota dari organisasi. b) Melakukan perubahan struktur pembayaran, perubahan sistem pembayaran ini dilakukan dengan berdasarkan pada keahliannya (*skill-based pay*), yaitu pembayaran dimana para pekerja digaji berdasarkan pengetahuan dan keterampilannya daripada posisinya di perusahaan. Pembayaran kedua dilakukan berdasarkan jasanya (*merit pay*), sistem pembayaran dimana pekerja

digaji berdasarkan *performancenya*, pencapaian finansial pekerja berdasarkan pada hasil yang dicapai oleh individu itu sendiri. Pembayaran yang ketiga adalah *Gain sharing* atau pembayaran berdasarkan pada keberhasilan kelompok (keuntungan dibagi kepada seluruh anggota kelompok). c) Pemberian jadwal kerja yang fleksibel, dengan memberikan kontrol pada para pekerja mengenai pekerjaan sehari-hari mereka, yang sangat penting untuk mereka yang bekerja di daerah padat, dimana pekerja tidak bisa bekerja tepat waktu atau untuk mereka yang mempunyai tanggung jawab pada anak-anak. *Compressed work week* (pekerjaan mingguan yang dipadatkan), dimana jumlah pekerjaan per harinya dikurangi sedang jumlah jam pekerjaan per hari ditingkatkan. Para pekerja dapat memadatkan pekerjaannya yang hanya dilakukan dari hari Senin hingga Jum'at, sehingga mereka dapat memiliki waktu longgar untuk liburan. Cara yang kedua adalah dengan sistem penjadwalan dimana seorang pekerja menjalankan sejumlah jam khusus per minggu (*Flexitime*), tetapi tetap mempunyai fleksibilitas kapan mulai dan mengakhiri pekerjaannya. d) Mengadakan program yang mendukung, perusahaan mengadakan program-program yang dirasakan dapat meningkatkan kepuasan kerja para karyawan, seperti; *health center*, *profit sharing*, dan *employee sponsored child care*.

Faktor Kepuasan Kerja Terhadap Turn over Karyawan. Selama ini kepuasan kerja telah diidentifikasi sebagai variabel yang memiliki keterkaitan dengan kinerja. Penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja (Nazir, 2009:32). Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan juga bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi penyelia, rekan sekerja, tanggung jawab, situasi kerja, pengakuan terhadap hasil kerja, dan kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan (Gibson, 2000:276).

Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Kepuasan dalam pekerjaan didefinisikan sebagai kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja. Sementara kepuasan kerja di luar pekerjaan adalah kepuasan yang dinikmati di luar pekerjaan dengan besarnya balas jasa yang akan diterima dari hasil kerjanya agar dapat memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, kombinasi kepuasan dalam dan luar pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas jasa dengan pelaksanaan pekerjaannya (Dessler, 2009:98)

Namun seringkali dalam perusahaan ada karyawan yang tidak mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan karena adanya keinginan untuk pindah ke perusahaan lain. Hal ini menyebabkan tingkat *Turn Over intentions* (keluar masuknya) karyawan dalam lingkungan operasional perusahaan sering terjadi. *Turn Over intentions* merupakan kejadian yang seringkali terdapat di perusahaan. Seperti halnya perekrutan karyawan yang terus berjalan, baik perekrutan karena faktor produktivitas karyawan yang telah menurun disebabkan faktor umur maupun perekrutan karyawan karena faktor pengunduran diri. Penggantian karyawan yang mengalami produktivitas menurun karena faktor umur dapat diantisipasi oleh perusahaan dengan menyiapkan kader-kader muda potensial untuk menggantikan. Sedangkan untuk karyawan bukan lagi faktor umur tetapi pengunduran diri maka tentu saja menyulitkan bagi perusahaan karena berkaitan dengan implementasi program kerja yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2003) yang dilakukan di PT. Sentra Media Komunika Surabaya menunjukkan *Turn Over intentions* berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. Sentra Media Komunika Surabaya. Tingkat *Turn Over intentions* karyawan cenderung rendah, karena rata-rata karyawan cukup puas dan bahkan puas dengan pekerjaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunjoyo dan Harsono (2003) di Kantor Akuntan Publik di Bandung, Surabaya, dan Jakarta yang fokus penelitiannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi *Turn Over intentions* menunjukkan bahwa hanya faktor kepuasan kerja saja yang mempengaruhi *Turn Over intentions* sementara ketiga dimensi dalam komitmen organisasi yang terdiri dari afektif, *continuance*, dan normatif tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lilie Lum, John Kervin, Kathleen, Frank Reid dan Wendy Sirola dari *Journal Of Organizational Behavior*, vol. 19, 305 – 320, 1998, dengan judul *Explaining Nursing Turn Over Intent, Job Satisfaction or Orgzational Commitment ?*. Pada penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan saat ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Turn Over Intentions* (niat berpindah) para perawat khususnya tentang peranan kebijakan pembayaran gaji, pembayaran gaji dan juga permasalahan penawaran dan permintaan yang dipengaruhi oleh bursa tenaga kerja serta persepsi atau pandangan pegawai, sebelumnya telah diidentifikasi sebagai faktor determinan dari *Job Satisfaction*, *Organizational Commitment* dan perilaku *Turn Over Intentions* (niat berpindah).

Penelitian yang dilakukan oleh Thomas M. Begley dan Joseph M. Czajka dari *Journal of Applied Psychology*, vol 78, No.4, 552 – 556, 1993, dengan judul *Panel Analysis Of Moderating Effects Of Commitment On Job Satisfaction, Intent To Quit, and Health Following Organizational change*. Pada penelitian ini menguji bahwa *organizational*

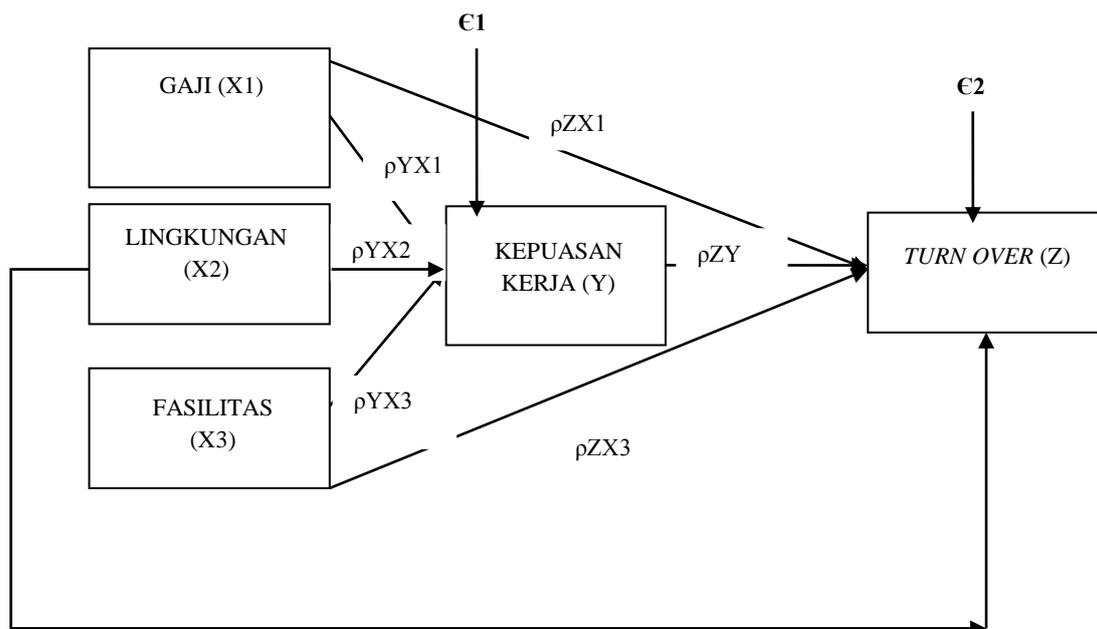
commitment (komitmen organisasi) atas pekerja yang menghadapi konsolidasi (mengikuti perubahan organisasi) unit kerja dari kemungkinan pengurangan staf. Untuk studi ini mengukur komitmen pekerjaan sebelum terjadinya konsolidasi & sebagai tambahan penelitian ini juga mengevaluasi *Job Satisfaction* (kepuasan kerja), *Intent to Quit* (keinginan untuk keluar) dan status kesehatan pada periode jangka waktu tertentu. Hasil dari penelitian ini bahwa *Organizational Commitment* secara signifikan berpengaruh terhadap kombinasi mengenai kenyamanan bekerja yaitu: *Job Satisfaction* (kepuasan kerja), *Intent to Quit* (keinginan untuk keluar) dan rasa kemarahan dalam pekerjaan. Penelitian tersebut mengambil kasus pada staf Rumah Sakit Umum dan Rumah sakit jiwa di Midwestern.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suwandi dan Kawan – kawan dari Universitas Gajahmada dengan judul Pengujian Model *Turn Over* Pasework dan Strawser: studi empiris pada Lingkungan Akuntansi Publik (*Journal Riset Akuntansi Publik*, Vol.2 No.2, Juli 1999, hal. 173 – 195). Penelitian ini dilakukan untuk menguji konsistensi model Pasework dan Strawser (1996), dengan menggunakan sampel staf akuntan di KAP Indonesia, berusaha mencari landasan konseptual yang lebih banyak tentang konstruk *Job Insecurity* dan mencari landasan konseptual yang lebih banyak tentang konstruk *Job-Insecurity* dan mencari kesesuaian dengan model *Turn Over*. Dalam mengidentifikasi faktor–faktor yang mempengaruhi *Turn Over* di dunia akuntan publik mengemukakan model *Turn Over* baru berdasarkan model *Job-Insecurity* yang dikembangkan oleh Ashford et. Al (1989). Model ini menyertakan variabel *Job Satisfaction* (kepuasan kerja) dan *Organizational Commitment* (komitmen organisasional) sebagai variabel

pendahuluan (*antecedent*) dari niat berpindah (*Turn Over Intention*).

Penelitian yang dilakukan oleh Charlie, G.T dan kawan kawan dari *Journal of Applied Psychology*, Vol.82, No.1, 1997, dengan judul *Voluntary Turn Over and Job Performance: Carvelinnearity and The Moderating Influency of Salary Growth and Promotions*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Turn Over* karyawan yang tinggi disebabkan oleh adanya sistem penggajian yang kurang memadai. Kebalikannya karena efek negatif dari pertumbuhan penggajian pada *Turn Over* karyawan, dimana sistem penggajian yang memadai menyebabkan rendahnya tingkat *Turn Over* karyawan. Pada penelitian ini juga terdapat usulan penelitian yang akan datang bahwa hubungannya antara perbuatan karyawan dan dorongan akan *Turn Over* adalah membentuk kurva linear, disimpulkan bahwa tinggi dan rendahnya perubahan menunjukkan besarnya *Turn Over* dari rata–rata perubahan.

Kerangka Pemikiran. Pada hal ini didapati suatu pemikiran bahwa terdapat suatu a) pengaruh antara faktor gaji terhadap kepuasan karyawan PT TPS agro. Juga terdapat b) pengaruh lingkungan terhadap kepuasan kerja karyawan PT TPS agro. Terdapat c) pengaruh faktor fasilitas terhadap kepuasan kerja karyawan PT TPS agro. Bahwa terdapat pengaruh d) kepuasan kerja karyawan terhadap keinginan keluar karyawan PT TPS agro. Bahwa terdapat e) pengaruh faktor gaji terhadap keinginan keluar karyawan PT TPS agro. Adanya suatu pemahaman bahwa terdapat f) pengaruh faktor lingkungan terhadap keinginan keluar karyawan PT TPS agro. Serta terdapat g) pengaruh faktor fasilitas terhadap keinginan keluar karyawan PT TPS agro.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis. Berdasarkan kerangka konseptual maka hipotesis secara parsial sebagai berikut :

- H1 : Ada pengaruh Gaji dengan kepuasan kerja karyawan perkebunan PT TPS AGRO.
- H2 : Ada pengaruh antara Lingkungan dengan kepuasan kerja karyawan perkebunan PT TPS AGRO
- H3 : Ada pengaruh antara Fasilitas yang mendukung dengan kepuasan kerja karyawan perkebunan PT TPS AGRO
- H4 : Ada pengaruh antara faktor gaji dengan keinginan karyawan perkebunan PT TPS AGRO untuk pindah kerja
- H5 : Ada pengaruh antara faktor lingkungan kerja dengan keinginan karyawan perkebunan PT TPS AGRO untuk pindah kerja
- H6 : Ada pengaruh antara faktor fasilitas dengan keinginan karyawan perkebunan PT TPS AGRO untuk pindah kerja
- H7 : Ada pengaruh antara kepuasan kerja dengan keinginan karyawan untuk pindah kerja (*Turn Over*)

II. Metode Penelitian

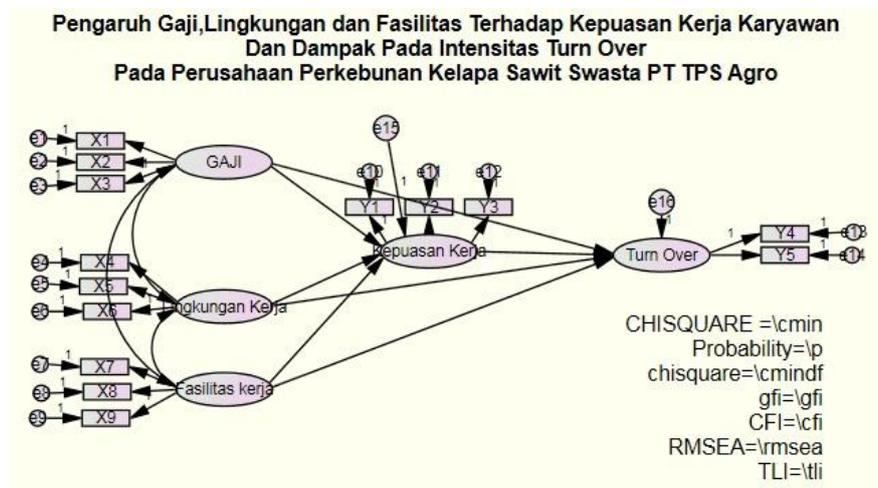
Metode Penelitian yang digunakan adalah survei, dengan menggunakan instrumen angket dan kuisioner dan teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis jalur.

Untuk melakukan teknik analisa jalur, peneliti akan menggunakan metode *Structural Equation Modelling* (SEM). *Structural Equation Modeling* (SEM) atau model persamaan struktural merupakan analisis multivariat yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara kompleks. Analisis data dengan menggunakan SEM berfungsi untuk menjelaskan secara menyeluruh hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. Syarat utama menggunakan SEM adalah membangun suatu model hipotesis yang terdiri dari model struktural dan model pengukuran dalam bentuk diagram jalur. SEM merupakan sekumpulan teknik–teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan secara simultan.

Populasi dari penelitian ini adalah Karyawan PT TIGA PILAR SEJAHTERA AGRO hingga tahun 2012. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling* yakni suatu sample yang ditarik sedemikian rupa dimana suatu elemen (unsur) dari populasi, tidak didasarkan pada pertimbangan pribadi tetapi tergantung kepada aplikasi kemungkinan (probabilitas) (Nazir,2005). Maka untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel maka dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* hal ini dikarenakan anggota populasi yang dianggap

homogen (sejenis) yakni karyawan perkebunan PT TPS Agro sejumlah 130 orang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alasan menggunakan pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran umum yang lebih objektif dan terukur. Jenis penelitian ini adalah non-eksperimental sebab tidak ada perlakuan khusus pada responden karena itu diteliti apa adanya. Selanjutnya gambaran desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Penggambaran Desain Penelitian

Digunakan juga metode *single cross-sectional design* karena untuk pengumpulan data dari setiap elemen populasinya dilakukan satu kali dalam satu periode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer. Peneliti melakukan wawancara terhadap karyawan PT TPS Agro. Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Untuk menguji hipotesis penelitian mengenai hubungan antara faktor-faktor kepuasan kerja yang mempengaruhi kinerja karyawan PT. Tiga Pilar

Sejahtera, maka peneliti mengolah data yang didapat dengan menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) dengan pendekatan metode *Structural Equation Modelling*.

III. Hasil dan Pembahasan

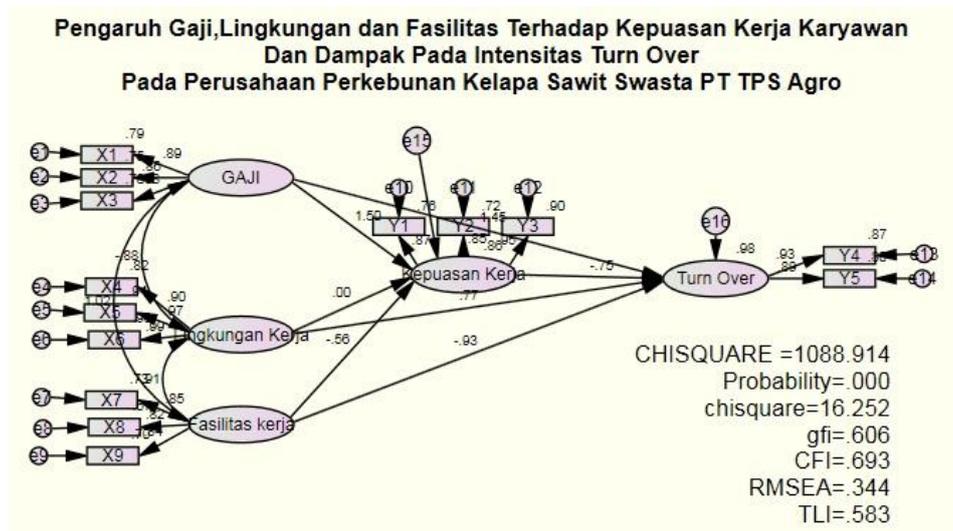
Mengembangkan model penelitian. Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas, model penelitian diilustrasikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Pengembangan Model Penelitian

No	Variabel	Defenisi	DIMENSI	Indikator
1.	Gaji (X1)	Jumlah rupiah yang diterima karyawan dalam sebulan	1. Jumlah Gaji 2. Ketepatan Waktu 3. Nilai rupiah dengan kebutuhan	1.Kesesuaian gaji dengan pekerjaan yang dilakukan karyawan. 2.Kesesuaian gaji dengan harapan karyawan. 3.Kesesuaian gaji dengan kebutuhan hidup karyawan.
2.	Lingkungan (X2)	Suasana kantor disekitar karyawan	1. Team Work 2. Hubungan Kerja	1.Rekan kerja yang saling membantu. 2. Sikap karyawan terhadap rekan kerja. 3. Rasa tanggung jawab yang dimiliki rekan kerja.
3	Fasilitas (X3)	Sarana yang diberikan kepada karyawan selain gaji	1. Kendaraan 2. Makan Siang	1.Sarana Transportasi kerja. 2. Sarana konsumsi. 3. Sarana sewa rumah
4.	Kepuasan Karyawan (Y)	Tingkat rasa puas karyawan terhadap keinginan resign	1. Jumlah Gaji yang diterima 2. Rekan Kerja Yang Mendukung	1.Kepuasan karyawan terhadap gaji yang diterima 2. Kepuasan karyawan terhadap lingkungan kerja 3. Kepuasan karyawan terhadap fasilitas yang ada.
5.	Turn Over (Z)	Jumlah karyawan yang resign		1.Jumlah karyawan masuk 2. Jumlah karyawan keluar

Mengubah analisa jalur ke dalam persamaan struktural. Gambar 3 menunjukkan analisa jalur yang ditunjukkan oleh program AMOS yang menggambarkan koefisien jalur terstandarisasi

yang menunjukkan hubungan antara variabel laten eksogen maupun variabel endogen yang secara rinci dapat ditunjukkan pada tabel 3 sebagai berikut:



Sumber : Data Primer (diolah)

Gambar 3. Hasil Analisa Jalur

**Tabel 3. Hasil Koefisien Jalur Terstandarisasi
Standardized Regression Weights
(Group number 1 - Default model)**

		<i>Estimate</i>
Kepuasan Kerja	<--- GAJI	1.502
Kepuasan Kerja	<--- Lingkungan Kerja	-.003
Kepuasan Kerja	<--- Fasilitas kerja	-.561
Turn Over	<--- Kepuasan Kerja	-.753
Turn Over	<--- GAJI	1.451
Turn Over	<--- Fasilitas kerja	-.927
Turn Over	<--- Lingkungan Kerja	.768
X3	<--- GAJI	.881
X2	<--- GAJI	.865
X1	<--- GAJI	.888
X6	<--- Lingkungan Kerja	.990
X5	<--- Lingkungan Kerja	.968
X4	<--- Lingkungan Kerja	.904
X9	<--- Fasilitas kerja	.837
X8	<--- Fasilitas kerja	.817
X7	<--- Fasilitas kerja	.853
Y1	<--- Kepuasan Kerja	.871
Y2	<--- Kepuasan Kerja	.849
Y3	<--- Kepuasan Kerja	.950
Y4	<--- Turn Over	.931
Y5	<--- Turn Over	.892

Sumber : Primer (diolah)

Pengujian Hipotesis. Berdasarkan tabel 4 berikut dapat ditarik kesimpulan mengenai hipotesis yang telah dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan nilai probability Gaji dengan Kepuasan Kerja ditunjukkan dengan nilai 0.046, berada di bawah α (5% = 0.05). Hal ini

menyatakan H1 diterima, yang mengartikan terdapat pengaruh gaji dengan kepuasan kerja karyawan PT. TPS Agro.

Berdasarkan nilai probability Lingkungan kerja dengan Kepuasan Kerja ditunjukkan dengan nilai 0.989, berada di atas α ($5\% = 0.05$). Hal ini menyatakan H1 ditolak, yang mengartikan tidak

terdapat pengaruh lingkungan kerja dengan kepuasan kerja karyawan PT. TPS Agro. Berdasarkan nilai probability Fasilitas Kerja dengan Kepuasan Kerja ditunjukkan dengan nilai 0.511, berada di atas α ($5\% = 0.05$). Hal ini menyatakan H1 ditolak, yang mengartikan tidak terdapat pengaruh Fasilitas kerja dengan kepuasan kerja karyawan PT. TPS Agro.

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis

		<i>Estimate</i>	<i>S.E.</i>	<i>C.R.</i>	<i>P</i>	<i>Label</i>
Kepuasan Kerja	<--- GAJI	1.038	.520	1.997	.046	par_10
Kepuasan Kerja	<--- Lingkungan Kerja	-.001	.107	-.014	.989	par_11
Kepuasan Kerja	<--- Fasilitas kerja	-.370	.563	-.657	.511	par_12
<i>Turn Over</i>	<--- Kepuasan Kerja	-1.226	.636	-1.926	.050	par_13
<i>Turn Over</i>	<--- GAJI	1.632	.572	2.854	.004	par_14
<i>Turn Over</i>	<--- Fasilitas kerja	-.997	.825	-1.209	.227	par_15
<i>Turn Over</i>	<--- Lingkungan Kerja	.688	.180	3.814	.443	par_16
X3	<--- GAJI	1.000				
X2	<--- GAJI	.834	.060	13.992	***	par_1
X1	<--- GAJI	.939	.063	14.798	***	par_2
X6	<--- Lingkungan Kerja	1.000				
X5	<--- Lingkungan Kerja	1.091	.029	37.001	***	par_3
X4	<--- Lingkungan Kerja	.864	.038	22.620	***	par_4
X9	<--- Fasilitas kerja	1.000				
X8	<--- Fasilitas kerja	.743	.062	11.970	***	par_5
X7	<--- Fasilitas kerja	.807	.063	12.872	***	par_6
Y1	<--- Kepuasan Kerja	1.000				
Y2	<--- Kepuasan Kerja	1.272	.096	13.300	***	par_7
Y3	<--- Kepuasan Kerja	1.829	.107	17.036	***	par_8
Y4	<--- <i>Turn Over</i>	1.000				
Y5	<--- <i>Turn Over</i>	1.018	.058	17.618	***	par_9

Sumber Primer (diolah)

Berdasarkan nilai probability Gaji dengan keinginan karyawan untuk pindah kerja (*Turn Over*) ditunjukkan dengan nilai 0.004, berada di bawah α ($5\% = 0.05$). Hal ini menyatakan H4 diterima, yang mengartikan terdapat pengaruh Gaji dengan keinginan karyawan perkebunan PT TPS AGRO untuk pindah kerja.

Berdasarkan nilai probability lingkungan kerja dengan keinginan karyawan untuk pindah kerja (*Turn Over*) ditunjukkan dengan nilai 0.443,

berada di atas α ($5\% = 0.05$). Hal ini menyatakan H1 ditolak, yang mengartikan tidak terdapat pengaruh Lingkungan Kerja dengan keinginan karyawan perkebunan PT TPS AGRO untuk pindah kerja.

Berdasarkan nilai probability Fasilitas kerja dengan keinginan karyawan untuk pindah kerja (*Turn Over*) ditunjukkan dengan nilai 0.227, berada di atas α ($5\% = 0.05$). Hal ini menyatakan H1 ditolak, yang mengartikan tidak terdapat

pengaruh Fasilitas Kerja dengan keinginan karyawan perkebunan PT TPS AGRO untuk pindah kerja

Berdasarkan nilai probability Kepuasan kerja dengan keinginan karyawan untuk pindah kerja (*Turn Over*) ditunjukkan dengan nilai 0.050, berada di bawah α (5% = 0.05). Hal ini menyatakan H7 diterima, yang mengartikan terdapat pengaruh Kepuasan Kerja dengan keinginan karyawan perkebunan PT TPS AGRO untuk pindah kerja.

Pembahasan. Pada pembahasan ini mencoba untuk menganalisa manakah faktor yang paling dominan mempengaruhi *Turn Over* baik variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen, maupun variabel laten endogen terhadap variabel laten endogen yang ditunjukkan oleh hasil perhitungan *Squared Multiple Correlation* pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Squared Multiple Correlations

	<i>Estimate</i>
Kepuasan Kerja	.855
<i>Turn Over</i>	.978
Y5	.796
Y4	.868
Y3	.903
Y2	.721
Y1	.759
X7	.728
X8	.667
X9	.701
X4	.817
X5	.937
X6	.979
X1	.788
X2	.748
X3	.776

Dari hasil *estimate* diperlihatkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh dominan sebesar 0.855 terhadap *turn over*. Angka ini menunjukkan bahwa variabel penelitian kepuasan kerja mampu menunjukkan secara signifikan pengaruh dominasinya sebesar 0.855 atau 85.5% terhadap *turn over*, sedangkan pengaruh lainnya sebesar 14.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti Motivasi, Tekanan Atasan, dan lain-lain.

Dari hasil analisa dominan seluruh variabel konstruk laten X1 sampai dengan X9 didapatkan angka 7.141. angka ini selanjutnya digunakan sebagai pembanding dari masing-masing variabel konstruk laten sebagai berikut :

a. Analisis Dominan Gaji

Dapat dilakukakn perhitungan dominasi berdasarkan tabel 4.9 sebagai berikut :

$$\frac{0.788+0.748+0.776}{7.141} \times 100 = 32.3764\%$$

b. Analisis Dominan Lingkungan Kerja

$$\frac{0.817+0.937+0.979}{7.141} \times 100\% = 38.2719\%$$

c. Analisis Dominan Fasilitas Kerja

$$\frac{0.728+0.667+0.701}{3} = 29.351\%$$

Berdasarkan analisa determinasi ini diketahui bahwa lingkungan kerja menyumbang persentase yang paling kuat terhadap kepuasan kerja dan *Turn Over* dengan angka sebesar 38.2719%, disusul oleh Gaji dengan persentase 32.37%. Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan kerja karyawan dinilai paling tinggi berdasarkan Lingkungan kerja, kemudian Gaji, dan Fasilitas Kerja secara berurutan, demikian pula dengan kondisi *Turn Over*.

Tabel 6. Hasil Perhitungan koefien korelasi terstandarisasi Secara Langsung

	Fasilitas kerja	Lingkungan Kerja	GAJI	Kepuasan Kerja	Turn Over
Kepuasan Kerja	-.561	-.003	1.502	.000	.000
Turn Over	-.505	.770	.321	-.753	.000

Analisis Persamaan Struktural. Berdasarkan tabel 6 tersebut di atas dapat dilakukan penulisan persamaan sebagai berikut :

Persamaan Struktural variabel laten endogen kepuasan kerja (π_1)

$$\pi_1 = \gamma_{11} \varepsilon_1 + \gamma_{12} \varepsilon_2 + \gamma_{13} \varepsilon_3 + e_{15}$$

Kepuasan Kerja = 1.502 Gaji-0.03 L.kerja- 0.561 F.Kerja + 0.076. Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa Variabel Gaji memiliki hubungan searah terhadap kepuasan kerja. Apabila Gaji meningkat maka kepuasan kerja karyawan PT. TPS Agro pun akan meningkat. Pada variabel lingkungan kerja dan fasilitas kerja memiliki hubungan yang berlawanan terhadap kepuasan kerja. Hal ini mengindikasikan variabel Lingkungan Kerja dan Fasilitas kerja dinilai oleh karyawan PT. TPS Agro bukan sebagai faktor yang dianggap memberikan kontribusi terhadap kepuasan kerja.

Persamaan Struktural variabel laten endogen Turn Over (π_2)

$$\pi_2 = \beta_{211}\pi_1 + \gamma_{21} \varepsilon_1 + \gamma_{22} \varepsilon_2 + \gamma_{23} \varepsilon_3 + e_{16}$$

Turn Over = -0.753 Kepuasan Kerja+ 0.321 Gaji – 0.505 Fasilitas Kerja-0.770 Lingkungan Kerja + 0.031. Persamaan ini memperlihatkan bahwa

kepuasan kerja secara langsung memiliki hubungan yang berlawanan terhadap *Turn Over*, yang pada praktiknya penurunan kepuasan kerja yang dialami oleh para pekerja di PT. TPS agro mampu menyebabkan meningkatnya *Turn Over* oleh para pekerja

Pada variabel gaji, persamaan di atas menunjukkan bahwa variabel gaji memiliki hubungan searah terhadap *Turn Over*, hal ini mengindikasikan bahwa variabel gaji bukan merupakan faktor penyebab terjadinya *Turn Over* karyawan di PT.TPS. Agro apabila terdapat variabel endogen kepuasan kerja yang dapat diposisikan sebagai variabel moderating.

Selanjutnya variabel fasilitas kerja menunjukkan pengaruh berlawanan secara langsung terhadap *turn over*. Hal ini mengindikasikan jika fasilitas kerja menurun, *Turn Over* yang dilakukan pekerja akan semakin meningkat pada Karyawan PT. TPS. Agro apabila terdapat fungsi kepuasan kerja sebagai variabel intervening

Variabel lingkungan kerja pada persamaan diatas menunjukkan hubungan yang searah terhadap *Turn Over*, yakni apabila lingkungan kerja meningkat, akan disertai peningkatan *Turn Over* secara langsung apabila terdapat fungsi kepuasan kerja sebagai variabel intervening.

Persamaan Struktural variabel laten endogen Turn Over (π_2) Indirect Effects.

Tabel 7. Hasil Perhitungan koefien korelasi terstandarisasi Secara Tidak Langsung

	Fasilitas kerja	Lingk. Kerja	GAJI	Kepuasan Kerja	Turn Over
Turn Over	.422	.002	-1.130	.000	.000

$$\pi_2 = \beta_{211}\pi_1 + \gamma_{21}\varepsilon_1 + \gamma_{22}\varepsilon_2 + \gamma_{23}\varepsilon_3 + e_{16}$$

Turn Over = -1.131 Gaji+0.422 Fasilitas Kerja+0.02 Lingkungan Kerja. Persamaan ini mengindikasikan bahwa secara tidak langsung variabel gaji memiliki hubungan yang berlawanan terhadap *Turn Over*. Semakin rendah variabel Gaji akan menyebabkan tingginya tindakan *Turn Over* yang dilakukan oleh karyawan PT. TPS Agro.

Untuk variabel fasilitas kerja memiliki hubungan searah terhadap fasilitas kerja, apabila fasilitas kerja meningkat, tindakan *Turn Over* yang dilakukan oleh karyawan juga akan meningkat secara tidak langsung. Hal yang sama juga terjadi pada variabel lingkungan kerja.

IV. Simpulan

Penerimaan Hipotesis yang menyatakan gaji mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja, mengkonfirmasi keberadaan teori kepuasan kerja *Value theory* yang mendefinisikan bahwa kepuasan kerja terjadi pada tingkatan dimana hasil pekerjaan diterima individu seperti yang diharapkan. Semakin banyak orang menerima hasil, akan semakin puas dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sekaligus mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Igalens *et al.* (2000:214), yang menyimpulkan bahwa kompensasi meliputi gaji dan upah, kompensasi insentif, kompensasi tunjangan dan jasa memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan.

Kondisi demikian terjadi pada karyawan PT. TPS Agro disebabkan oleh karakteristik staff PT. TPS Agro yang kebanyakan merupakan penduduk lokal setempat. Hal ini menyebabkan fasilitas yang diberikan (Konsumsi, Transportasi, dan Sewa Rumah) oleh perusahaan menjadi tidak terlalu penting bagi karyawan PT TPS Agro. Begitupun halnya dengan lingkungan kerja, tempat tinggal karyawan yang berdekatan membuat lingkungan kerja sebenarnya telah dibangun di dalam kondisi masyarakatnya sehingga lingkungan kerja dianggap oleh karyawan merupakan suatu hal yang biasa terjadi.

Selanjutnya penerimaan hipotesis gaji mempengaruhi *Turn Over*, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilie Lum, John Kervin, Kathleen, Frank Reid dan Wendy Sirola dari *Journal Of Organizational Behavior*, vol 19, 305 – 320, 1998, dengan judul *Explaining Nursing Turn Over Intent, Job Satisfaction or Orgzational Commitment?*. Pada penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan saat ini mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi *Turn Over Intentions* (niat berpindah) para perawat khususnya tentang peranan kebijakan pembayaran gaji, pembayaran gaji dan juga permasalahan penawaran dan permintaan yang dipengaruhi oleh bursa tenaga kerja serta persepsi atau pandangan pegawai, sebelumnya telah diidentifikasi sebagai faktor determinan dari *Job Satisfaction, Organizational Commitment* dan perilaku *Turn Over Intentions* (niat berpindah).

Kondisi Gaji yang sangat mempengaruhi karyawan PT. TPS Agro untuk melakukan *Turn Over* disebabkan banyaknya alternatif perusahaan dengan jenis usaha serupa di daerah tersebut. Sehingga karyawan PT TPS Agro tidak memiliki kekhawatiran untuk melakukan *Turn Over*.

Selanjutnya pada hasil penelitian ini dimana ditemukan pengaruh kepuasan kerja terhadap *Turn Over*. Model ini menyertakan variabel *Job*

Satisfaction (kepuasan kerja) dan *Organizational Commitment* (komitmen organisasional) sebagai variabel pendahuluan (*anta cedent*) dari niat berpindah (*Turn Over Intention*).

Kondisi ini terjadi di TPS Agro disebabkan oleh pengaruh gaji seperti yang telah dikemukakan di hipotesis sebelumnya bahwa gaji membawa pengaruh besar pada kepuasan kerja, selanjutnya kepuasan kerja akan membawa pengaruh kepada *Turn Over*. Selain hal tersebut pengaruh faktor lingkungan kerja sebagai variabel manifest kepuasan kerja juga membawa pengaruh besar terlihat dari determinasinya sebesar 38%.

Daftar Acuan

- Begley, Thomas M. dan Joseph M. Czajka. 1993. Panel Analysis Of Moderating Effects Of Commitment On Job Satisfaction, Intent To Quit, and Health Following Organizational change. *Journal of Applied Psychology*. Vol 78. No.4. 552–556. 1993
- Boone, Louis E. dan David L.Kurtz. 2009. *Contemporary Business: Cengage Learning*
- Charlie, G.T dan kawan kawan. 1997. Voluntary *Turn Over* and Job Performance: Carvelinnearity and The Moderating Influency of Salary Growth and Promotions. *Journal of Applied Psychology*. Vol.82, No.1, 1997.
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen Sumber-daya Manusia*. Jakarta: Prenhallindo
- Erbasi, Ali dan Tugay Arat. 2012. The Effect of Financial and Non Financial Incentive On Job Satisfaction: An Examination Of Food Chain Premises In Turkey. *Journal International Business Research*.
- Gibson, James L., Invancevich, John M., dan, Jame H. Donnelly Jr. 2000. *Organisasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Igalens, J. and Roussel, P. 2000. A study of the relationship between compensation package, work motivation and job satisfaction. *Journal of Organisational Behaviour*.
- Kreitner, Robert and Angelo Kinicki. 2001. *Organizational Behavior*. Fifth Edition. Irwin McGraw-Hill.
- Lum, Lilie., John Kervin, Kathleen, Frank Reid dan Wendy Sirola. 1998. Explaining Nursing *Turn Over* Intent, Job Satisfaction or Organizational Commitment?. *Journal Of Organizational Behavior*. Vol. 19. 305–320. 1998.
- Martoyo, Susilo. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, Sukidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Panggabean, Mutiara Sibarani. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Riggio, Ronal E. 2005. *The Practice Of Leadership*. Jakarta: Gramedia.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Organizational Behaviour*. Prentice Hall.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto. 2010. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sujak, Abi. 2010. *Kepemimpinan Manajer, Eksistensinya dalam Perilaku Organisasi*. Jakarta: CV Rajawali.

Sunjoyo & Harsono. 2003. *Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Turn Over Intention*. Yogyakarta: UGM.

Suwandi dan Kawan-kawan. 1999. Pengujian Model *Turn Over* Pasework dan Strawser: Studi Empiris pada Lingkungan Akuntansi Publik. Universitas Gajahmada. *Journal Riset Akuntansi Publik*. Vol.2 No.2. Juli 1999. hal. 173-195.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Yunus, Moh Naufal. 2003. *Analisis Data Multivariat Konsep dan Aplikasi Regresi Linear Berganda*. Depok.

Sikap, Insentif dan Sarana Prasarana, Pengaruhnya Terhadap Kinerja Guru pada Pengelolaan Sekolah Inklusi di Kab. Bekasi

¹Yuan Badrianto, Suhendar Sulaeman, Nur Hidayah

¹Lecturer STKIP Panca Sakti, Bekasi_Training Development PT. Hankook Tire Indonesia,

¹e-mail: yuan.mahesa.badri@gmail.com

Abstrak

Banyaknya kelahiran anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah, sekolah maupun orang tua, pemerintah mencoba menggalakan sekolah inklusi guna memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh antara variabel bebas yaitu: Sikap, Insentif, Sarana dan Prasarana terhadap Kinerja Guru pada pengelolaan sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Bekasi, Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan bentuk kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah tiga SDIT pengelola sekolah inklusi di Kabupaten Bekasi dan diambil sampel sebanyak 93 orang guru dari populasi yang ada. Pembahasan dan pengujian hipotesis yang dilakukan melalui teknik regresi sederhana yang pengolahannya menggunakan program statistik komputer SPSS versi 17, dari empat hipotesis yang diteliti dapat diuraikan sebagai berikut: Terdapat pengaruh positif antara variabel sikap terhadap kinerja guru, tidak terdapat pengaruh positif antara insentif terhadap kinerja guru, terdapat pengaruh positif antara sarana prasarana terhadap kinerja guru, dan hipotesis yang terakhir adalah secara bersama-sama baik sikap, insentif dan sarana prasarana memberikan pengaruh positif terhadap kinerja guru pada pengelolaan sekolah inklusi di Kabupaten Bekasi dengan nilai pengaruh sebesar 0,673 atau sebesar 67% sementara 33% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap dan sarana prasarana merupakan dua variabel yang penting untuk diperhatikan dalam menjelaskan peningkatan kinerja seorang guru khususnya pada pengelolaan sekolah inklusi.

Abstract

Attitudes, Incentives and Infrastructure, Effect on Teacher Performance in School Management Inclusion in Kabupaten Bekasi

Birth rate and growth of special needs children need of attention from all such as government, school and parent, The Government has a inclusive school program for give opportunities to special needs children to have education and learn together, This research aims to obtain information about the influence of the independent variable: Attitude, Incentives, Infrastructure to the dependent variable is Performance of Teachers at inclusion school in Kabupaten Bekasi, either individually or jointly. The research method was used a survey with questioner form, The population is this research at inclusion School in Bekasi district, amounting to 103 teachers. Samples taken as 93 teachers from SDIT the existing population. Discussion of hypothesis testing is performed through a simple regression techniques were manage using tools of SPSS 17 statistical program, described hypothesis as follows: There is a positive influence between attitude variable to the teachers performance, there's no significant influence positive between incentive variable to the teachers performance, there is positive effect between variables insfrastructure to the teachers performance, and the last is attitude, incentive, infrastructure jointly declared an influence to the teachers performance on the management of inclusion school in Kabupaten Bekasi, and the value of influence is 0,673 or equal with 67% and while 33% influenced by the other factor outside of this model. This condition shows that the attitude and infrastructure are variables to consider to explaining and attend for increasing the teachers performance, especially in management of inclusive schools.

Keywords: attitude, incentive, inclusive school, infrastructure, work performance.

I. Pendahuluan

Semakin meningkatnya angka kelahiran anak berkebutuhan khusus menuntut berbagai pihak untuk lebih peduli terhadapnya, baik itu pemerintah, sekolah, lingkungan dan orang tua dari anak *special need* tersebut. Berbagai upaya dilakukan salah satunya adalah program pemerintah yang mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan sekolah inklusi. Menurut David J. Smith (2012:45) Inklusif adalah satu istilah yang dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) kedalam program-program sekolah. Bagi sebagian besar pendidik, istilah ini dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realitis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang beragam.

Program inklusi pemerintah tersebut disemangati pula oleh UNESCO dalam bentuk seruan *International Education for All* (EFA) dan dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 tentang hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta UU nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 tentang hak setiap warga negara memperoleh pendidikan, maka sekolah inklusi menjadi bagian penting pada perkembangan pendidikan di Indonesia.

Untuk melaksanakan peranan pendidikan, baik sekolah maupun pemerintah tidaklah ringan. Keadaan, kepribadian dan permasalahan anak atau peserta didik yang sangat beragam dan kompleks, menjadi salah satu hambatan dan tantangan dalam melaksanakan peranan tersebut, terlebih bila masalah itu terjadi pada anak yang berkebutuhan khusus seperti autisme, anak dengan *hyperaktif*, *down syndrom*, dan lainnya.

Permasalahan lain adalah pengetahuan yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus masih belum begitu familiar di mata masyarakat

awam bahkan guru sekalipun, terlebih jika bicara penanganannya, padahal perbandingan kelahiran anak *special needs* atau anak berkebutuhan khusus (ABK) justru terus meningkat setiap tahunnya, menurut Tabloid *Mom and Kiddie*, Mei 2008 data yang berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut :

- Dua dari 150 kelahiran dinyatakan sebagai anak dengan kebutuhan khusus. Satu di antaranya *Autistic* dengan spektrum yang bervariasi.
- Enam puluh per 10.000 kelahiran dinyatakan *Autistic Syndrom Disorder* (ASD).
- Sekolah dasar berukuran sedang akan memiliki satu atau dua siswa ASD.
- Satu dari 25 anak mengalami *Attention Defisit/Hyperaktif Disorder* (ADHD/ADD) atau sekurang-kurangnya setiap kelas terdapat satu sampai dua anak ADHD/ADD.
- Pertumbuhan Autisme sekitar 10-17% per tahun.
- Dalam 10 tahun mendatang diperkirakan di Indonesia penyandang Autisme dapat mencapai 2,5 juta jiwa

Menurut Menteri Kesehatan pada tahun 2006, Siti Fadhillah Supari menyatakan bahwa jumlah anak penyandang autis sebanyak 475 ribu, perbandingan anak autis adalah 1:150 atau meningkat 300% dibanding tahun 2000. Jika mengacu dari total jumlah anak usia 0-12 tahun di Indonesia yang saat ini berjumlah 52 juta, maka jumlah anak penyandang autis di Indonesia adalah 532 ribu dan tingkat pertumbuhan anak penyandang autis kurang lebih berkisar 147 anak perharinya. (ychicenter.org/index.php/newsroom/kolom-pengurus/67-autism-we-care)

Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyanan usai memperingati Hari Disabilitas Internasional di Gedung Sate, tahun 2012 penyandang cacat di Jabar mencapai 1 persen, dari total penduduk sebesar 44 juta. Artinya, ada 440.000 penyandang cacat/difabel di Jabar. Di

Jabar kini terdapat 33 Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri, 300 SLB swasta, dan 365 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, sarana sekolah ini masih kurang untuk menampung mereka, untuk itu tahun 2014 Jawa Barat berencana membuat 300 sekolah inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus (republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/12/13/).

Melihat jumlah anak usia sekolah dasar, terutama anak berkebutuhan khusus, seharusnya para guru sudah siap menerima keberadaan mereka. Kenyataannya, selain minimnya sarana dan prasarana yang ada di Kab. Bekasi, penolakan atau sikap guru dan yayasan yang kurang siap terhadap penerimaan anak berkebutuhan khusus (ABK) membuat orang tua ABK merasa lebih tertekan. Penolakan ini membuat orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah yang jauh atau mahal yang tentunya akan menambah beban bagi keadaan mereka yang kurang berkecukupan.

Menurut hasil wawancara dengan Staff UPTD daerah Tambun bahwa saat ini tingkat kepedulian para pendidik terhadap anak berkebutuhan khusus mulai berkembang, hal ini dapat dilihat dari beberapa sekolah yang tersebar dari setiap wilayah yang sudah mulai berani dan mencoba menerima keadaan mereka dengan menjadi sekolah inklusi, akan tetapi belum mendaftarkan lembaga tersebut menjadi lembaga inklusi.

Sebaran sekolah inklusi di Kabupaten Bekasi yang menjadi sarana prasarana belajar masih belum merata, terlebih jika ingin memilih sekolah inklusi yang ideal. Data sekolah negeri inklusi untuk tingkatan SD terdapat 7 Sekolah Dasar yaitu: SDN Setiadarma 01, Jl. Sultan Hasanudin No. 152 Tambun Selatan; SDN Warnasari 06, Wanasari, Kec. Cibitung; SDN Kedung Jaya 02, Babelan; SDN Jatimekar 1, Jatiasih; SDN Kalibaru Medan Satda; SDN Kalijaya 02, Kp. Kaum, Kalijeruk,

Ds. Kalijaya, Cikarang Barat; SDN Wanajaya 01, Cibitung, Kabupaten Bekasi (<http://rumahadhd.blogspot.com/2012/11/>).

Sumiyati (2011: 75) menyatakan bahwa salah satu penghambat dari implementasi pembelajaran inklusif adalah kurangnya sarana yang sesuai seperti kelas yang sempit, sehingga saat anak ingin belajar harus menunggu giliran dan hal ini tentunya menghambat proses pembelajaran. Berbicara masalah sarana prasarana sekolah, jangankan untuk menyediakan proses kegiatan belajar mengajar yang ideal bagi anak berkebutuhan khusus, bagi siswa yang normal pada umumnya itu pun sekolah harus membagi menjadi dua kelompok, sekolah pagi dan sore dengan alasan tidak seimbang siswa yang masuk dengan sarana dan prasarana yang ada.

Selain sarana dan prasarna, hal yang perlu diperhatikan untuk proses keberlangsungan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah insentif bagi para guru. Contoh kasus adalah sebanyak 230 guru honorer Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Bandung tak mendapatkan tunjangan dana insentif guru honorer pada tahun 2012 (pikiran-rakyat.com/node/215071). Kondisi seperti itu membuat Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) menggelar unjuk rasa. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap teknis pembelajaran dan kinerja para guru yang mengajar anak berkebutuhan khusus.

Insentif merupakan salah satu daya dorong kinerja guru yang menangani anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan perhatian lebih, hal ini dikarenakan guru lebih mengeluarkan usaha, kesabaran serta penanganan lain yang berbeda dengan anak normal, insentif lebih yang didapatkan masih belum menjadi perhatian penting dari pihak penyelenggara pendidikan, insentif yang saat ini diterima oleh guru masih kurang merata dan belum memenuhi standar pemenuhan

kebutuhan hidup, hal ini dilihat dari nominal yang didapat masih di bawah upah minimum khususnya bagi guru swasta dan guru non PNS demikian pula yang dialami oleh guru sekolah inklusi yang telah disebutkan dalam latar belakang sebelumnya, kurangnya pendapatan atau insentif yang diterima tentunya akan membuat guru lebih berpikir ekstra dan berusaha lebih dalam bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, terbaginya waktu, pikiran dan energi untuk memenuhi kebutuhan itu dapat mempengaruhi kinerja guru di sekolah.

Memperhatikan antara sikap guru, insentif, dan sarana prasarana merupakan hal yang menarik dalam pengelolaan sekolah inklusi, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan positif variabel tersebut terhadap kinerja guru baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

Sikap. Menurut James P. Chaplin (2006: 43) adalah suatu kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung terus menerus untuk bertindak laku atau untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap pribadi lain, objek, lembaga atau persoalan tertentu. Masih menurutnya dilihat dari perspektif yang sedikit berbeda dapat diartikan pula bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk memberikan reaksi terhadap orang, baik secara positif maupun negatif.

Berbicara tentang sikap ada kalanya dikaitkan dengan nilai dan opini, adapun perbedaan diantara ketiganya yaitu nilai bersifat lebih mendasar dan stabil sebagai bagian dari ciri kepribadian, sikap seperti yang diungkap itu berasal dari nilai yang dianut dan sifatnya evaluatif terhadap suatu objek, sedangkan opini merupakan sikap yang lebih spesifik dan sangat situasional serta lebih mudah berubah (Saifuddin Azwar, 2012: 9).

Sumber sikap bersifat kultural, familial dan personal, artinya bahwa ada kecenderungan bahwa sikap itu akan berlaku dari dan untuk kebudayaan

selaku tempat individu dibesarkan, bagian besar dari sikap ini berlangsung dari generasi ke generasi dalam suatu keluarga, namun beberapa tingkah laku berkembang selaku orang dewasa berdasarkan pengalaman masing-masing (J.P. Chaplin, 2006: 43).

Teori sikap salah satunya menurut Saifuddin Azwar (2012: 55) adalah teori yang diungkapkan oleh Kelman yang menekankan konsepsi mengenai berbagai cara atau proses yang sangat berguna dalam memahami fungsi pengaruh sosial terhadap perubahan sikap. Dalam buku tersebut secara khusus Kelman menyebutkan terdapat tiga proses sosial yang berperan terhadap perubahan sikap seseorang yaitu 1) Kesediaan, adalah ketika individu menerima pengaruh dari orang lain atau kelompok lain dikarenakan ia berharap memperoleh reaksi tanggapan positif dari pihak tersebut, reaksi positif tersebut seperti pujian, dukungan simpati dan menghindari hal-hal yang dianggap negatif; 2) Identifikasi, proses identifikasi terjadi apabila individu meniru perilaku atau sikap seseorang atau sekelompok lain dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan pihak lain. Bentuk identifikasi lain adalah usaha memelihara hubungan individu dengan kelompok yang mengharapkan agar bersikap sama, dalam hal ini individu tersebut bersikap sesuai harapan kelompok dan sesuai dengan peranannya dalam hubungan sosial dengan kelompok tersebut; 3) Internalisasi, terjadi jika individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap menuruti pengaruh tersebut dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Dalam hal ini maka isi dan hakikat sikap yang diterima itu sendiri dianggap oleh individu sebagai hal yang memuaskan, sikap ini biasanya tidak mudah berubah selama sistem nilai yang ada dalam diri individu yang bersangkutan masih bertahan.

Menurut Syaifuddin Azwar (2012: 51-53) mengungkapkan teori sikap yang lain adalah teori konsistensi afektif-kognitif. Rosenberg, menurut Rosenberg sikap tidak saja sebagai apa yang diketahui mengenai objek, akan tetapi mencakup pula apa yang dipercayai mengenai hubungan antara objek sikap itu dengan nilai-nilai penting lainnya dalam diri individu, hubungannya dengan afeksi adalah arah pada perasaan negatif atau perasaan positif yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek, selain itu masih menurut Rosenberg bahwa manusia mempunyai kebutuhan untuk mencapai dan memelihara konsistensi afektif-kognitif.

Menurut Soecipto Rafli Kosasi (2007: 34) Guru harus memiliki sikap yang dapat menjadi panutan bagi peserta didiknya, keluarga sampai ke lingkungan masyarakat. Secara umum ada 3 sikap Guru yaitu 1). Sikap *permissive*, sikap ini membiarkan anak berkembang dalam kebebasan tanpa banyak tekanan frustrasi, larangan, perintah atau paksaan. Guru tidak menonjolkan dirinya dan berada pada latar belakang untuk memberi bantuan bila diperlukan anak; 2). Sikap otoriter, dimana guru selalu memaksakan kehendaknya tanpa melihat apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya; 3). Sikap riil, adalah sikap yang ideal yang harus dimiliki seorang guru, dimana sikap ini suatu sikap tegas, dimana ia akan bersikap sesuai apa yang dibutuhkan anak, bila perlu sedikit otoriter akan tetapi masih memiliki tujuan, sesuai kebutuhan peserta didik.

Hasil penelitian yang diambil dari Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan oleh Syafrida Elisa dan Aryani Tri Wrastari menunjukkan ada dua bentuk sikap guru terhadap pendidikan inklusi yang terdiri dari sikap positif yaitu sikap menerima terhadap pendidikan inklusif dan sikap negatif yaitu sikap menolak terhadap pendidikan inklusi. Hal ini dikarenakan adanya empat faktor yaitu

faktor guru itu sendiri, faktor pengalaman, faktor pengetahuan dan faktor lingkungan.

Dari berbagai pendapat mengenai sikap yang telah diungkapkan sebelumnya memang banyak persamaan pendapat, seperti kesepakatan bahwa sikap merupakan hal yang berhubungan dengan evaluasi suatu hal, bersifat konsisten atau relatif stabil dan bentuk reaksi terhadap sesuatu.

Sikap itu secara khas mencakup aspek kejiwaan yaitu kesiapan mental dan kecenderungan untuk mengadakan klasifikasi atau kategorisasi. Maka dari uraian definisi sikap, teori yang ada dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sikap adalah suatu reaksi seseorang yang diarahkan sebagai kesediaan untuk merespon terhadap suatu objek apapun yang ditunjukkan cara-cara tertentu yang melibatkan diantaranya perasaan, pemikiran dan tindakan.

Insentif. Merupakan salah satu motif yang melatarbelakangi seorang pegawai untuk mau bekerja dan berkarya, diantaranya untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memperoleh pengakuan, sebagai *symbol prestise* di mata masyarakat, dan lain-lain. Menurut Mangkunegara (2005: 89), insentif merupakan bentuk motivasi yang berupa uang. Kata uang dalam definisi ini adalah merupakan imbalan yang didapatkan. Hal ini senada pula dengan pendapat Ruky Ahmad (2003: 131), yang menyatakan bahwa insentif adalah imbalan yang diberikan organisasi kepada pegawai yang telah memberikan kontribusinya untuk kemajuan organisasi baik dalam bentuk tunai atau dalam bentuk lain.

Menurut Gary Dessler (2007: 161), insentif dimaksudkan untuk memberikan upah atau gaji yang berbeda. Jadi dua orang karyawan yang mempunyai jabatan yang sama bisa menerima upah yang berbeda. Menurut Marwansyah dan Mukarom (2008: 93), pada dasarnya insentif merupakan suatu bentuk kompensasi yang

diberikan kepada pegawai yang jumlahnya tergantung dari hasil yang dicapai baik berupa finansial maupun *non financial* (insentif yang tidak dapat dinilai dengan uang misalnya jam kerja, hubungan dengan atasan, dan sebagainya), menurut pendapat Marwansyah dan Mukarom di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi meliputi insentif atau insetif adalah bagian dari kompensasi.

Menurut pendapat dari Moekijat (2003: 155-159) insentif dibedakan dalam dua garis besar yaitu 1) Insentif material, insentif ini dapat diberikan dalam bentuk uang dan jaminan sosial. Insentif dalam bentuk uang dapat berupa: bonus, komisi dan profit lain; 2) Insentif non material yang diberikan dalam berbagai bentuk seperti pemberian gelar/titel secara resmi, pemberian tanda jasa/medali, adanya pemberian piagam penghargaan, pemberian pujian lisan maupun tulisan secara resmi (di depan umum) dan lain sebagainya.

Menurut T. Hani Handoko (2005: 45) salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kinerja adalah insentif, dengan meningkatkan insentif dapat meningkatkan kinerja. Pemberian insentif dapat memotivasi guru agar terus menerus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban serta tanggung jawabnya. Karena dengan insentif yang baik dan memadai yaitu dengan melihat apakah insentif yang diberikan kepada guru dapat mencerminkan hasil kerja seorang guru dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Purnomo Wicaksono (2013) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pemberian insentif terhadap loyalitas kinerja guru di SMP Tri Mulya Semarang.

Begitu artinya peranan insentif dalam pekerjaan tentunya akan sulit memisahkannya dari kegiatan profesionalisme kerja, terlebih di era yang serba konsumtif saat ini yang memerlukan relatif banyak

pengeluaran keuangan untuk memenuhi kebutuhan individu. Menurut Undang-undang no 14 tahun 2005 pasal 14 dan 15 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas profesionalnya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum itu meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji dan penghasilan lainnya. Salah satu bentuk penghasilan lainnya tersebut adalah pemberian dana insentif guru.

Berdasarkan berbagai pendapat dan teori dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa insentif adalah imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi kepada pegawai sebagai apresiasi terhadap tenaga dan pikirannya dalam bentuk material dan non material yang bersifat positif dan menguntungkan bagi pegawai.

Sarana Prasarana. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sarana berarti sebagai sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan (KBBI 2006: 999) sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (KBBI, 2006: 893).

Mulyasa (2004: 49) menyatakan sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan pengajaran seperti halaman, kebun, taman, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman untuk belajar biologi, halaman sekolah sebagai lapangan olah raga, maka komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

Moenir (2009: 119) mengemukakan bahwa sarana dan prasarana merupakan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan bantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Ditinjau dari segi kegunaan, Moenir (2009: 122) membagi sarana dan prasarana sebagai berikut, 1) Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya; 2) Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkitkan dan menambah kenyamanan dalam bekerja; 3) Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.

Menurut Imron (2003: 85) bahwa guru merupakan sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan program pendidikan. Apapun yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang pasti memerlukan performa dari guru sebagai pendidik. Namun dalam rangka peningkatan mutu tersebut perlu adanya layanan profesional di bidang sarana dan prasarana. Dari uraian di atas maka salah satu keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal.

Adapun hubungan antara sarana dan prasarana dengan kinerja guru terletak pada sifat praktis dan keberhasilan pencapaian, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, dapat kita bayangkan meskipun seorang guru yang memiliki kinerja tinggi, namun saat mengajar dia kurang memiliki referensi buku, tidak membawa alat tulis, tidak tersedianya tempat belajar, hal ini tentu akan lebih berpengaruh dalam praktik mengajar. Penelitian yang relevan terhadap sarana dan prasarana diungkapkan oleh jurnal ilmiah (Eko Djatmiko: 2012) yang menyebutkan bahwa sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja guru sebesar 36,9%.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai sarana dan prasarana dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana adalah segala macam alat, perlengkapan dan materi lain yang digunakan dan menunjang proses kegiatan belajar mengajar sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Perbedaan antara sarana dan prasarana terletak pada sifat penggunaannya, jika sarana digunakan secara langsung dan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan pengajaran, baik sarana dan prasarana ini meliputi perlengkapan kerja, peralatan kerja dan perlengkapan bantu atau fasilitas seperti halaman, kebun, taman sekolah, laboratorium dan lain sebagainya.

Kinerja. Berasal dari pengertian *performance* yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Wibowo 2012: 7).

Alain Mitrani (2005: 131) mendefinisikan kinerja sebagai pernyataan sejauhmana seseorang telah memainkan perannya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran-sasaran yang berhubungan dengan peranan perseorangan, dan atau dengan memperlihatkan kompetensi-kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi apakah dalam suatu peranan tertentu, atau secara lebih umum.

Menurut Amstrong (2004: 29) memandang bahwa kinerja merupakan sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim dan individu dengan cara memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar dan persyaratan-persyaratan atribut yang disepakati.

Menurut Hakim (2006: 167), kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu perusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Perbedaan kinerja antara seseorang dengan yang lain dalam suatu situasi kerja adalah karena perbedaan karakteristik dari individu

Meningkatkan kinerja adalah salah satu tujuan utama penilaian kinerja. Untuk itu perlu dipahami definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Cukup banyak ahli memberikan definisi dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Anderson (Yuwono *et al*, 2003: 26) pada dasarnya kinerja dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 1) Individu, pada faktor individu, jika seseorang melihat kinerja yang tinggi merupakan jalur untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia akan mengikuti jalur tersebut; 2) Situasi, pada faktor situasi menyebutkan bahwa kinerja merupakan hasil interaksi antara motivasi dengan kemampuan dasar. Jika motivasi tinggi tetapi kemampuan dasar rendah, maka kinerja akan rendah dan jika kemampuan tinggi tetapi motivasi yang dimiliki

rendah maka kinerja pun akan rendah, atau sebaliknya. Kinerja atau prestasi kerja adalah perilaku yang tampak atau terwujud dalam pelaksanaan tugas, baik tugas di dalam kantor maupun di luar kantor yang bersifat kedinasan.

Untuk mewujudkan suatu kinerja yang baik maka perlu penilaian kinerja, menurut Stephen P. Robin (2002: 258) penilaian kinerja diperlukan dengan tujuan a) Agar organisasi seperti lembaga dapat mengambil keputusan personal secara umum yang akan memberikan informasi penting dalam hal rekrutmen, promosi, transfer, atau pemberhentian; b) Untuk memberikan penjelasan akan pelatihan dan perkembangan yang diperlukan; c) Untuk memenuhi tujuan umpan balik yang ada terhadap pekerja tentang bagaimana organisasi memandang kinerja mereka, digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan atau menentukan keputusan akan penghargaan secara khusus.

Begitu pentingnya peran guru dalam mentransformasikan input-input pendidikan, sehingga pelaksanaannya dilakukan pengawasan dengan standar pengawas yang sudah ditetapkan oleh undang-undang melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 12 Tahun 2007, dengan maksud agar terpantaunya kinerja guru sehingga tujuan pendidikan sampai pada peserta didik.

Sayangnya, menurut Surya Darma (2008: 1) dalam kultur masyarakat Indonesia sampai saat ini tidak mudah untuk mengamati realitas keseharian kinerja/*performance* guru dihadapan siswa, tidak jarang terjadi guru berusaha menampilkan kinerja terbaiknya pada aspek perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran hanya pada saat dikunjungi, selanjutnya ia akan kembali bekerja seperti sedia kala, kadang tanpa persiapan yang matang serta tanpa semangat dan antusiasme yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa guru dan

dosen adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4) professional.

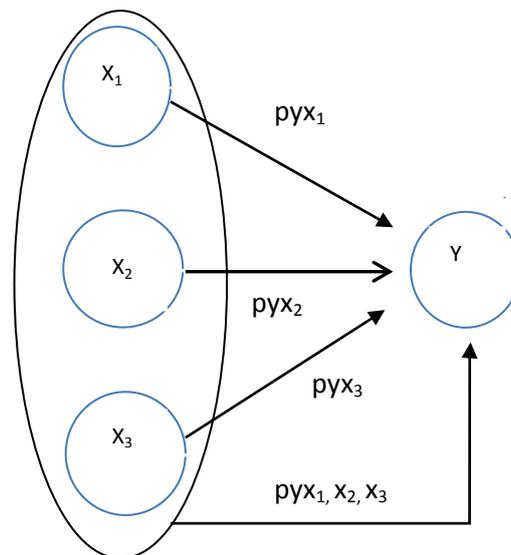
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan kinerja guru adalah sejauh mana seorang guru bekerja dengan melakukan usaha terbaik dalam mengajar dan mencapai prestasi berdasarkan tujuan yang telah direncanakan. Mengacu pada teori Anderson bahwa kinerja seseorang itu dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu: yang pertama dimensi individu itu sendiri yang memandang bahwa dengan memberikan kinerja yang tinggi mampu memenuhi kebutuhannya dan akan mengikuti jalur tersebut, dan yang kedua adalah dimensi situasi yang terjadi dimana kinerja ini merupakan hasil interaksi antara motivasi dengan kemampuan dasar. Jika motivasi tinggi tetapi kemampuan dasar rendah, maka kinerja akan rendah dan jika kemampuan tinggi tetapi motivasi yang dimiliki rendah maka kinerja pun akan rendah, atau sebaliknya.

Kerangka Pemikiran. Berdasarkan kajian teori, konsep, pendapat dan hasil penelitian relevan dengan permasalahan yang dipelajari maka disusun kerangka berpikir sebagai berikut:

- 1) Pengaruh sikap guru terhadap kinerja guru. sikap yang ditunjukkan oleh guru terhadap penerimaan siswa inklusif yang terbuka dalam artian menerima, membina dan mengajarkan dapat melahirkan suatu keikhlasan dan rasa kasih sayang yang lebih. Sikap guru dipengaruhi oleh pengalaman, dan pengalaman ini seperti yang telah diungkapkan sebelumnya merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja.
- 2) Pengaruh insentif terhadap kinerja guru. Insentif merupakan suatu dorongan dalam diri untuk melakukan hal tertentu yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik, kaitannya terhadap kinerja adalah pemberian insentif berkorelasi terhadap kinerja seseorang terutama yang berorientasi terhadap materi, sedangkan untuk pemberian insentif non finansial juga menunjukkan korelasi dimana individu akan lebih bersemangat atau termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang terbaik setelah mendapatkan *reward* pujian, fasilitas dan kenyamanan lain.
- 3) Pengaruh sarana prasarana terhadap kinerja guru. Material dalam bentuk sarana dan prasarana dalam prakteknya tidak bisa dikesampingkan, jika seorang siswa ingin maju dan berkembang tentunya harus tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana juga sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan kinerja guru di sekolah, dapat dibayangkan betapa repot dan kurang efektif jika guru mengajar tanpa spidol, tanpa buku atau perlengkapan lain, maka kinerja guru yang harus ditunjukkan dalam berperan akan mengalami kendala.
- 4) Pengaruh sikap, insentif dan sarana prasarana secara bersama-sama terhadap kinerja guru. Secara umum dan logis bahwa sikap (bersedia menerima/menolak, mengidentifikasi dan menginternalisasi) dipadukan dengan insentif (baik material maupun non material yang memuaskan) dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada (perlengkapan kerja, peralatan kerja dan fasilitas) yang dapat mempermudah dan membuat lebih nyaman dalam bekerja dapat mempengaruhi kinerja guru (baik secara individu maupun secara situasi yang melibatkan kelompok) pada sekolah inklusi swasta di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada sub-bagian di atas, menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri sikap, insentif dan sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kinerja guru. Penelitian ini meliputi tiga variabel terikat

(*independent*) yaitu sikap (X_1), insentif (X_2), dan kinerja guru (X_3), sedangkan variabel bebas (*dependent*) adalah kinerja (Y). Untuk melihat keterkaitan antara variabel-variabel tersebut dapat digambarkan pada analisa jalur berikut:



Gambar 1. Konstelasi Variabel Penelitian

Keterangan :

- X_1 : Sikap merupakan variabel bebas pertama
- X_2 : Insentif merupakan variabel bebas kedua
- X_3 : Sarana prasarana merupakan variabel ketiga
- Y : Kinerja guru merupakan variabel tergantung.
- p : Proporsi pengaruh variabel tertentu

Secara umum hipotesis untuk pengujian uji t adalah:

$H_0: p_{xy} = 0$. Tidak terdapat pengaruh antara variabel x terhadap kinerja guru

$H_1: p_{xy} \neq 0$. Terdapat pengaruh antara variabel x terhadap kinerja guru

Hipotesis Penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Terdapat pengaruh positif sikap (X_1) terhadap kinerja guru (Y)
- 2) Terdapat pengaruh positif insentif (X_2) terhadap kinerja (Y)
- 3) Terdapat pengaruh positif sarana prasarana (X_3) terhadap kinerja (Y)
- 4) Terdapat pengaruh positif antara sikap (X_1), insentif (X_2) dan sarana prasarana (X_3) secara bersamaan terhadap kinerja guru (Y)

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiono (2008: 14), penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data *numerical* atau angka, pengolahan data yang diolah dengan metode statistika. Dalam metode kuantitatif ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert, menurut Sugiono (2008: 58) skala Likert yaitu skala untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi

seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial, dengan skala Likert, maka variabel yang diukur menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru sekolah dasar inklusi swasta di Kabupaten Bekasi. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah teknik sensus atau *complete enumeration*, yaitu proses pemilihan sampel dengan tiap populasinya dihitung dikarenakan populasinya relatif kecil. Kriteria dari sampel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pria atau Wanita guru sekolah inklusi
2. Lulusan minimal setara S1.
3. Usia diatas 22 tahun.

Dan dari kriteria di atas maka sampel yang diambil adalah berjumlah 93. Adapun instrumen variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Variabel Sikap

Dimensi	Indikator
Kesediaan	a. Pujian
	b. Simpati
	c. Dukungan
	d. Menghindari hal negatif.
Identifikasi	a. Memelihara hubungan
	b. Kesamaan
	c. Mengenal.
Internalisasi	a. Memuaskan
	b. Mempertahankan
	c. Memperjuangkan

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Variabel Insentif

Dimensi	Indikator
Material	a. Bonus
	b. Komisi
	c. <i>Profit Share</i>
Non Material	a. Piagam atau medali Penghargaan
	b. Gelar atau titel resmi
	c. Tunjangan
	d. Pemberian fasilitas tertentu

dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator menjadikan sebagai titik tolak untuk

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Variabel Sarana Prasarana

Dimensi	Indikator
Perlengkapan kerja	a. Alat peraga
	b. Infokus
	c. Buku LKS
	d. Seragam
Peralatan kerja	a. ATK
	b. Papan tulis
	c. Buku Panduan
Perlengkapan bantu	a. Listrik dan AC
	b. Perpustakaan
	c. Ruang inklusi
	d. Ruang konseling
	e. UKS
	f. Kantin
	g. Ruang guru

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Variabel Kinerja

Dimensi	Indikator
Individu	a. Minat yang tinggi
	b. Kedisiplinan
	c. Motivasi kerja
	d. Loyalitas
	e. Afeksi
	f. Kebutuhan pencapaian
Situasi	a. Hubungan dengan partner kerja
	b. Hubungan dengan atasan atau bawahan
	c. Lingkungan yang asri

Untuk mendapatkan data penilaian kinerja yang sah (*valid*) dan andal (*reliable*) sehingga menjamin keabsahan hasil penelitian diperlukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif, yaitu sebagai berikut, a). Pengorganisasian data, dilakukan dengan mengumpulkan semua data yang sudah ada agar memudahkan pengecekan apakah semua data yang

dibutuhkan sudah tercapai semua. Data yang di dapat dari kuesioner akan dilakukan uji instrumen. b). Pengelolaan data, dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas yang telah dirumuskan. Karena data yang diperoleh adalah data kuantitatif, yaitu data nominal dan ordinal, maka data akan diolah dengan menggunakan teknik statistik non parametrik. Setelah menganalisis skor yang diperoleh dari responden, dilakukan input nilai pada program *excel* untuk mempermudah dalam perhitungan selanjutnya.

Validitas. Analisis hasil uji coba instrumen variabel kinerja dimulai dengan pengujian validitas dengan menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment* dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \times \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Keterangan:

- R = nilai korelasi product moment
- r_{xy} = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y,
- n = banyaknya responden
- $\sum xy$ = jumlah perkalian X dan Y
- X^2 = kuadrat dari X
- Y^2 = kuadrat dari Y

Pada taraf signifikansi 0,05 dimana jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka status butir kuesioner valid dan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka status butir kuesioner tidak valid.

Reliabilitas. Setelah dilakukan uji validitas, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas instrumen yang dilakukan dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* (Agus Purwoto, 2007: 13) sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left\{ 1 - \frac{\sum S_b^2}{S_t^2} \right\}$$

Keterangan:

- α = Koefisien reliabilitas
- k = Jumlah butir yang valid
- $\sum S_b^2$ = Jumlah varians skor butir
- S_t^2 = Varian skor total

Setelah uji instrument dinyatakan reliabel dan valid maka dilanjutkan dengan analisis regresi.

Analisis Regresi. Pada penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dari variabel bebas terhadap variabel terikat (Jonathan Sarwon 2006: 163). Adapun langkah-langkahnya setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut:

- a) Uji normalitas
- b) Uji klasik yang meliputi: uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas
- c) Uji F
- d) Analisis korelasi tiap/uji t

III. Hasil dan Pembahasan

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas selanjutnya adalah uji normalitas dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sikap	.071	93	.200*	.972	93	.047
Insentif	.083	93	.122	.981	93	.197
Sarana	.060	93	.200*	.986	93	.433
Kinerja	.082	93	.152	.978	93	.125

Karena p value (sig) Sikap = 0.200, Insentif = 0,122, Sarana Prasarana= 0,200 dan Kinerja= 0,152 semua nilai menunjukkan > 0,05 maka Ho

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diambil dari populasi berdistribusi normal

Uji Klasik Multikolinearitas, digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya

hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi (Dwi Priyatno, 2008: 39). Kriteria yang digunakan yaitu: Jika nilai VIF (*Varian Inflation Factor*) disekitar angka 1 atau mendekati toleransi angka 1, maka dapat dikatakan tidak ada masalah multikoliner.

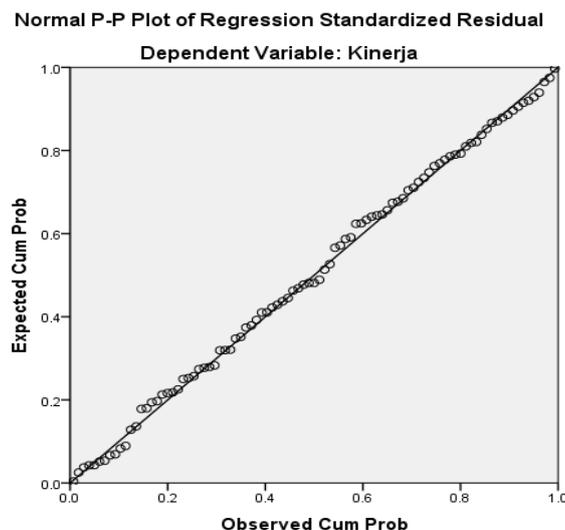
Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	<i>Coefficients^a</i>				<i>Collinearity Statistics</i>		
	<i>Unstandard. Coeff.</i>		<i>Stand. Coeff.</i>	t	Sig.	<i>Tolerance</i>	VIF
	B	<i>Std. Error</i>	Beta				
Constant	10.924	4.487		2.434	.017		
Sikap	.437	.063	.466	6.947	.000	.815	1.227
Insentif	-.036	.073	-.031	-.489	.626	.928	1.078
Sarana	.440	.055	.527	8.001	.000	.846	1.183

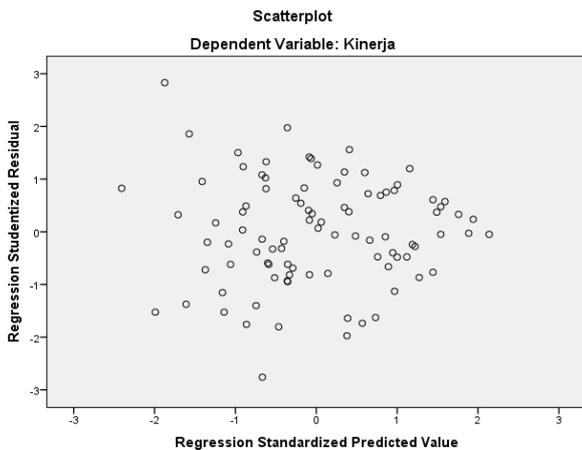
a. *Dependent Variable: Kinerja*

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF tersebut sekitar angka 1 sehingga bisa disimpulkan bahwa antara variabel independen tidak terjadi permasalahan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.



Gambar 2. Normal P-P plot Heteroskedastisitas



Gambar 3. Scatterplot Heteroskedastisitas

Menurut Joko Sulisty (2007:62) jika hasil grafik Scatterplot di atas titik-titiknya tampak menyebar dan tidak membentuk pola tertentu dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas seperti pada gambar 3 di atas.

Uji F. Untuk melihat pengaruh sikap, insentif sarana dan prasarana secara gabungan atau bersama-sama terhadap kinerja akan dilihat dari penghitungan model *summary* khususnya angka *R square*.

Menurut Jonatahan Sarwon (2006:169) terdapat dua cara yaitu membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} dan yang kedua adalah melihat taraf signifikansi hasil perhitungan dengan taraf signifikansi 0,05.

Tabel 7. Variabel Entered dan Model Summary Uji F

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.820 ^a	.673	.662	5.92052	2.863

Menurut Jonatahan Sarwon (2006: 163) Besarnya angka *R Square* (r^2) dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh pada antara variabel-variabel X terhadap Y. Dari tabel di atas terlihat nilai R

Square adalah 0.673 dari data tersebut artinya secara bersama-sama variabel sikap, insentif, sarana dan prasarana mempengaruhi kinerja hanya sebesar 67% sementara 33% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Untuk menguji hipotesisnya menggunakan angka F dengan uji F yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8. Anova Uji F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	6420.963	3	2140.321	61.060	.000 ^b
Residual	3119.682	89	35.053		
Total	9540.645	92			

Sumber :hasil pengolahan data

Menurut Jonatahan Sarwon (2006: 169) terdapat dua cara yaitu membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} dan yang kedua adalah melihat taraf signifikansi hasil perhitungan dengan taraf signifikansi 0,05. Dari table diatas maka dapat jabarkan bahwa Uji keseluruhan atau uji F dengan nilai F_{hitung} 61,060 sementara untuk mencari nilai F_{tabel} dilihat dari derajat kebebasannya yaitu 4 variabel-1 =3, dan 93-4 =89 maka pada F_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$ sebesar 2,70 karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka sesuai dengan ketentuan uji hipotesis jika maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya terdapat pengaruh antara sikap, insentif dan sarana prasarana terhadap kinerja guru.

Berdasarkan perhitungan angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya terdapat pengaruh antar sikap, insentif dan sarana prasara terhadap kinerja guru, adapun besarnya pengaruh dari variable sikap, insentif, sarana dan prasarana terhadap kinerja guru adalah sebesar 67%.

Analisis tiap variable terhadap independent variable (uji t). Untuk melihat besarnya pengaruh variable sikap, insentif, sarana dan prasarana terhadap kinerja guru secara parsial digunakan uji t, sedangkan untuk melihat besarnya angka dapat

dilihat pada angka Beta atau *Standardized Coefficient* di bawah ini.

Tabel 9. Coefficient Uji t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Stand. Coeff.		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.924	4.487		2.434	.017
Sikap	.437	.063	.466	6.947	.000
Insentif	-.036	.073	-.031	-.489	.626
Sarana	.440	.055	.527	8.001	.000

a. Dependent Variable: Kinerja

Sikap berpengaruh terhadap kinerja guru. Sebelumnya perlu dilakukan perhitungan akan besarnya t tabel pada variabel bebas penelitian yaitu menurut Jonatahan Sarwon (2006: 167) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (DK). $DK = n - 2$ atau $93 - 2 = 91$ maka t_{tabel} sebesar 1,99.

Kriteria uji hipotesisnya sebagai berikut, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

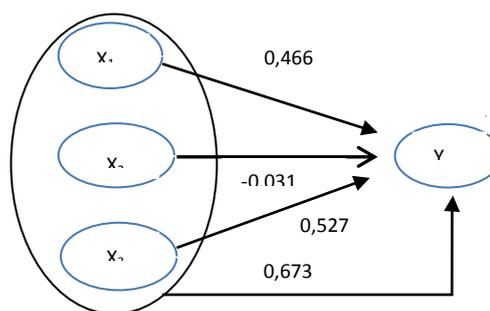
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan berdasarkan angka $t_{hitung} = 6,947 > t_{tabel} = 1,99$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh positif antara sikap terhadap kinerja guru, besarnya pengaruh tersebut adalah 0,466 atau sebesar 47 %.

Insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Kriteria uji hipotesisnya sebagai berikut, Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka $t_{hitung} = -0,489 < t_{tabel} = 1,99$ demikian pula jika melihat angka signifikansi sebesar $0,626 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada pengaruh positif antara insentif terhadap kinerja guru.

Sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja guru. Kriteria uji hipotesisnya sebagai

berikut, jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka $t_{hitung} = 8,001 > t_{tabel} = 1,99$ demikian pula jika melihat angka signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara sarana dan prasarana terhadap kinerja guru, besarnya pengaruh variabel sarana dan prasarana terhadap kinerja adalah 0,527 atau sebesar 53%

Hubungan kausalitas dalam konstelasi atau struktur. Berdasarkan hasil dari perhitungan maka dapat digambarkan secara keseluruhan hubungan kausal empiris antara variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y sebagai berikut:



Gambar 4. Hubungan Kausal Empiris Variabel X_1, X_2, X_3 terhadap Y

Dari hubungan struktur dapat disimpulkan bahwa sikap berpengaruh terhadap kinerja dengan nilai pengaruh sebesar 0,466 atau sebesar 47%. Besarnya pengaruh dari variabel sarana prasarana sebesar 0,527 atau sebesar 52%, sedangkan variabel insentif tidak memberikan pengaruh yang signifikan dimana nilainya sebesar -0,031. Sementara jika melihat besarnya variabel sikap, insentif dan sarana prasarana secara bersama-sama terhadap kinerja guru adalah sebesar 0,673 atau sebesar 67%.

IV. Simpulan

Sikap terhadap kinerja guru. Berdasarkan hasil perhitungan dinyatakan bahwa sikap pengaruh menerima dan terbuka pada pengelolaan sekolah inklusi tersebut dapat dibuktikan dengan adanya *assessment* khusus, ruangan dan SDM khusus serta adanya training yang diikuti secara antusias oleh para guru, guru juga membuat raport khusus bahkan terdapat laporan bulanan khusus akan perkembangan dari peserta didik, perhatian ini memberikan dampak terhadap kinerja guru sebagai pendidik yang bertanggung jawab terhadap peserta didiknya yang memiliki perbedaan/kebutuhan khusus. Jika dikorelasikan dengan teori, penelitian ini sesuai dengan pendapat dari teori sikap fungsional Karz (Panji Anoraga 2004: 34) yang menyatakan bahwa sikap menerima didasarkan pada motivasi sikap itu sendiri yang melahirkan fungsi mempertahankan nilai persamaan mendapatkan pendidikan, hak azasi, kemauan dan kepatuhan, dari fungsi inilah memberikan dampak pada kinerja seseorang.

Pembentukan sikap positif terhadap anak kebutuhan khusus pada pengelolaan sekolah sudah seharusnya diperhatikan, upaya membangun sikap positif tersebut dapat dilakukan dengan menyelenggarakan event seperti *autism care* atau yang sering dilakukan oleh SDIT Permata Hati yaitu *teacher awareness for special needs*.

Melihat pentingnya variabel sikap maka guru diharapkan dapat lebih meningkatkan sikap terbuka dan menerima akan perbedaan yang dialami oleh peserta didik, karena sikap penerimaan ini akan berdampak pada kinerja guru, adapun aspek yang harus dibangun adalah inovatif, ketulusan, kesadaran akan ciptaan Allah SWT merupakan hasil yang terbaik, kesadaran akan keberagaman dan perbedaan yang menumbuhkan keinginan untuk saling mengenal dan memahami. Sikap yang terbuka dan menerima akan keadaan siswa dengan tulus merupakan hal yang cukup sulit namun ini merupakan hal yang mutlak harus

dimiliki oleh para pendidik agar mampu mengajar dengan landasan kasih sayang dan panggilan jiwa yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja guru.

Insentif terhadap kinerja guru. Insentif dinyatakan tidak pengaruh positif terhadap kinerja guru pada pengelolaan sekolah inklusi di Kabupaten Bekasi, pernyataan ini memang memerlukan penelitian lebih lanjut jika melihat penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara insentif dan kinerja, perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan bahwa pada penelitian ini memiliki sampel yang berbeda, dimana SDIT lebih mengedepankan akan nilai tarbiah Islami yang tulus ikhlas, bahkan saat bergabung dengan salah satu SDIT tersebut sudah disampaikan bahwa pendapatan menjadi guru tidak akan sama dengan upah minimum regional (UMR), sekolah bukanlah tempat yang tepat untuk memperkaya diri dengan materi duniawi serta terjalin perkumpulan eksklusif (*liqo*) yang terus menjaga akan visi dan misi dari pendidikan Islam dan tarbiatul bagi para guru-guru, selain itu banyak guru yang percaya bahwa sekolah hanya sebagai tempat jembatan rezeki untuk mendapatkan rezeki dari sumber lain.

Jika dikorelasikan dengan penelitian dengan hasil yang hampir serupa seperti penelitian dari Nurman Sugianto (2012) dimana hasilnya menunjukkan bahwa kompensasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan, dan penelitian lain yang berhubungan dengan insentif diantaranya adalah penelitian dari Akhyakudin (2009) serta penelitian dari Sayoga (2012) keduanya menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara insentif yang diberikan dengan kinerja guru, hal ini disebabkan sekolah merupakan tempat untuk mengajar dan belajar bukan berorientasi bisnis dengan keuntungan semata, selain itu idealitas para guru yang masih relatif berusia muda pada sekolah tersebut menjadikan mereka tidak berorientasi pada materi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Meskipun demikian sifat dari loyalitas guru pada sekolah tersebut dapat dikatakan rentan dan elastis, dimana pada titik tertentu akan banyak *turn over* hal ini dikarenakan kebutuhan dasar akan kenyamanan finansial dapat dikatakan belum terpenuhi secara sesuai, berdasarkan pada teori Herzberg bahwa *need of achievement* tetap harus diperhatikan demi keseimbangan akan kebutuhan hidup dan bekerja/*work balance*, untuk itu sekolah tetap harus memberikan insentif yang sesuai bagi para pendidik/guru agar mereka lebih fokus pada aktifitas mengajar peserta didik tanpa terpengaruh oleh kekhawatiran kekurangan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sarana dan prasarana terhadap Kinerja guru dinyatakan berpengaruh dengan nilai sebesar 53%, pada ketiga sekolah tersebut memang terlihat cukup memadai untuk menyelenggarakan pengelolaan inklusi, fasilitas sudah sesuai dengan ketentuan dari Diknas, dimana diantaranya terdapat UKS, kantin, ruang konseling, ruang guru dan manajemen dan lain sebagainya, guru-guru merasa cukup puas dan terbantu dengan adanya fasilitas yang lengkap, hal ini sesuai dengan teori dari Mulyasa (2005: 50) bahwa sarana prasarana memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan.

Demi kelancaran akan proses kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kinerja guru, maka variabel sarana dan prasarana itu harus mendapatkan perhatian. Menurut para guru pada tempat penelitian yang dilakukan, hal terpenting selain metoda mengajar adalah sarana dan media pembelajaran yang disajikan, terutama bagi anak berkebutuhan khusus, persiapan materi dan media peraga harus lebih dimanfaatkan guna mempermudah peserta didik dalam menyerap informasi dan pembelajaran yang diajarkan oleh para guru.

Sikap, Insentif, Sarana dan Prasarana secara bersama-sama dinyatakan berpengaruh

terhadap Kinerja guru, dengan nilai pengaruh sebesar 67% sementara 33% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Dari hasil penelitian ini diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pengelolaan sekolah inklusi ketiga variabel ini harus diperhatikan, hal ini dikarenakan bahwa ketiga variabel ini secara bersamaan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kinerja guru.

Mengingat variabel sikap, insentif dan sarana prasarana memberikan pengaruh positif terhadap kinerja guru pada pengelolaan sekolah inklusi, maka dalam tataran manajemennya, sekolah melakukan peningkatan dan upaya dalam membentuk dan membangun suasana yang lebih kondusif berdasarkan variabel tersebut, implikasinya adalah untuk keberhasilan dalam pencapaian prestasi dan kemampuan dalam daya saing, selain itu perlu dilakukan kerja sama dengan pihak profesional lain yang terkait seperti psikolog, dokter anak dan para *therapist*, adapun dalam pemenuhan anggaran, secara biaya yang relatif besar akan menjadi kendala, untuk itu sebagai pengelola diperlukan *link* yang cukup kuat dengan pemerintah dan pemberi dana seperti perusahaan dengan program CSR (*Corporate Social Responsibility*), para donator atau sistem subsidi silang, hal ini dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas pendidikan pada pengelolaan sekolah inklusi.

Daftar Acuan

Agus Purwoto. 2007. *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial*. Gramedia. Jakarta.

Akhyakudin. 2009. *Pengaruh Insentif dan Kedisiplinan Terhadap Motivasi Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja Guru SMA YP 17 Serang*. Tesis Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Alain Mitrani. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kompetensi*. Pustaka Utama Graffiti. Jakarta.

- Amstrong. 2004. *Manajemen Kinerja*, Diterjemahkan Oleh Tony Setiawan. Tugu. Yogyakarta.
- David J. Smith. 2012. *Sekolah Inklusi*. Penerjemah Denis N. Enrica. Cetakan Ketiga. Nuansa Cendikia. Jakarta.
- Dwi Priyatno. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Buku Kita. Jakarta.
- Eko Djatmiko. 2006. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri Kota Semarang. *Jurnal Penelitian. Fokus Ekonomi*. Vol. 1 No. 2 Desember 2006
- Gary Dessler. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jilid 2. Edisi Sembilan. Penerjemah Agus Darma. PT Indeks Gramedia. Jakarta.
- Hakim Abdul. 2006. Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah. *JRBI*. Vol 2. No 2. Hal: 165-180
- <http://republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/12/13/>.
- <http://ychicenter.org/index.php/newsroom/kolompengurus/67-autism-we-care>.
- <http://pikiran-rakyat.com/node/215071>
- <http://rumahadhd.blogspot.com/2012/11/>.
- Imron. 2003. *Psikologi Pendidikan*, Nuansa Cendikia. Jakarta
- James P. Chaplin. 2006. *Kamus Lengkap Psikologi*. Edisi 11. Penerjemah Kartini Kartono. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Joko Sulisty. 2011. *6 Hari Jago SPSS17*. Cakrawala. Jogjakarta
- Jonathan Sarwon. 2006. *Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Dengan SPSS*. Bandung.
- Mangkunegara Anwar Prabu. 2005. *Manajemen SDM*. Bandung. Rosda Karya.
- Marwansyah dan Mukarom. 2008. *Manajemen SDM*. Administrasi Niaga. Bandung.
- Moekijat. 2003. *Manajemen Kepegawaian*, Bandung. Alumni.
- Moenir. 2009. *Hubungan sarana prasarana*. Jakarta. Gramedia.
- Mulyasa. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Nurman Sugianto. 2012. *Pengaruh Sikap, Pemberian Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Guru di SDN Satria Jaya Kab Bekasi*. Tesis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Panji Anoraga. 2012. *Psikologi Industri*. Gramedia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12,16 dan 24 Tahun 2007
- Purnomo Wicaksono. 2013. Hubungan Pengembangan Karir Dan Pemberian Insentif Terhadap Loyalitas Kinerja Guru Di SMP Tri Mulya Semarang. *Jurnal Pendidikan IKIP Veteran Semarang*. Vol.01.No.01. Juni 2013.
- Ruky Ahmad. 2003. *Manajemen Penggajian dan pengupahan untuk karyawan perusahaan*, Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta.
- Saifuddin Azwar. 2012. *Psikologi umum*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Sayoga. 2012. *Pengaruh Kedisiplinan, Insentif dan perencanaan karir terhadap prestasi kerja guru di SMAN 3 Cikarang Utara*, Tesis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Soecipto Raflis Kosasi. 2007. *Profesi keguruan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Stephen P. Robbins. 2002. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Diterjemahkan oleh Halida, Dewi Sartika. Erlangga. Jakarta.
- Sugiono. 2008. *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Surya Darma. 2008. *Peningkatan Kinerja Guru*. Gramedia. Jakarta.
- Syafrida Elisa, Aryani Tri Wrastari. 2013. Pendidikan Inklusi Ditinjau dari Faktor Pembentukan Sikap. *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan* Vol. 2, No. 01, Februari 2013
- T. Hani Handoko. 2005. *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta
Tabloid Mom and Kiddie, Mei 2008
- Umi Chulsum dan Windy Nova. 2006. *KBBI. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)* Kashiko. Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 14 dan 15 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: BP. Media Pustaka Mandiri.
- Wibowo. 2012. *Manjemen Kinerja. Jakarta*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Yuwono, Sony, Edi Sukarno dan Muhammad Ichsan. 2003. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard: Menuju Organisasi yang Berfokus Pada Strategi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

IPO SYARIAH DAN FAKTOR FUNDAMENTAL

¹Bahrul Yaman, ²Ahmad Rodoni, ³Shelly

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta Indonesia, ³Consultant Roudho Berkah, Indonesia

e-mail: bahrul_yaman@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji *underpricing* penawaran umum perdana (IPO) pada Daftar Efek Syariah di periode 2009-2013. Dalam penelitian ini juga meneliti faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi *underpricing* IPO. Dengan metode *purposive sampling*, sampel yang digunakan adalah 51 perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah. Analisis data menggunakan uji-t satu sampel, dan uji kuadrat terkecil. Hasil dari satu sampel t-test menunjukkan bahwa telah *underpricing* IPO pada Daftar Efek Syariah. Mengenai faktor fundamental di BEI menunjukkan hasil uji model OLS bahwa DES menunjukkan hasil uji model *ordinary least squares* bahwa ukuran perusahaan, jenis industri dan efek negatif reputasi *underwriter* signifikan terhadap *return* awal, sedangkan *return on assets*, *debt to equity ratio*, umur perusahaan dan nilai tukar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *initial return*.

IPO SHARIA AND FUNDAMENTAL FACTOR

Abstract

This study aims to examine underpricing initial public offering (IPO) on the List of Islamic Securities in periode of 2009-2013. In this study also examine the fundamental factors affecting IPO underpricing. With purposive sampling method, the sample used is 51 companies listed in the List of Islamic Securities. Analysis of the data used a one sample t-test, and test ordinary least square. Results of one sample t-test showed that there has been underpricing the IPO on the List of Islamic Securities. Regarding the fundamental factors in BEI shows the results of ordinary least square model test that DES show the results of ordinary least squares model test that the company *SIZE*, type of industry and reputation underwriter significant negative effect on initial returns, while the return on assets, debt to equity ratio, firm *AGE* and the exchange rate didn't have a significant effect on initial returns.

Keywords : *Underpricing, IPO Syariah and Fundamental factor*

I. Pendahuluan

Sistem mekanisme pasar modal konvensional yang mengandung riba, maysir dan gharar selama ini telah menimbulkan keraguan dikalangan umat Islam. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di pasar modal sesuai prinsip syariah. Hal ini berkenaan dengan anggapan dikalangan sebagian umat Islam

sendiri bahwa berinvestasi di pasar modal di satu sisi merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan (diharamkan) berdasarkan ajaran Islam, sementara disisi lain Indonesia perlu memperhatikan dan menarik minat investor mancanegara untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, terutama investor negara-negara Timur Tengah yang diyakini merupakan investor potensial (Rodoni, 2009:62).

Fenomena *underpricing* yang terjadi di berbagai pasar modal disebabkan oleh adanya informasi asimetri. Informasi asimetri ini dapat terjadi antara emiten dan penjamin emisi, maupun antar investor. Untuk mengurangi adanya informasi asimetri maka perusahaan yang akan *go public* menerbitkan prospektus yang berisi berbagai informasi perusahaan yang bersangkutan (Indah, 2006:19-20). Prospektus merupakan suatu laporan yang disyaratkan Badan Pengawas Pasar Modal yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada perusahaan yang ingin *listing* di pasar modal. Selain itu prospektus juga berisikan gambaran umum perusahaan yang memuat keterangan secara lengkap dan jujur keadaan perusahaan dan prospeknya di masa mendatang (Pamungkas, 2011:42).

Salah satu sumber informasi yang relevan untuk digunakan dalam menilai perusahaan yang akan *go public* adalah laporan keuangan yang terdapat di prospektus. Perusahaan tersebut akan menerbitkan bukan hanya saham pertama, namun bisa juga menawarkan saham kedua. Biasanya perusahaan akan merekrut seorang bankir investasi untuk menjamin penawaran tersebut dan seorang pengacara korporat untuk membantu menulis prospektus. Penjualan saham diatur oleh pihak berwajib dalam pengaturan finansial dan jika relevan diatur oleh sebuah bursa saham (Brealey, et.al, 2008: 414).

Informasi yang tersedia di prospektus memuat informasi keuangan dan informasi non-keuangan. Informasi keuangan terdiri dari profitabilitas (*return on asset*) dan *financial leverAGE* sedangkan informasi non keuangan terdiri dari persentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan, reputasi auditor, dan reputasi penjamin emisi (Pamungkas, 2011:42). Tidak hanya faktor keuangan dan non keuangan yang mempengaruhi

underpricing, tetapi juga faktor makro yang digunakan dalam penelitian ini. Faktor makro merupakan faktor yang berada di luar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kenaikan atau penurunan kinerja perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti tingkat bunga domestik, tingkat inflasi, peraturan perpajakan, kurs valuta asing dan lain-lain (Samsul, 2006:200).

Variabel ROA mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak. Hasil pengembalian total aktiva atau investasi menunjukkan kinerja manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba. Perusahaan mengharapkan adanya hasil pengembalian yang sebanding dengan dana yang digunakan. Hasil pengembalian ini dapat dibandingkan dengan penggunaan alternatif dari dana tersebut (Astuti, 2002:37). Dalam penelitian Aini (2009) menjelaskan variabel ROA terbukti berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan Wahyusari (2013) mengatakan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *underpricing*.

Rasio *leverAGE* yang diprosikan dengan *debt to equity ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Debt to equity ratio* yang tinggi mencerminkan resiko perusahaan yang tinggi sehingga ketidakpastian investor meningkat dan akhirnya dapat meningkatkan *underpricing* (Gatot dkk, 2013:152). Jadi semakin tinggi DER semakin tinggi pula *underpricing* yang terjadi dalam perusahaan. Penelitian terhadap *financial leverAGE* pernah dilakukan oleh Tyagita (2009) dimana variabel *financial leverAGE* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *underpricing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Kristiantari (2012) bahwa variabel *financial leverAGE* tidak berpengaruh signifikan terhadap *underpricing*.

Variabel non keuangan yang digunakan adalah umur perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan. Semakin lama umur perusahaan, maka semakin banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Investor secara khusus akan lebih percaya terhadap perusahaan yang sudah terkenal dan lama berdiri dibandingkan dengan perusahaan yang relatif baru. Variabel ini diketahui berdasarkan pengalaman perusahaan, dengan asumsi investasi ke perusahaan yang lebih tua dianggap sebagai investasi yang lebih rendah risikonya. Umur perusahaan dihitung mulai perusahaan didirikan sampai perusahaan melakukan IPO (Pamungkas, 2011:44-46). Hasil penelitian oleh Yulianti (2011) menunjukkan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *initial return*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar (2012) bahwa variabel umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *underpricing*.

Ukuran perusahaan (*SIZE*) dapat digunakan sebagai proksi ketidakpastian terhadap keadaan perusahaan dimasa yang akan datang. Terdapat bermacam-macam kriteria untuk mengukur besar kecilnya perusahaan misalnya jumlah omset penjualan, jumlah produk, modal perusahaan dan total aktiva (Kristiantari, 2012:25). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah (2006) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *underpricing*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *underpricing*.

Jenis industri mungkin saja mempengaruhi *underpricing* karena tiap industri memiliki risiko dan tingkat ketidakpastian yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Risiko untuk setiap jenis industri berbeda karena adanya perbedaan karakteristik. Perbedaan risiko ini menyebabkan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor untuk setiap sektor industri juga berbeda sehingga tingkat *underpricing* juga mungkin akan berbeda (Yolana dan Martini, 2005:544). Dalam penelitian Hidayanto (2004) menjelaskan variabel jenis industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap *initial return*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2010) bahwa jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap *underpricing*.

Reputasi *underwriter* yang berpengalaman dan bereputasi baik akan dapat mengorganisir IPO secara profesional dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada investor. Ini adalah salah satu indikator kemampuan dan keseriusan perusahaan kepada investornya (Sulistio, 2005:92). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaeni dan Agustian (2013) bahwa reputasi *underwriter* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *underpricing*, namun Fazri (2011) menunjukkan bahwa reputasi *underwriter* tidak berpengaruh signifikan terhadap *underpricing*.

Selanjutnya variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel makro yaitu nilai tukar rupiah (kurs). Kurs merupakan salah satu indikator dalam penentuan harga saham. Kurs dapat menggambarkan keadaan pasar. Pergerakan kurs yang dinamis dapat diperdagangkan dan dari kegiatan tersebut dapat diperoleh keuntungan (Aprilianti, 2008:29). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tobing dan Manurung (2009) menunjukkan bahwa variabel kurs berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap *initial return*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti (2008) menunjukkan bahwa variabel kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap *underpricing*.

Riset-riset sebelumnya mengenai faktor faktor yang berpengaruh terhadap *initial return* telah banyak dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Aprilianti, 2008; Kurniawan, 2008; Tobing dan Manurung, 2009; Tyagita, 2009; Sisca, 2010; Kristiantari, 2012; Yuan Tian, 2012; Gabriela, 2013). Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah selain periode penelitian serta variabel-variabel yang berpengaruh terhadap *initial return*, dalam penelitian ini tidak hanya variabel keuangan dan non keuangan tetapi juga menambahkan variabel makro yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan variabel keuangan yaitu *return on asset* (ROA) dan *debt to equity ratio* (DER) serta variabel non keuangan yaitu umur perusahaan, ukuran perusahaan, jenis industri, reputasi *underwriter* dan variabel makro yang digunakan dalam penelitian adalah kurs yang digunakan sebagai variabel independen yang diduga mempengaruhi *initial return* sebagai variabel dependen saat penawaran umum saham perdana (IPO).

Penelitian ini menganalisis perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) di Daftar Efek Syariah (DES). Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali variabel-variabel yang memiliki kemampuan data yang signifikan dalam membentuk model mempengaruhi *initial return* di Indonesia, sehingga penulis memilih judul penelitian tentang IPO Syariah dan Faktor Fundamental.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap *underpricing* sudah pernah dilakukan sebelumnya baik dalam negeri maupun luar negeri. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi peneliti.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tia Setianingrum (2005) dengan menggunakan variabel independen seperti informasi prospektus akuntansi yang diukur dengan *return on asset*, *total debt to equity* dan *total debt to total asset* serta informasi non akuntansi seperti yang diukur dengan persentase penawaran saham, umur perusahaan, reputasi auditor dan reputasi penjamin emisi terhadap variabel dependen yaitu *initial return*. Penelitian ini dilakukan pada bank-bank umum terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 1996-2003. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa dalam informasi prospektus akuntansi yaitu *return on asset*, *total debt to equity* dan *total debt to total asset* berpengaruh secara signifikan terhadap *initial return* pada saat IPO bank-bank umum periode 1996-2003. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa dalam informasi prospektus non akuntansi yaitu persentase penawaran saham, umur perusahaan, reputasi auditor dan reputasi penjamin emisi (*underwiter*) berpengaruh secara signifikan terhadap *initial return* pada saat IPO bank-bank umum periode 1996-2003. Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan meregresikan variabel akuntansi dan non akuntansi menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel akuntansi *return on asset* dan *total debt to equity* serta variabel non akuntansi reputasi auditor dan reputasi penjamin emisi (*underwriter*) berpengaruh secara signifikan terhadap *initial return* pada saat IPO bank-bank umum periode 1996-2003. Perbedaan penelitian

yang dilakukan oleh Tia Setianingrum dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Daftar Efek Syariah periode 2009-2013, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tia hanya dilakukan pada bank-bank umum terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 1996-2003.

Penelitian ini dilakukan oleh Rani Indah S (2006) untuk melihat pengaruh *current ratio*, *debt to equity ratio*, *return on total asset*, *total asset turnover*, *price to book value*, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan presentase penawaran saham terhadap *initial return* dan *return 7 hari* setelah IPO. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEJ periode 2000-2003. Dengan menggunakan analisis regresi berganda dan uji *chow test*, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dengan alpha 0,05 hanya variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *initial return*. Sedangkan pada *return 7 hari* setelah IPO dipengaruhi oleh variabel *return on total assets* (ROA) dan ukuran perusahaan secara negatif dan signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *initial return* dan *return 7 hari* setelah IPO. Hasil uji *chow test* menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh antara variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap *initial return* dan *return 7 hari* setelah IPO. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rani Indah (2006) dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh faktor fundamental terhadap *initial return*, sedangkan penelitian Rani Indah untuk melihat pengaruh faktor keuangan dan non keuangan terhadap *initial return* dan *return 7 hari* setelah IPO.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Imang Dapit Pamungkas (2011) yang bertujuan untuk

mengetahui informasi keuangan dan non keuangan yang berpengaruh terhadap *initial return*. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan IPO (*initial public offering*) periode 2008-2010. Metode yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun hasil yang diperoleh yaitu: Pertama, informasi keuangan untuk ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *initial return*, ada pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap *initial return*, tidak ada pengaruh signifikan antara *financial leverAGE* terhadap *initial return*. Kedua, informasi non-keuangan untuk persentase saham tidak ada pengaruh terhadap *initial return*. Ada pengaruh signifikan antara umur perusahaan terhadap *initial return*, tidak ada pengaruh signifikan antara reputasi auditor terhadap *initial return*. Tidak ada pengaruh signifikan antara reputasi *underwriter* terhadap *initial return*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Imang Dapit Pamungkas dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan faktor keuangan dan non keuangan tetapi juga faktor makro yaitu nilai tukar rupiah (kurs) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ordinary least square* (OLS).

Penelitian ini dilakukan oleh Sarma Uli Irawati (2011) dengan menggunakan variabel informasi akuntansi yaitu *SIZE*, *ROI*, *EPS*, *financial leverAGE* sedangkan variabel informasi non akuntansi meliputi reputasi auditor, reputasi *underwriter* dan jenis industri untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor informasi akuntansi dan non akuntansi yang diperkirakan mempengaruhi *initial return* pada saat *initial public offering* (IPO), baik secara parsial maupun simultan pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia periode 2002-2008. Dari hasil pengujian secara parsial yang dilakukan terhadap 42 sampel perusahaan hanya variabel

SIZE, ROI, EPS, *financial leverAGE* saja yang berpengaruh signifikan terhadap *initial return* pada penawaran saham IPO di Bursa Efek Indonesia periode 2002-2008. Secara simultan diketahui bahwa variabel *SIZE*, ROI, EPS, *financial leverAGE*, reputasi auditor, reputasi *underwriter* dan jenis industri berpengaruh signifikan terhadap *initial return* yang terjadi di Bursa Efek Indonesia periode 2002-2008. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sarma Uli Irawati dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan faktor keuangan dan non keuangan tetapi juga faktor makro yaitu nilai tukar rupiah (kurs) dan periode yang diteliti dilakukan setelah penelitian yang dilakukan oleh Sarma Uli Irawati yaitu periode 2009-2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Hudiwinarsih (2013) bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel yang berdampak ke *underpricing* pada perusahaan saat IPO di Bursa Efek Indonesia selama 2007-2011. Faktor-faktor yang diteliti adalah *return on equity*, *debt to equity ratio*, tingkat inflasi, reputasi auditor dan reputasi penanggung. Hasil model regresi berganda untuk penelitian ini menunjukkan bahwa *return on equity*, reputasi auditor dan reputasi penanggung memiliki dampak yang signifikan terhadap *underpricing* pada tingkat 5% secara signifikan, sedangkan *financial leverAGE* dan tingkat inflasi tidak berpengaruh pada *underpricing*. *Return on equity* (ROE), reputasi kap dan reputasi *underwriter* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *underpricing*. Berdasarkan uji koefisien determinasi, nilai *adjusted R square* sebesar 17,4% yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sedangkan sisanya 82,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Hudiwinarsih dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini faktor makro yang digunakan adalah nilai tukar rupiah

(kurs) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari dan Hudiwinarsih faktor makro yang digunakan adalah inflasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Gatot, dkk (2013) untuk melihat pengaruh DER, ROI, *current ratio* dan rata-rata kurs terhadap *underpricing* pada saat *initial public offering*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang melakukan IPO periode 2006-2011 dengan menggunakan dua periode. Pada periode *hot market* ada 42 perusahaan yang menjadi sampel sedangkan pada periode *cold market* ada 25 perusahaan yang menjadi sampel. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dari penelitian ini adalah untuk periode *hot market* yang berpengaruh yaitu *debt to equity ratio* (DER) dan rata-rata kurs terhadap tingkat *underpricing* pada perusahaan non keuangan yang *go public* di BEI. Sedangkan, pada periode *cold market* yang berpengaruh hanya *current ratio* terhadap tingkat *underpricing* pada perusahaan non keuangan yang *go public* di BEI. Pada periode *hot market*, DER, ROI, *current ratio* dan rata-rata kurs secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat *underpricing* pada perusahaan non keuangan yang *go public* di BEI. Sebaliknya, pada periode *cold market*, DER, ROI, *current ratio* dan rata-rata kurs secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat *underpricing* yang *go public* di BEI. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Gatot, dkk dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dan DES serta tidak membagi perusahaan kedalam kelompok *hot* ataupun *cold market*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gatot dkk hanya menggunakan perusahaan non keuangan saja dan membagi perusahaan kedalam kelompok *hot* ataupun *cold market*.

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi *underpricing* saat IPO juga dilakukan oleh Ayu Wahyusari (2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh solvabilitas, ROA, DER, umur perusahaan, dan reputasi *underwriter* terhadap *underpricing* dan juga untuk mengetahui apakah ada pengaruh solvabilitas, ROA, DER, umur perusahaan, dan reputasi *underwriter* secara bersama-sama terhadap *underpricing*. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data perusahaan sektor jasa yang melakukan IPO di BEI periode 2007-2012. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa solvabilitas, DER, dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *underpricing*. Sedangkan ROA, dan reputasi *underwriter* tidak berpengaruh signifikan terhadap *underpricing*. Sementara solvabilitas, ROA, DER, umur perusahaan, dan reputasi *underwriter*, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *underpricing*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wahyusari dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini menggunakan faktor makro yaitu nilai tukar rupiah (kurs).

Penelitian tentang *underpricing* tidak hanya dilakukan di Indonesia tetapi juga dilakukan diluar negeri, salah satunya oleh Liu dan Ritter (2011). Hasil dari penelitian ini terdapat tingkat *underpricing* di pasar modal Amerika pada periode 1993-1998 sebesar 15.9%, periode 1990-2000 sebesar 64.5% dan periode 2001-2008 sebesar 12.1% sehingga rata-rata *underpricing* sebesar 24.4%. Hasil analisis regresi terhadap *initial return* menunjukkan bahwa reputasi *underwriter*, ukuran perusahaan dan jenis industri berpengaruh terhadap *underpricing*. Sedangkan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat *underpricing*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Ritter dengan penelitian ini adalah dalam

penelitian ini meneliti pasar modal Indonesia dan periode yang diteliti dilakukan setelah penelitian yang dilakukan oleh Liu dan Ritter yaitu periode 2009-2013 dengan rata-rata tingkat *underpricing* di BEI 18,44% dan 18,63 di DES.

Penelitian terhadap *underpricing* di luar negeri juga dilakukan oleh Yuan Tian (2012) dengan judul “An Examination Factors Influencing Underpricing Of Ipos On The London Stock Exchange”. Penelitian ini telah menemukan tingkat *underpricing* di pasar *London Stock Exchange* adalah 6.89744%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tentang ukuran masalah, risiko sistematis, dan pengaruh rasio utang *underpricing* IPO. Besar volume ukuran masalah biasanya memberikan kontribusi ke tingkat yang lebih rendah dari *underpricing*. Risiko sistematis dan hasil rasio utang ke tingkat yang lebih tinggi dari *underpricing*. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara IPO dan risiko sistematis & rasio utang.

II. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh *return on asset*, *debt to equity ratio*, umur perusahaan, ukuran perusahaan, jenis industri, reputasi *underwriter* dan nilai tukar rupiah terhadap *initial return* saat penawaran umum saham perdana (IPO). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang mengalami *underpricing* saat melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia dan Daftar Efek Syariah periode 2009-2013.

2. Metode Penentuan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel non probabilitas dengan

metode *purposive sampling*. Kriteria perusahaan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Seluruh perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013, 2). Seluruh perusahaan yang melakukan IPO di Daftar Efek Syariah (DES) periode 2009-2013, 3). Perusahaan mengalami *underpricing* pada saat penawaran umum saham perdana (IPO), dan 4). Memiliki informasi atau ketersediaan data yang akan digunakan oleh peneliti.

3. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menghitung *Initial Return* (IR)
2. Uji-t Satu Sampel (*one sample t-test*)
3. Uji-t Dua Sampel Independen (*independent samples t-test*)
4. Model *Ordinary Least Square*

Untuk mendapatkan garis regresi terbaik, maka kita harus mencari nilai prediksi yang sedekat mungkin dengan data aktualnya. Oleh karena itu peneliti menggunakan alat analisis estimasi OLS (*ordinary least square*). Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Dimana :

- Y = *Initial Return*
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X₁ = *Return On Asset*
- X₂ = *Debt to Equity Ratio*
- X₃ = Umur Perusahaan
- X₄ = Ukuran Perusahaan
- X₅ = Jenis Industri
- X₆ = Reputasi *Underwriter*
- X₇ = Nilai Tukar Rupiah
- e = *error term*

III. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Statistik Deskriptif Daftar Efek Syariah dan Variabel Fundamental

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
IR	51	1,32	70,00	26,3237	20,69321	
ROA	51	,01	68,52	8,4814	11,11491	
DER	51	,03	32,05	2,5416	4,59684	
AGE	51	1,00	61,00	16,7059	13,74670	
SIZE	51	228799000,00	24846516000000,00	2065817831827,07	3670364365491,75	
JI	51	,00	1,00	,1765	,38501	
RU	51	,00	1,00	7255	,45071	
KURS	51	8521,00	11438,00	9377,9412	649,47867	
Valid N (listwise)	51					

Sumber : data diolah Eviews

Analisis Data di Daftar Efek Syariah. Berdasarkan statistik deskriptif, menggambarkan bahwa rata-rata tingkat *underpricing* dari 51 perusahaan yang melakukan IPO di Daftar Efek Syariah periode 2009-2013 adalah sebesar 26,32% dengan standar deviasi 20,69%. Tingkat *underpricing* terendah terjadi pada PT. MNC Sky Vision Tbk yaitu sebesar 1,32 %. Sedangkan tingkat *underpricing* tertinggi memiliki nilai di atas

60% terjadi pada 4 perusahaan diantaranya PT. Multifiling Mitra Indonesia Tbk yang memiliki tingkat *underpricing* tertinggi sebesar 70,00% sedangkan 3 perusahaan lainnya yaitu PT. Evergreen Invesco Tbk, PT. Gading Development Tbk dan PT. Nirvana Development Tbk memiliki nilai yang sama sebesar 69,52%.

Uji-t Satu Sampel (*one sample t-test*).

Tabel 2. Uji t-satu sampel *initial return*

Test Value = 0						
95% Confidence Interval of the Difference						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
IR	6.851	72	.000	18.63458	13.2112	24.0579

Hasil uji t-satu sampel (*one sample t-test*) untuk menguji $H_0 : \mu_2 \leq 0$ terhadap $H_a : \mu_2 > 0$. Nilai uji-t yang diperoleh $t = 6,851$ dengan derajat kebebasan (df) $n-1 = 72-1 = 71$. Nilai *p-values* untuk *two-tailed* = 0,000; karena dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis satu sisi (*one tailed test*) $H_a : \mu_2 > 0$, maka nilai *p-values* harus dibagi dua $0,000 : 2 = 0,000$. Nilai *p-value* = $0,000 < \alpha = 0,05$ maka $H_0 : \mu_2 \leq 0$ ditolak sehingga $H_a : \mu_2 > 0$ diterima dimana telah terjadi *underpricing* pada penawaran umum perdana (IPO) berdasarkan harga penawaran terhadap harga penutupan di Daftar Efek Syariah. Rata-rata tingkat

underpricing di Daftar Efek Syariah diperoleh sebesar 18,63%.

Uji Model *Ordinary Least Square*. Dari hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena model regresi berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi autokorelasi dan tidak terjadi multikolinearitas. Setelah melakukan uji asumsi klasik, selanjutnya dapat dilakukan uji estimasi linear berganda dan diinterpretasikan pada hasil persamaan regresi berikut:

Table 3. Hasil Model Ordinary Least Square

Estimation Command:

```
=====
LS IR C LNROA LNDER LNAGE LNSIZE JI RU LNKURS
```

Estimation Equation:

```
=====
IR = C(1) + C(2)*LNROA + C(3)*LNDER + C(4)*LNAGE + C(5)*LNSIZE + C(6)*JI +
C(7)*RU + C(8)*LNKURS
```

Substituted Coefficients:

$\text{IR} = 86.745313682 - 3.40485805881 * \text{LNROA} - 1.78873585424 * \text{LNDER} - 1.70244118287 * \text{LNAGE} - 3.39113448605 * \text{LNSIZE} - 14.4463373566 * \text{JI} - 15.9122535456 * \text{RU} + 8.6880823206 * \text{LNKURS}$
--

Sumber : data diolah *Eviews*

Dari tabel hasil model *ordinary least square* maka diperoleh persamaan regresi :

$Y = 86,745 - 3,391 \text{ LnSIZE} - 14,446 \text{ JI} - 15,912 \text{ RU}$

Berdasarkan model regresi yang terbentuk pada persamaan di atas, penjelasan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta diperoleh sebesar 86,745. Hasil ini dapat diasumsikan jika tujuh variabel bebasnya bernilai nol, maka diperoleh nilai *underpricing* yaitu sebesar 0,86745.
- 2) Koefisien regresi LnSIZE diperoleh sebesar – 3,391 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% SIZE akan menurunkan *underpricing* sebesar 0,0391% dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
- 3) Koefisien regresi JI diperoleh sebesar –14,446 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% JI akan menurunkan *underpricing* sebesar 0,14446% dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
- 4) Koefisien regresi RU diperoleh sebesar –15,912 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% RU akan menurunkan *underpricing* sebesar 0,15912% dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

Pengujian Hipotesis

Uji t (Parsial). Uji parsial digunakan untuk mengetahui besarnya masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *return on asset* (ROA), *debt to equity ratio* (DER), umur perusahaan (AGE), ukuran perusahaan

(*SIZE*), jenis industri (*JI*), reputasi *underwriter* variabel dependen yaitu *initial return*.
 (*RU*) dan nilai tukar rupiah (*KURS*) terhadap

Tabel 4. Uji t (Parsial)

Dependent Variable: IR

Method: Least Squares

Date: 06/20/14 Time: 20:43

Sample: 1 51

Included observations: 51

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	86.74531	387.2848	0.223983	0.8238
LNROA	-3.404858	1.754112	-1.941072	0.0588
LNDER	-1.788736	2.258042	-0.792162	0.4326
LNAGE	-1.702441	2.892193	-0.588633	0.5592
LNSIZE	-3.391134	1.614898	-2.099906	0.0416
JI	-14.44634	6.866754	-2.103809	0.0413
RU	-15.91225	6.630482	-2.399864	0.0208
LNKURS	8.688082	40.36024	0.215263	0.8306

Sumber : data diolah *Eviews*

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa tidak semua variabel independen yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut analisis dari masing-masing uji variabel independen terhadap variabel bebas:

a) Pengaruh ROA terhadap *initial return*

Variabel ROA memiliki nilai signifikansi 0,0588 > 0,05; maka $H_0 : \beta_1 = 0$ diterima dan menolak $H_a : \beta_1 \neq 0$. Artinya ROA secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *initial return*.

Hasil penelitian ini tidak konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Aini (2009) bahwa secara parsial ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *underpricing*. Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian yang

dilakukan oleh Badriah (2013) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *initial return*. Tidak berpengaruhnya ROA (profitabilitas perusahaan) pada *underpricing* dapat diakibatkan oleh ketidakpercayaan investor atas informasi keuangan yang disajikan oleh emiten.

b) Pengaruh DER terhadap *initial return*

Variabel DER memiliki nilai signifikansi 0,4326 > 0,05; maka $H_0 : \beta_2 = 0$ diterima dan menolak $H_a : \beta_2 \neq 0$. Artinya DER secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *initial return*.

Hasil penelitian ini tidak konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2010) dan Gatot (2013) yang menyatakan bahwa DER

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *initial return*, namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2008) bahwa secara parsial DER tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *underpricing*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya *leverAGE* perusahaan bukan hanya karena disebabkan oleh kinerja manajemen tetapi juga sangat dipengaruhi faktor lain di luar perusahaan, sehingga nilai DER kurang diperhatikan investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal.

c) Pengaruh *AGE* terhadap *initial return*

Variabel *AGE* memiliki nilai signifikansi $0,5592 > 0,05$; maka $H_0 : \beta_3 = 0$ diterima dan menolak $H_a : \beta_3 \neq 0$. Artinya *AGE* secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *initial return*.

Hasil penelitian ini tidak konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2011) yang menyatakan bahwa *AGE* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *initial return*, namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiantari (2012) bahwa secara parsial *AGE* tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *underpricing* dimana menjadi bukti bagi para investor, umur perusahaan saja tidak dapat dijadikan patokan dalam melihat kualitas perusahaan.

d) Pengaruh *SIZE* terhadap *initial return*

Variabel *SIZE* memiliki nilai signifikansi $0,0416 < 0,05$; maka $H_0 : \beta_4 = 0$ ditolak dan menerima $H_a : \beta_4 \neq 0$. Artinya *SIZE* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *initial return*.

Hasil penelitian ini tidak konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2012) bahwa secara parsial *SIZE* tidak berpengaruh

dengan arah negatif terhadap *underpricing*, namun penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2006) yang menyatakan bahwa *SIZE* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *initial return*. Perusahaan besar umumnya lebih dikenal oleh masyarakat daripada perusahaan kecil. Karena lebih dikenal maka informasi mengenai perusahaan besar lebih banyak dan lebih mudah diperoleh investor dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini akan mengurangi asimetri informasi pada perusahaan yang besar sehingga akan mengurangi tingkat *underpricing* daripada perusahaan kecil karena penyebaran informasi perusahaan kecil belum begitu banyak.

e) Pengaruh *JI* terhadap *initial return*

Variabel *JI* memiliki nilai signifikansi $0,0413 < 0,05$; maka $H_0 : \beta_5 = 0$ ditolak dan menerima $H_a : \beta_5 \neq 0$. Artinya *JI* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *initial return*.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiantari (2012) bahwa secara parsial jenis industri tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *initial return*. Namun, hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Hidayanto (2004) yang menyatakan bahwa *JI* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *initial return*. Berarti investor tidak membedakan jenis industri dalam melakukan investasi pada perusahaan yang melakukan IPO. Investor menganggap risiko investasi terdapat pada semua jenis industri, sehingga peluang untuk memperoleh keuntungan pun dimiliki oleh semua jenis industri.

f) Pengaruh *RU* terhadap *initial return*

Variabel *RU* memiliki nilai signifikansi $0,0208 < 0,05$; maka $H_0 : \beta_6 = 0$ ditolak dan menerima $H_a : \beta_6 \neq 0$. Artinya *RU* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *initial return*.

Hasil penelitian ini tidak konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Fazri (2011) dan Yulianti (2011) yang menyatakan bahwa RU tidak berpengaruh signifikan terhadap *initial return*, namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Junaeni dan Agustian (2013) bahwa secara parsial reputasi *underwriter* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *initial return*. Hal ini menunjukkan bahwa *underwriter* yang bereputasi tinggi lebih berani memberikan harga yang tinggi sebagai konsekuensi dari kualitas penjaminannya, sehingga tingkat *underpricing* rendah. Dalam menghadapi IPO, calon investor cenderung melihat terlebih dahulu pihak yang menjadi *underwriter* karena menurut investor, *underwriter* dianggap memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kondisi emiten. Begitu pula jika dibandingkan dengan emiten, *underwriter* dianggap memiliki informasi yang lebih lengkap tentang pasar.

g) Pengaruh KURS terhadap *initial return*

Variabel KURS memiliki nilai signifikansi 0,8306 > 0,05; maka $H_0 : \beta_7 = 0$ diterima dan menolak $H_a : \beta_7 \neq 0$. Artinya KURS secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *initial return*.

Hasil penelitian ini tidak konsisten terhadap penelitian yang dilakukan oleh Tobing dan Manurung (2009) yang menyatakan bahwa KURS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *initial return*, namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardi (2008) bahwa secara parsial KURS tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap *initial return*. Hal tersebut mungkin dikarenakan kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil. Kurs rupiah terhadap dolar naik turun dan sangat sulit untuk diprediksikan. Oleh karena itu, apabila investor sangat memperhatikan perubahan kurs

dapat menimbulkan kesalahan dalam memprediksi harga saham maupun prospek perusahaan ke depan.

Uji F (Simultan). Uji simultan digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh variabel *return on asset* (ROA), *debt to equity ratio* (DER), umur perusahaan (*AGE*), ukuran perusahaan (*SIZE*), jenis industri (JI), reputasi *underwriter* (RU) dan nilai tukar rupiah (KURS) terhadap variabel *initial return*.

Tabel 5. Uji F (simultan)

Dependent Variable: IR

Method: Least Squares

Date: 06/20/14 Time: 20:43

Sample: 1 51

Included observations: 51

F-statistic	4.927759
Prob(F-statistic)	0.000377

Sumber : data diolah *Eviews*

Dari hasil uji simultan dapat dilihat bahwa secara bersama-sama variabel independen yang terdiri dari ROA, DER, *AGE*, *SIZE*, JI, RU dan KURS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000377; karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan berkenaan faktor fundamental dan IPO Syariah periode 2009-2013, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1). Hasil uji-t satu sampel (*one*

sample t-test) menunjukkan telah terjadi *underpricing* pada saat penawaran umum perdana (IPO) berdasarkan harga penawaran terhadap harga penutupan hari pertama dari seluruh perusahaan yang melakukan IPO di BEI tahun 2009-2013 dengan tingkat rata-rata *initial return* sebesar 18,44%. Sedangkan hasil uji-t satu sampel (*one sample t-test*) di DES juga menunjukkan telah terjadi *underpricing* dengan tingkat rata-rata *initial return* sebesar 18,63%. 2). Hasil dari uji t (parsial) untuk perusahaan yang mengalami *underpricing* di Daftar Efek Syariah menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (*SIZE*), jenis industri (JI) dan reputasi *underwriter* (RU) yang berpengaruh negatif signifikan terhadap *initial return*, sedangkan *return on asset* (ROA), *debt to equity ratio* (DER), umur perusahaan (*AGE*), dan nilai tukar rupiah (KURS) tidak berpengaruh signifikan terhadap *initial return* saat penawaran umum saham perdana (IPO) di Daftar Efek Syariah.

Daftar Acuan

- Aini, Syarifah. 2009. *Pengaruh variabel keuangan dan non keuangan terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia*. Tesis Universitas Sebelas Maret
- Aprilianti, Dian. 2008. *Pengaruh current ratio, suku bunga bank dan inflasi terhadap underpricing pada penawaran saham perdana di Bursa Efek Jakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- Astuti, Dewi. 2002. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Surabaya: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI
- Astuti, Asih Yuli dan Syahyunan. 2013. *Pengaruh variabel keuangan dan non keuangan terhadap underpricing pada saham perusahaan yang melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Brealey, et. al. 2008. *Dasar-dasar manajemen keuangan*. Jakarta: Erlangga
- Gatot Nazir Ahmad, Isti Indriyanti, Agung Darmawan Buchdadi. 2013. Pengaruh DER, ROI, current ratio dan rata-rata kurs terhadap undepricing pada Initial Public Offering. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*. Vol. 4 No. 2/ 2013.
- Hardi, Hasfin. 2009. Analisis dan pengaruh variabel ekonomi makro terhadap penetapan harga saham perdana di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol. 1 No.1, 2009.
- Irawati, Sarma Uli. 2011. Analisis pengaruh informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma. 2011.
- Kristiantari, I Dewa Ayu. 2012. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham pada penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia*. Tesis Universitas Udayana Denpasar
- Pamungkas, Imang Dapit. 2011. *Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, finacial leverAGE, persentase penawaran saham, umur perusahaan, reoutasi penjamin, reputasi auditor terhadap initial return*. Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan.

- Ratnasari, Anggita dan Hudiwinarsih, Gunasti. 2013. Analisis pengaruh informasi keuangan, non keuangan serta ekonomi makro terhadap underpricing pada perusahaan ketika IPO. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 18. No. 2 Agustus 2013.
- Rodoni, Ahmad. 2009. *Investasi Syariah*. Lembaga Penelitian UIN. Jakarta.
- Samsul, Mohamad. 2006. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Surabaya: Penerbit Erlangga
- Setianingrum, Tia. 2005. *Pengaruh informasi prospektus perusahaan terhadap initial return pada penawaran saham perdana*. Tesis Universitas Widyatama
- Sulistio, Helen. 2005. *Pengaruh informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return*. Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo.
- Tobing, Wilson dan Manurung, Adler Haymans. 2010. *Variabel mempengaruhi IR untuk periode 2007-2008*. Paper. Jakarta.
- Yolana, Chastina dan Dwi Martini. 2005. *Variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena underpricing pada penawaran saham perdana di BEJ tahun 1994-2001*. SNA VIII Solo

Kinerja Keuangan dan Karakteristik Obligasi Terhadap *Rating* Obligasi Korporasi di Indonesia

Fadhlin Fathullaela, Ahmad Rodoni¹

Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

¹*e-mail: doni_ahmad@yahoo.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio profitabilitas, *leverage*, likuiditas, aktivitas, dan waktu jatuh tempo obligasi atas peringkat obligasi pada korporasi obligasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan peringkat obligasi yang diterbitkan oleh PT. PEFINDO periode 2008-2012. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Sampel diambil menggunakan metode *purposive sampling*, dimana terdapat 18 perusahaan dan 132 obligasi. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel *debt to equity ratio* (DER), rasio lancar (CR), dan total omset aset (TAT) berpengaruh positif yang signifikan terhadap peringkat obligasi, dan variabel waktu hingga jatuh tempo (TTM) memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada peringkat obligasi. Sebaliknya, variabel *return on assets* (ROA) berpengaruh tidak signifikan terhadap peringkat obligasi.

Financial Performance and Characteristics of Bonds Against Corporate Bond Rating in Indonesia

Abstract

The research aims to analyze the effect of profitability ratio, leverage, liquidity, activity, and time to maturity of bond on the bond rating of corporate bond which listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) and bond rating issued by PT. PEFINDO period 2008-2012. The research used regression logistic analysis. Sampling taking used purposive sampling method. The sample was gotten 18 firms and 132 bonds. The result of research found that the variables debt to equity ratio (DER), current ratio (CR), and total asset turnover (TAT) had significant positive effect on bond rating, and the variable time to maturity (TTM) had significant negative effect on bond rating. Otherwise variable return on assets (ROA) had not significant effect on bond rating.

Keywords: *bond character (time to maturity), bond rating, finance ratio (profitability, leverage, liquidity, activity), logistic regression.*

I. Pendahuluan

Instrument obligasi sebelum diperdagangkan pada masyarakat wajib melalui proses pemerinkatan dahulu. Pemerinkatan surat hutang seperti obligasi dimaksudkan untuk menilai derajat kemampuan emiten dalam membayar bunga dan pokok obligasi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Peringkat kredit ini juga berhubungan dengan penentuan tingkat kupon, dimana obligasi yang berperingkat rendah biasanya akan menyediakan

tingkat kupon yang tinggi dengan harga obligasi yang rendah, dan sebaliknya. Dengan demikian rating obligasi merupakan suatu faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh investor untuk mengambil keputusan investasi.

Di Indonesia terdapat dua lembaga pemerinkat sekuritas utang, yaitu PT. PEFINDO (Pemerinkat Efek Indonesia) dan PT. Kasnic Credit Rating Indonesia. Peringkat obligasi diperbaharui secara regular untuk mencerminkan perubahan signifikan

dari kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Perubahan peringkat memiliki pengaruh signifikan pada aktivitas investasi dan pendanaan masa depan perusahaan serta profil risiko dan kinerja masa depannya. (Magreta dan Poppy, 2009:144)

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi yaitu faktor keuangan dan non keuangan. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi, maka biasanya obligasi tersebut memiliki probabilitas *default*, tergantung dari kesehatan keuangan perusahaan tersebut (Manurung dkk, 2008:1). Aspek keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio profitabilitas), rasio *leverage*, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas, sedangkan aspek non keuangan yang digunakan adalah karakteristik obligasi.

Husnan (2002) menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan serta mengukur efisiensi penjualan yang berhasil diciptakan perusahaan. Pada penelitian ini rasio profitabilitas diwakili oleh *return on asset* (ROA) yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu (Almilia dan Devi, 2007:5).

Salah satu aspek keuangan yang dinilai dalam mengukur kinerja perusahaan adalah aspek *leverage* atau utang perusahaan yang diwakili oleh *debt to equity ratio* (DER). Jika rasio ini cukup tinggi, maka menunjukkan tingginya penggunaan utang, sehingga hal ini dapat membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan biasanya memiliki resiko kebangkrutan yang cukup besar (Manurung dkk, 2008:5), sehingga faktor tersebut dapat mempengaruhi peringkat yang akan diberikan terhadap perusahaan.

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajiban jangka pendek (Rodoni dan Herni, 2010:23). Rasio likuiditas yang diwakili oleh *current ratio* (CR) mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban lancarnya dengan menggunakan seluruh aktiva lancarnya (Sari dkk, 2012:3). Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu berarti perusahaan dalam keadaan likuid dan mempunyai aktiva lancar yang lebih besar dibanding utang lancar, sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Rasio selanjutnya yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio aktivitas yang diwakili oleh *total asset turnover* (TAT) atau perputaran aktiva yang menentukan penilaian aktivitas efektifnya perusahaan menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan (Rodoni dan Herni, 2010:24). Dari *assets turnover* atau perputaran aktiva dapat dilihat keberhasilan pengendalian pengelolaan aktiva lancar dan aktiva tetap. Bila perusahaan dijalankan dengan baik, maka perubahan aktiva lancar searah dengan perubahan penjualan (Noor, 2009:226).

Selain menggunakan variabel rasio keuangan, pada penelitian ini juga menggunakan variabel salah satu karakteristik obligasi yaitu umur obligasi (*time to maturity*). Rahardjo (2003) menyatakan bahwa suatu obligasi yang mempunyai masa jatuh tempo yang lama akan meningkatkan risiko investasi karena dalam periode yang cukup lama, risiko kejadian buruk atau peristiwa yang menyebabkan kinerja perusahaan menurun bisa saja terjadi. Oleh karena itu obligasi dengan umur jatuh tempo yang lebih pendek mempunyai peringkat yang lebih baik dibanding dengan obligasi yang umur jatuh tempo lebih lama. Sehingga dapat disimpulkan umur obligasi akan mempengaruhi peringkat obligasi.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai peringkat obligasi dan laporan keuangan antara lain dilakukan oleh Bram dan Sienly (2010) menemukan adanya hubungan antara peringkat

obligasi dan laporan keuangan. Untuk mengukur informasi laporan keuangan, Bram dan Sienly (2010) menggunakan *debt toto equity ratio*, *return on asset*, *current ratio*, dan *total asset*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa informasi laporan keuangan dapat digunakan untuk memprediksi peringkat obligasi.

Hasil penelitian Maylia (2007) menemukan bahwa rasio keuangan dengan menggunakan rasio *leverage*, *liquidity*, *solvability*, *profitability*, dan *productivity* terbukti mempunyai kemampuan untuk memprediksi peringkat obligasi suatu perusahaan dengan tingkat kebenaran tinggi yaitu 96.9%. Manurung dkk (2008) menemukan bahwa variabel *current ratio*, *total asset turnover*, dan *return on asset* berpengaruh signifikan terhadap *rating* obligasi yang dikeluarkan oleh PT. PEFINDO.

Informasi peringkat obligasi sangat dibutuhkan oleh investor sebagai pertimbangan jika ingin berinvestasi. Karena peringkat obligasi sangat penting bagi investor, maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peringkat obligasi. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2008-2012. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperingkat oleh PT. PEFINDO.

Jenis obligasi yang dipilih dalam melakukan penelitian ini adalah obligasi korporasi sebab obligasi korporasi merupakan obligasi yang paling banyak diminati oleh investor karena sering memberikan keuntungan yang sangat kompetitif dan menarik. Alasan penulis memilih obligasi korporasi yang diperingkat PT. PEFINDO karena perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia lebih banyak menggunakan jasa PT. PEFINDO.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan meneliti bagaimana pengaruh rasio profitabilitas yang diwakili oleh *return on asset* (ROA), rasio *leverage* yang diwakili oleh *debt to equity ratio* (DER), rasio likuiditas yang diwakili oleh *current ratio* (CR), rasio aktivitas yang diwakili oleh *total asset turnover* (TAT), dan karakteristik obligasi yang diwakili oleh *time to maturity* terhadap *rating* obligasi korporasi.

II. Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2012 kecuali sektor perbankan. Dalam penelitian ini penulis akan memilih sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yakni penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kepentingan atau tujuan penelitian. Pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau prosedur kriteria penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi dari tahun 2008 hingga tahun 2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdaftar dalam peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT. PEFINDO.
2. Perusahaan tersebut menerbitkan dan mempublikasikan neraca dan laporan keuangan tahunan lengkap per 31 Desember, tahun 2008 hingga tahun 2012.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Maka pengumpulan data didasarkan pada teknik dokumentasi yang dipublikasikan oleh *website* PT. PEFINDO, *Indonesia Stock Exchange* (IDX), *Indonesian Bond Market Directory* (IBMD 2008, 2009, 2010 2011, dan 2012), dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD 2008, 2009, 2010 2011, dan 2012).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi logistik (*logistic regression*) karena memiliki satu variabel dependen (terikat) yang non metrik (nominal) serta memiliki variabel independen (bebas) lebih dari satu. Analisis ini dilakukan untuk menentukan pengaruh dari setiap variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*), yaitu prediksi peringkat obligasi korporasi tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Karena pada penelitian ini variabel terikat adalah variabel *dummy* yaitu variabel yang memiliki dua alternatif, maka model hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Fungsi regresi logistik:

$$F = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + e$$

Keterangan:

- Y = peringkat obligasi
- Y = 1, jika peringkat obligasi termasuk dalam *investment grade*
- Y = 0, peringkat obligasi termasuk dalam *non investment grade*
- α = konstanta
- β_1-5 = koefisien regresi
- X1 = *return on asset* (ROA)
- X2 = *debt to equity ratio* (DER) X5 = *time to maturity* (TTM)
- X3 = *current ratio* (CR)
- X4 = *total asset turnover* (TAT)

Variabel *dummy* disebut juga variabel indikator, biner, kategorik, kualitatif, atau variabel dikotomi. Pada penelitian ini, model regresi yang digunakan adalah model *binary logistic regression*, yaitu model yang variabel dependennya berupa data kategori, dimana obligasi yang *non-investment grade* diberi kode 0 dan obligasi yang *investment grade* diberi kode 1. Penggunaan regresi logistik ini tidak mensyaratkan adanya *multivariate normal distribution*, karena tidak memerlukan asumsi

normalitas data pada variable bebasnya (Ghazali, 2009:261).

III. Hasil dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil uji regresi logistik, yaitu pada analisis ini digunakan untuk menguji variabel bebas yang terdiri dari *return on assets* (ROA), *debt to equity ratio* (DER), *current ratio* (CR), *total asset turnover* (TAT), dan *time to maturity* (TTM) terhadap *rating* obligasi korporasi.

Tabel 1. Hasil Uji Identifikasi data

<i>Dependent Variable Encoding</i>	
<i>Original Value</i>	<i>Internal Value</i>
<i>Non-Investment Grade</i>	0
<i>Investment Grade</i>	1

Sumber: Hasil olah data

Tabel 1 menggambarkan hasil proses input data yang digunakan pada variabel dependen Y yang bertipe kategori 2 pilihan, yaitu *rating* obligasi korporasi yang *investment grade* diberi kode "1" dan *rating* obligasi korporasi yang mengalami *non-investment grade* diberi kode "0".

Tabel 2. Hasil Uji Processing Summary

Case Processing Summary			
Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	132	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	132	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		132	100.

a. *If weight is in effect, see classification table for the total number of cases*

Sumber: Hasil olah data

Dalam penelitian menunjukkan bahwa jumlah data yang diproses sebanyak 132 atau $N=132$ sehingga tabel 2 ini menjelaskan bahwa seluruh kasus atau

perusahaan ternyata seluruhnya teramati, artinya tidak terdapat satu pun data yang tidak teramati.

Tabel 3. Classification Table

		Predicted		
		Y_Bond. Rating		Percentage Correct
Observed	Y_Bond. Rating	Non Investment Grade	Investment Grade	
		Step 1	Non-Investment Grade	36
	Investment Grade	3	87	96.7
Overall Percentage				93.2

a. The cut value is .500

Sumber: Hasil olah data

Ketepatan Prediksi Klasifikasi. Pada tampilan tabel 3 tentang *classification table* menunjukkan seberapa baik model mengelompokkan kasus ke dalam dua kelompok, baik yang *non-investment grade* maupun yang *investment grade*. Keakuratan prediksi secara menyeluruh sebesar 93,2%. Menurut prediksi *non-investment grade*, kode 0 adalah 42 sampel, sedangkan hasil observasi sebanyak 36 sampel jadi ketepatan klasifikasi 85,7% (36/42). Sedangkan prediksi *investment grade* kode 1 ada 90 sampel, sedangkan hasil observasi sebanyak 87 sampel jadi ketepatan klasifikasi 96,7% (87/90).

Tabel 4.

Iteration History ^{a, b, c}			
Iteration		-2 Log	Coefficients
		likelihood	Constant
Step 0	1	165.165	.727
	2	165.130	.762
	3	165.130	.762

a. Constant is included in the model

b. Initial -2 Log likelihood: 165.130

c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Hasil olah data

Tabel 5.

Model Summary			
Step	-2 Log Likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	51.094 ^a	.578	.810

a. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.

Sumber: Hasil olah data

Untuk melihat kecocokan model (model fit), kriteria yang digunakan adalah nilai *-2Log Likelihood* (-2LL). Pada tabel 4 dapat dilihat adanya penurunan nilai -2LL dari 165,130 menjadi 51,094 pada tabel 5, ini mengindikasikan bahwa model regresi cocok dan baik.

Tabel 6. Hasil uji koefisien Cox & Snell dan Nagelkerke R Square

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	51.094 ^a	.578	.810

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001

Sumber: Hasil olah data

Uji *goodness of fit* model logit berdasarkan hasil dari program SPSS ditampilkan dalam tabel 6 tentang *model summary*. Nilai *Cox & Snell R Square* besarnya 0,578 hal ini berarti variabel ROA, DER, CR, TAT, dan TTM mampu menjelaskan peringkat obligasi dalam *non-investment grade* dan *investment grade* sebesar 57,8%. Sedangkan berdasarkan *Nagelkerke R Square* besarnya 0,810, angka ini berarti bahwa variabel ROA, DER, CR, TAT, dan TTM didalam model logit mampu menjelaskan peringkat obligasi dalam *noninvestment grade* dan *investment grade* sebesar 81%, sedangkan 19% dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 7. Hasil Uji Identifikasi Prediksi Klasifikasi

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-Square	df	Sig.
1	6.944	8	.543

Sumber: Data diolah

Uji Chi Square Hosmer & Lemeshow. Jika nilai *Hosmer & Lemeshow goodness of fit test statistics* sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness of fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai *Hosmer & Lemeshow goodness of fit test statistics* lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, yang berarti model dapat memprediksi nilai observasinya atau dapat

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. (Ghazali, 2009:269).

Tampilan tabel 7 besarnya nilai statistik *Hosmer & Lemeshow goodness of fit* sebesar 6,944 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,543 yang nilainya jauh di atas 0,05, maka dapat disimpulkan model dapat diterima.

Uji Wald. Pada hasil uji Wald dalam tabel 8 dapat dilihat bahwa variabel independen dikatakan signifikan apabila nilai alpha ($\text{sig} < 0,05$). Variabel independen *return on asset* (ROA) tidak signifikan pada $\alpha = 0,131$, variabel *debt to equity ratio* (DER) signifikan pada $\alpha = 0,029$, variabel *current ratio* (CR) signifikan pada $\alpha = 0,005$, variabel *total asset turnover* (TAT) signifikan pada $\alpha = 0,010$, dan variabel *time to maturity* (TTM) signifikan pada $\alpha = 0,000$.

Dari hasil uji Wald di atas dapat dinyatakan bahwa variabel independen yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi diantaranya adalah variabel *debt to equity ratio* (DER), *current ratio* (CR), *total asset turnover* (TAT), dan *time to maturity* (TTM). Dan variabel independen yang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi adalah *return on asset* (ROA).

Tabel 8. Hasil Uji Wald

		Variables in the Equation						95% C.I. for EXP(B)	
		B	S.E	Wald	df	Sig.	Exp(B)	Lower	Upper
Step 1 ^a	X1_ROA	-2.716	1.798	2.281	1	.131	.066	.002	2.245
	X2_DER	.486	.223	4.763	1	.029	1.625	1.051	2.514
	X3_CR	1.729	.616	7.867	1	.005	5.634	1.683	18.855
	X4_TAT	4.193	1.634	6.585	1	.010	66.206	2.692	1628.017
	X5_TTM	-1.075	.267	16.248	1	.000	.341	.202	.576
	Constant	2.280	1.262	3.263	1	.071	9.780		

a. Variable(s) entered on step 1: X1_ROA, X2_DER, X3_CR, X4_TAT, X5_TTM

Sumber: Hasil olah data

Uji signifikan variabel independen secara individual dengan menggunakan uji statistika Wald bisa dilihat dalam tampilan tabel 8. Variabel DER, CR, TAT, dan TTM berpengaruh terhadap peringkat obligasi pada *non-investment grade* dan *investment grade* sebesar 5%, lihat kolom sig. maka persamaan regresi logistik tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Bond Rating} = 2,280 - 2,716 X1 + 0,486 X2 + \\ (0,131) \quad (0,029) \\ 1,729 X3 + 4,193 X4 - 1,075 X5 \\ (0,005) \quad (0,010) \quad (0,000)$$

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya yang dapat dihubungkan dengan hipotesis yang dijelaskan dalam penelitian ini. Variabel independen dikatakan signifikan apabila nilai α (sig. < 0,05).

IV. Simpulan

Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan *return on assets* (ROA) yang merupakan rasio profitabilitas. Pada variabel ROA menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,131 (tabel 8), dengan nilai koefisien -2,716, yang berarti rasio profitabilitas pada variabel ROA tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi peringkat obligasi korporasi yang terdaftar di PT. PEFINDO. Maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak signifikan terhadap peringkat obligasi. Artinya rasio tersebut tidak mampu digunakan untuk memprediksi peringkat obligasi dimasa mendatang. Investasi dalam bentuk obligasi secara langsung sebenarnya tidak terpengaruh oleh profitabilitas perusahaan, karena berapapun besarnya profit yang mampu dihasilkan oleh perusahaan, pemegang obligasi tetap menerima sebesar tingkat bunga yang telah ditentukan (Almilia dan Devi, 2007:5). Hasil ini konsisten dengan penelitian Luky Susilowati dan Sumarto (2010) serta Grace Putri Sejati (2010) yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas tidak

berpengaruh signifikan dalam memprediksi peringkat obligasi, dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia 2012 yang menyatakan bahwa variabel *return on asset* (ROA) berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, variabel *leverage* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,029 (pada tabel 8), dengan nilai koefisien 0,486. Yang berarti variabel *leverage* memiliki pengaruh signifikan positif dalam memprediksi peringkat obligasi korporasi yang terdaftar di PT. PEFINDO. Maka Ha diterima dan H0 ditolak. Dari persamaan regresi logistik di atas dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan variabel DER sebesar 1% maka akan berpengaruh menaikkan nilai variabel peringkat obligasi sebesar 0,486 poin, dengan catatan variabel lain dianggap *ceteris paribus*. Dengan rendahnya *leverage* pada suatu perusahaan mengindikasikan bahwa proporsi penggunaan utang untuk membiayai investasi terhadap modal yang dimiliki memiliki kemampuan yang baik. Dengan demikian semakin tinggi *leverage* maka semakin berpengaruh terhadap kemungkinan peringkat obligasi perusahaan. *Leverage* menunjukkan ketergantungan perusahaan kepada sumber dana dari luar, atau ketergantungan pada utang (Faizal, 2009: 224). Hasil ini sesuai dengan penelitian Damayanti dan Fitriyah (2011) yang menyatakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh signifikan dalam memprediksi peringkat obligasi seluruh perusahaan yang terdaftar di PT. PEFINDO. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifman (2009) yaitu *debt equity ratio* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi pada obligasi perusahaan.

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel *current ratio* (CR) mempunyai nilai signifikansi 0,005 dengan nilai koefisien sebesar

1,729. Yang berarti rasio likuiditas berpengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi prediksi peringkat obligasi korporasi yang terdaftar di PT. PEFINDO. Maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti setiap kenaikan 1% pada variabel CR akan berpengaruh menaikkan nilai variabel peringkat obligasi sebesar 1,729 poin, dengan catatan variabel lain dianggap *ceteris paribus*. Dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki kondisi keuangan yang kuat sehingga dapat mempengaruhi peringkat obligasi. Semakin besarnya likuiditas yang diukur dengan *current ratio* akan berpengaruh terhadap semakin rendahnya peringkat obligasi, sebaliknya, semakin kecil likuiditas akan berpengaruh pada semakin tingginya peringkat obligasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Almilia & Devi (2007) dan Winda dkk (2011) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan dalam memprediksi peringkat obligasi perusahaan manufaktur.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa perusahaan pemeringkat obligasi menggunakan rasio keuangan salah satunya likuiditas dalam menilai tingkat keamanan obligasi (Bodie, 2006). Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Magreta dan Nurmawati (2009) yang menyatakan bahwa *current ratio* tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi peringkat obligasi.

Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa rasio aktivitas menunjukkan variabel *total asset turnover* (TAT) mempunyai nilai signifikansi 0,010 dengan nilai koefisien 4.193. Yang berarti rasio aktivitas berpengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi prediksi peringkat obligasi korporasi yang terdaftar di PT. PEFINDO. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti kenaikan 1 kali (1 *times*) pada variabel TAT akan berpengaruh menaikkan nilai variabel peringkat obligasi sebesar 4,193 poin, artinya semakin besar *total asset turnover* suatu perusahaan akan semakin

bagus karena mengindikasikan bahwa penjualan lebih besar dari total aset.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Manurung dkk (2008) serta Nurmawati dan Setiawati (2012) yang pada penelitiannya dapat disimpulkan bahwa (TAT) berpengaruh signifikan terhadap pemeringkatan obligasi. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Fitriyah (2012) yang menyatakan bahwa TAT tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi.

Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan negatif antara *time to maturity* (TTM) dalam memprediksi peringkat obligasi karena nilai signifikansi sebesar 0,000, dengan nilai koefisien -1,075. Yang berarti umur obligasi berpengaruh signifikan negatif dalam mempengaruhi prediksi peringkat obligasi korporasi yang terdaftar di PT. PEFINDO. Maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 tahun pada variabel TTM akan berpengaruh menurunkan nilai variabel peringkat obligasi sebesar 1,075 poin, dengan catatan variabel lain dianggap *ceteris paribus*. Dengan semakin pendek jangka waktu obligasi akan berpengaruh terhadap minat investor karena dianggap risikonya akan semakin kecil dan juga akan berpengaruh terhadap tingginya peringkat obligasi korporasi yang terdaftar di PT. PEFINDO. Hal ini sesuai dengan penelitian Winda (2011) dan Yohanes (2012) yang berpendapat bahwa umur obligasi berpengaruh signifikan terhadap perubahan peringkat obligasi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriani, Nugraha, dan Saryadi (2012) serta Ikhsan, Yahya, dan Saidaturrahmi (2012) yang memperoleh hasil bahwa *time to maturity* bukan merupakan faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi.

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 1) Hasil

uji regresi logistik ditemukan bahwa variabel rasio *leverage* dengan menggunakan variabel *debt to equity ratio* (DER), variabel rasio likuiditas dengan menggunakan variabel *current ratio* (CR), serta variabel rasio aktivitas dengan menggunakan variabel *total asset turnover* (TAT) berpengaruh signifikan positif, serta pada variabel *time to maturity* (TTM) berpengaruh signifikan negatif terhadap peringkat obligasi. Sedangkan pada rasio profitabilitas ditemukan bahwa dengan menggunakan *return on asset* (ROA) tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi peringkat obligasi. 2) Hasil uji regresi logistik pada penelitian diperoleh nilai *Nagelkerke R Square* besarnya 0,810, angka ini berarti bahwa variabel *return on asset* (ROA), *debt to equity ratio* (DER), *current ratio* (CR), *total asset turnover* (TAT), dan *time to maturity* (TTM) menggunakan model logit mampu menjelaskan peringkat obligasi dalam *non-investment grade* dan *investment grade* sebesar 81%, sedangkan sisanya sebesar 19% dipengaruhi oleh variabel lain.

Daftar Acuan

- Almilia dan Devi. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEJ. *Jurnal Proceeding Seminar Nasional Manajemen SMART* : Universitas Kristen Maranatha Bandung.
- Henry, Faizal Noor. 2009. *Investasi: Pengelolaan Keuangan Bisnis & Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta : Indeks.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadianto, Bram dan M. Sienly Veronica Wijaya. 2010. Prediksi Kebijakan Utang, Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran, dan Status Perusahaan Terhadap Kemungkinan Penentuan Peringkat Obligasi. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*. Tahun 3, No. 3, Desember 2010.
- Husnan, Suad. 2001. *Dasar-Dasar Teori Portfolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Magreta, dan Poppy Nurmayanti. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi Ditinjau Dari Faktor Akuntansi dan Non Akuntansi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 11, No. 8, Desember 2009, Hlm. 143-154.
- Manurung, Silitonga dan Tobing. 2008. *Hubungan Rasio-Rasio Keuangan Dengan Rating Obligasi*.
- Surya, M. Irsan Indra; Ivan Yustiavandana; Arman Nefi; Adiwarmarman. 2008. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurmayanti, Poppy dan Eka Setiawati. 2012. Bond Rating dan Pengaruhnya Terhadap Rasio Keuangan. *Jurnal Pekbis*, Vol. 4, No. 2, Juli 2012, Hal. 95-106.
- Pramono Sari, Maylia. 2007. Kemampuan Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk Memprediksi Peringkat Obligasi (PT. PEFINDO). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. September 2007. Hal. 172-182.
- Rahardjo, Sapto. 2003. *Panduan Investasi Obligasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Raharja dan Sari. 2012. Perbandingan Alat Analisis (Diskriminan & Regresi Logistik) Terhadap Peringkat Obligasi (PT. PEFINDO). *Jurnal MAKSI*.
- Rodoni, Ahmad. vol.8 No. 3, Desember. 2009. Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kemungkinan Terjadinya Obligasi Default: Studi Kasus Emiten Dengan Status Gagal Bayar Yang

Terdaftar Di BEJ Periode 2001-2007. *Jurnal Etikonomi*.

Rodoni, Ahmad dan Herni Ali. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Setyapurnama, Yudi Santara dan A.M. Vianey Norpratiwi. 2005. Pengaruh Corporate Governance terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*.

Wahyuni, Sri. 2013. The Effect Of Auditor Quality On Bond Rating: The Testing Of Information Role Auditors In Indonesia. *Journal of Economic,*

Business, and Accountancy Ventura. Volume 16, No. 1, April 2013, pages 171-186.

William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, Jeffery V. Bailey. 2005. *Investasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Edisi Keenam Jilid I. Indeks.

Zuhrotun dan Baridwan. 2005. *Pengaruh Pengumuman Peringkat Terhadap Kinerja Obligasi*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo. 15-16 September.

Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. 2006. *Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Indeks Subyek

Business & Management Journal, 2014, Volume 11: 1 – 279

ISSN: 1693 – 9808

<i>Asset turn over</i>	1	Khalifah	185, 193, 194, 195, 196
bisnis hijau	157, 158, 185	kinerja ...	3, 7, 8, 10, 25, 41, 42, 46, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 175, 198, 199, 202, 206, 214, 217, 218, 222, 225, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 271
<i>debt to equity ratio</i>	270, 271, 272, 273, 275, 276, 278	Kinerja Guru.....	234, 250, 251
diklat	58, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 122, 126, 127, 129, 132, 133, 136, 137, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 148	kinerja Program Studi.	253, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 267, 268
dimensi	169, 223, 242, 253, 255, 256, 260, 261, 262, 264, 268	klasifikasi....	198, 200, 201, 203, 204, 207, 210, 212, 214, 238, 274
efektivitas kebijakan	164, 167	kompetensi..	19, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 40, 41, 42, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 105, 107, 115, 117, 119, 124, 146, 167, 173, 241, 242, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 262, 264, 265, 266, 268
ekonomi Islam.....	185	kurs	1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 16
Fasilitas	179, 216, 217, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231	<i>leverage</i> ,	270, 271, 272
Gaji,	216, 229	likuiditas	270, 271, 272, 277, 278
<i>green marketing</i> ...	151, 152, 153, 154, 157, 158, 163, 185	lingkungan hidup	152, 154, 157, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 182, 186, 187
<i>green product</i>	185	Lingkungan Kerja	216, 227, 228, 229, 230, 231
Insentif	234, 236, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252	madrasah	101, 104, 105
karakter .	77, 112, 116, 122, 126, 128, 129, 132, 133, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 158, 189, 257	Manajemen Berbasis Sekolah....	101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 119, 120
kebijakan .	2, 11, 15, 17, 19, 20, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 56, 64, 65, 84, 86, 101, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 117, 119, 124, 147, 153, 155, 156, 159, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 180, 182, 183, 185, 195, 203, 214, 223, 231, 235	MBS.....	<i>See</i> Manajemen Berbasis Sekolah
kebijakan pengelolaan.....	164, 167, 168	motivasi...	64, 67, 113, 117, 122, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 191, 217, 220, 221, 238, 241, 242, 259
kelangsungan kesehatan anak	164, 168	nilai perusahaan...	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17
kepemimpinan strategik.....	253, 254, 255, 256, 260, 262, 264, 267, 268		
Kepuasan Kerja..	216, 218, 221, 222, 227, 228, 229, 230, 233		
keunggulan bersaing	80, 96, 98, 253		

nilai tukar	1, 2, 6, 7, 12	<i>return on assets</i>	270, 276
obligasi.....	270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278	Sarana dan Prasarana	234, 259, 264
optimalisasi	198, 200, 201, 206	sekolah inklusi	234, 235, 236, 237, 242, 244, 249, 250
pajak daerah.....	45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57	Sikap ...	152, 223, 226, 234, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 251, 252
pemasaran hijau ..	151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 196, <i>See</i>	SNP	<i>See Standar Nasional Pendidikan</i>
pembangunan yang berkelanjutan.....	151	Standar Nasional Pendidikan .	19, 20, 21, 22, 24, 25, 253, 258, 259, 266
pemungutan.....	45, 47, 48, 51, 52	standar pelayanan mutu	101, 104
pencapaian mutu	19, 39, 40, 42, 105	strategi	3, 19, 20, 21, 24, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 107, 116, 127, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 161, 162, 173, 174, 183, 195, 198, 206, 214, 241, 253, 254
pengalaman kerja	63, 67, 68, 70, 73, 75, 77, 78, 218	strategi bisnis	80
pengelolaan sampah ...	164, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182	strategi korporasi	80
pengembangan organisasi.....	198, 206	strategi pemasaran.....	80
peringkat obligasi.....	270, 276, 277	strategi marketing	<i>See</i>
pertumbuhan perusahaan.....	1, 2, 4, 5, 9, 13, 16	struktur bisnis	198
profitabilitas	1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 271, 276	struktur modal.....	1, 2, 3, 4, 6, 9, 10
rasio keuntungan	1	struktur permodalan	1
rasio lancar.....	270	tiga pilar utama.....	151
rasio profitabilitas	270, 271, 272, 276, 278	total omset aset	270
rekayasa ulang	198, 199, 200, 206	<i>Turn Over</i> ...	216, 218, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
remunerasi.....	65, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 144, 146, 147	waktu jatuh tempo.....	270
Remunerasi ..	122, 125, 127, 132, 136, 138, 139, 140, 141		
retribusi daerah	45, 46, 47, 48, 51, 53, 55, 57		

Indeks Penulis

Business & Management Journal, 2014, Volume 11: 1-279
ISSN 1693 – 9808

Seluruh penulis yang artikel ilmiahnya diterbitkan di *Business & Management Journal* Volume 11 Tahun 2014 dituliskan pada daftar berikut yang diurut berdasarkan abjad dilengkapi dengan nomor dan halaman.

Ahmad, Gofur.__(2) 198-215, 216-233	Romdoni, Andy.__(1) 1-18
Badrianto, Yuan.__(2) 234-252	Satispi, Evi.__(1) 101-121
Fathullaela, Fadhlin.__(2) 270-279	Shelly.__(2) 253-267
Herman, KMS.__(1) 45-62	Siregar, Rinaldy Arifin.__(2) 216-233
Hidayah, Nur.__(1) 80-100, (2) 234-252	Suhendar, Sulaeman.__(2) 216-233, (2) 234-252
Ismail, Muhammad Rio.__(1) 122-150	Sutrisno, Wiriadi.__(2) 151-163
Ismiyati.__(2) 164-184	Umam, Khoirul.__(2) 185-197
Kadarisman, Muh.__(2) 164-184	Widayat.__(1) 63-79
Mustaupa, Sardi.__(1) 19-44	Yaman, Bahrul.__(2) 253-267
Purnawan, Irfan.__(2) 164-184	
Rodoni, Ahmad.__(2) 268-277,(2) 270-279	

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada para pakar/ mitra bebestari/rekan setara yang telah diundang sebagai penelaah oleh *Business & Management Journal* dalam Volume 11 Tahun 2014. Berikut ini adalah daftar nama pakar/mitra bebestari/rekan setara yang berpartisipasi:

Gofur Ahmad (Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia)

Jono Munandar (Institut Pertanian Bogor, Indonesia)

Muchdie (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta, Indonesia)

Rodoni Ahmad (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia)

Suhendar Sulaeman (Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia)

Yahya Hamza (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Indonesia)

PEDOMAN PENULISAN

Sistematika penulisan dalam naskah:

Judul

Ditulis singkat, informatif, dalam bahasa Indonesia. *Times New Roman, font size 14, bold*
(kosong 1 ketuk spasi 1, *font size 14*)

Penulis

Nama penulis disajikan lengkap tanpa gelar, *Times New Roman 12*.
(kosong 1 ketuk spasi 1, *font size 12*)

Nama dan alamat tempat penulis bekerja, kode pos. Negara. *Times New Romans 10*
(kosong 1 ketuk spasi 1, *font size 12*)

e-mail: penulis@alamat.com. Times New Roman 10
(kosong 2 ketuk spasi 1, *font size 12*)

Abstrak (*font size 12, bold*)

(kosong 1 ketuk spasi 1, *font size 12*)

Bagian ini memuat ringkasan riset yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia yang panjangnya masing-masing antara 200-300 kata. Abstrak ditulis menggunakan spasi 1, *Times New Romans, 10*.

(kosong 2 ketuk spasi 1, *font size 12*)

Article Title (*12 pt, bold*)

(kosong 1 ketuk spasi 1, *font size 12*)

Abstract (*font size 12, bold*)

(kosong 1 ketuk spasi 1, *font size 12*)

Written in English. This section contains a summary of the research consisted of background, research objectives, research methods, research results, and conclusions. Abstract followed by at least four keywords, written sequential alphabet. Abstract written by each length between 200-300 words. It should not contain any references or displayed equations. Abstract is written with Times New Roman font size 10 and single spacing.

(one blank single space line, *12 pt*)

Keywords: *at least four keywords written sequential alphabetical, Times New Roman 10 pt, italic.*

(kosong 3 ketuk spasi 1, *font size 12*)

I. Pendahuluan (*12 pt, bold*)

(kosong 1 ketuk spasi 1, *font size 12*)

Tidak menggunakan subjudul. Memuat penjelasan padat dan ringkas tentang latar belakang masalah dan tujuan dilakukannya penelitian, studi pustaka yang mendukung dan relevan, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran penelitian.

Naskah ditulis menggunakan bahasa Indonesia baku, dalam format 2 kolom menggunakan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 11 spasi 1.15 pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm). Batas margin kiri 2 cm, batas margin kanan 2 cm, batas margin atas 3,5 cm dan batas margin bawah 2,5 cm. Rata kiri – kanan (*justified*). Naskah ditulis tidak

lebih dari 20-30 halaman termasuk daftar tabel dan daftar gambar di dalamnya.

II. Metode Penelitian (12 pt, bold)

(kosong 1 ketuk spasi 1, font size 12)

Bagian ini menjelaskan disain metodologi penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, populasi, sampel, sumber data, instrumen, pendekatan terhadap analisis data serta tehnik analisis/uji statistik yang digunakan.

III. Hasil dan Pembahasan (12 pt, bold)

(kosong 1 ketuk spasi 1, font size 12)

Memuat penjelasan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan dan pembahasan temuan yang disajikan apa adanya tanpa pendapat penulis/peneliti, kemudian dilanjutkan dengan bahasan argumentatif-interpretatif tentang jawaban terhadap hasil penelitian yang ditulis secara sistematis sesuai tujuan penelitian.

Tabel, grafik dan gambar dapat terbaca dengan jelas serta diberi penjelasan yang memadai, mudah dipahami, dan proporsional. Isi Tabel ditulis menggunakan spasi 1 dan ukuran huruf 10 pt *Times New Roman*. Judul tabel (*Times New Roman*, 11pt) diletakkan di atas tabel dan judul gambar (*Times New Roman*, 11 pt) di bawah gambar, diberi nomor urut sesuai urutan pemunculannya.

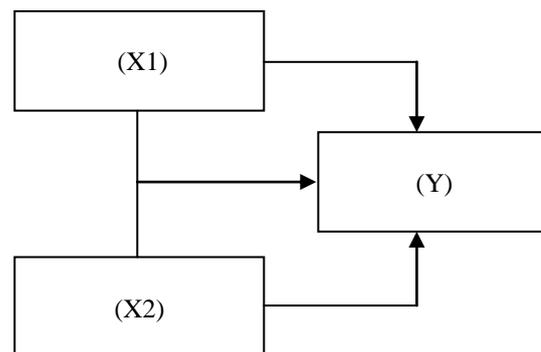
Tabel dan atau gambar yang diacu dari sumber lain harus disebutkan, kecuali merupakan hasil penelitian penulisnya sendiri. Tabel, gambar dan grafik yang dicantumkan harus dibuat dalam resolusi yang tinggi sehingga memudahkan pencetakan dan menampilkan hasil yang baik.

Mohon diperhatikan, bahwa naskah akan dicetak dalam format hitam putih (*grayscale*).

Tabel 1. Nomor Pendaftaran
(kosong 1 ketuk spasi 1, font size 12)

NC	A	B	C
1	25.978		
3	83.211		
5	109.189		

(kosong 2 ketuk spasi 1, 12 pt)



(kosong 1 ketuk spasi 1, 12 pt)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

(kosong 2 ketuk spasi 1, 12 pt)

IV. Simpulan (12 pt, bold)

(kosong 1 ketuk spasi 1, font size 12)

Merupakan simpulan penelitian, menjawab tujuan penelitian tanpa melampauinya, menjelaskan implikasi penelitian serta saran-saran yang diperlukan. Sedapat mungkin bagian simpulan ini ditulis dalam bentuk narasi.

Daftar Acuan (12 pt, bold)

(kosong 1 ketuk spasi 1, font size 12)

Ditulis menggunakan jenis huruf *Times New Roman* 11 pt. Memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan naskah. Hanya sumber yang diacu yang dimuat dalam daftar acuan ini. Ditulis menggunakan format APA (*American Psychological Association*). Disusun menurut alfabetik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul (*italic*), edisi, kota penerbit, nama penerbit.
- b. Untuk artikel dalam buku: nama pengarang, tahun, judul karangan, judul buku (*italic*), editor, kota penerbit, nama penerbit.
- c. Untuk karangan dalam majalah atau jurnal: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama majalah/jurnal (*italic*), nomor penerbitan, halaman pertama dan terakhir.
- d. Untuk karangan dalam seminar: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama seminar (*italic*), penyelenggara, waktu, tempat seminar.

Contoh:

Buku:

Wheelen, Thomas L. and J. David Hunger. 2012. *Strategic Management and Business Policy: Achieving Sustainability*. Twelfth Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Artikel dalam buku:

Muckleston, KW. 1990. Integrated Water Management in the United States. Dalam M. Bruce (ed): *Integrated Water Management, International Experiences and Perspectives*. London: Belhaven Press.

Majalah/Jurnal:

Ulupui, I. G. K. A. 2007. Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas, dan Profitabilitas terhadap Return saham (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman dengan Kategori Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 2. No. 1, Januari: 88 – 102.

Karangan dalam seminar:

Sunley, E. M, Baunsgaard, T, and Simard, D. 2002. Revenue from the Oil and Gas Sector: Issues and Country Experience. *Post conference draft for IMF conference*. June 5-6.

Penyerahan Naskah

Business & Management Journal adalah jurnal akademik yang diterbitkan dua kali setahun (Mei dan September) oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. **Business & Management Journal** telah memperoleh ISSN sehingga dapat diakui dalam penilaian angka kredit.

Business & Management Journal diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi hasil riset manajemen dan tinjauan pemikiran bisnis kepada para akademisi, praktisi, mahasiswa dan pihak lain yang berminat pada riset manajemen dan bisnis. Ruang lingkup bidang dari hasil riset yang dimuat dalam **Business & Management Journal** antara lain manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pendidikan dan pelatihan, serta semua hasil riset terkait manajemen dan bisnis.

Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang dikirimkan ke **Business & Management Journal** belum pernah dipublikasikan dalam jurnal yang lain. Setiap artikel yang diterima akan melalui proses *review* oleh mitra bebestari dan atau redaksi. Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam *review* antara lain: (1) memenuhi persyaratan standar publikasi jurnal, (2) metodologi riset yang dipakai, dan (3) manfaat hasil riset terhadap pengembangan manajemen dan praktik bisnis di Indonesia.

Redaksi mempunyai hak untuk mengubah dan memperbaiki ejaan, tata tulis dan tata bahasa naskah yang dimuat. Redaksi berhak untuk menolak naskah yang isi dan formatnya tidak sesuai dengan pedoman penulisan naskah di atas dan redaksi tidak berkewajiban untuk mengembalikan naskah tersebut. Namun apabila isi dari naskah disetujui untuk dimuat tetapi format tidak sesuai dengan pedoman penulisan di atas, maka naskah akan dikembalikan kepada penulis untuk penyesuaian format sesuai dengan pedoman penulisan. Dewan Redaksi berhak menolak naskah

ilmiah yang dianggap tidak layak muat di *Business & Management Journal*.

Naskah diserahkan dalam bentuk *softcopy* (berupa CD) atau dikirim melalui *e-mail*, yang keduanya harus memuat isi yang sama. Nama file, judul dan nama penulis naskah dituliskan pada label CD. Pengiriman naskah ke redaksi melalui alamat *e-mail*: **bmj.umj@gmail.com**

atau melalui pos ke:

**Dewan Redaksi
Business & Management Journal
Gedung Sekolah Pascasarjana
Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta 15419
Indonesia**